



**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**



**KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
CAMAT JENANGAN**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, arahan dan kasih-Nya Laporan Kinerja (LK) Kerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pangrap Tahun 2023 ini bisa selesai sebagai sebuah laporan kinerja yang menggambarkan apa telah dilakukan dan diharapkan dari Pemerintah Jenderal kepada Pemerintah Kabupaten Pangrap mengenai siklus program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Integritas Nomor 20 Tahun 2021 tentang laporan kinerja dan lembaga sipil ASN dan pejabat yang diincar untuk tugas pemenuhan, pengakuan, pengumpulan, dan pengalokasian penghasilan dan jabatan.

Kerita pada tingkat pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk meningkatkan kinerja dan kegiatan pelaksanaan via organisasi, serta dan lembaga organisasi yang merupakan satu kesatuan atau berstruktur sendiri, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan laporan kinerja serta bertanggung jawab terhadap Menteri Pangrap dan Asesor Negara dan lembaga lainnya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penunjuk Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri dan Tata Cara Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan ini Laporan Kinerja (LK) ini juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan program-program pembangunan ASN berkaitan dengan 6 dimensi kinerja sehingga dapat menjadi motivasi, reward dan hukuman-hukuman yang diharapkan dan diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan pemenuhan maupun evaluasi indikator kinerja yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kabupaten Pangrap Tahun 2023.

Pangrap, 31 Desember 2023

Gubernur Pangrap



Supriyanto, S.Sos., M.M.
Pangrap Pangrap (vivo)
WA: 0812345678901000

DAFTAR ISI

Daftar	1
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	6
Revisi Terakhir	9
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.1.1 Fungsi Strategis	2
1.1.2 Fungsi Manajerial	4
1.1.3 Fungsi Operasional	5
1.1.4 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.1.5 Sumber Daya Manusia Organisasi	10
1.3 TUJUAN STRATEGIS	10
BAB II: PEMBAHASAN MATERI	19
2.1 RENCANA STRATEGIS BENCANA	
2.1.1.1.1.1.1	21
2.1.1.1.1.1.2	22
2.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMANGKAT SIAPSAHA	
2.2.1.1.1	24
2.2.1.2	28
2.3 RENCANA AKTIVITAS TAHUNAN	27
2.4 PERUMAH MANAJEMEN	33
BAB III: KEMAMPUAN MANAJEMEN	
3.1 Kemampuan Organisasi	35
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	36
2. Analisis dan Analisis Capaian Kinerja Per Sektor	39
3.2 Rencana Anggaran	47
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

Daftar Isi

- Halaman 21 Das-Chein Pengantar Dasen (1993)
- Halaman 22 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 23 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 24 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 25 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 26 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 27 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 28 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 29 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 30 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222
- Halaman 31 Deskripsi Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222

Daftar Isi

Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222

Dasen (1993) Dasen (1993) (1993) 222

WISBAR EKSEKUTIF

Peraturan Lulusan Karya (LK) menjadi salah satu aspek yang dibebani pemerintah untuk mendorong dan kelola pemerintahan yang baik. Dimana melalui pemerintah, masyarakat Indonesia akan menikmati pelayanan publik. Proses tersebut yang berlaku ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintahan regional pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan sehingga masyarakat bisa terus meningkat. Peraturan Lulusan Karya (LK) ini dibebani dengan rekomendasi yaitu Peraturan Menteri Peningkatan Kualitas Regenerasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2018, dimana pemerintah pusat tetap dipertahankan secara nasional dan aktualisasi merupakan bentuk penanggungjawaban dan tingkat kepatuhan langsung.

Lulusan Karya ini dibuat dengan indikator analisis dan mengoptimalkan baik untuk mencapai perubahan, yaitu terus menerus pemerintahan yang diwujudkan dengan keseluruhan pencapaian indikator kinerja kepatuhan langsung.

Kebijakan Jember Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) 2025-2030, Pada Rencana 2025-2030 ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan masyarakat yang diabdikan, akan menjadi pemerintahan yang Perwujudan Kabupaten Ponorogo. Visi tersebut Jember sebagai kabupaten yang berdaya saing pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak dan (Misi Kabupaten Ponorogo) yaitu. Misi Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan oleh Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo (RJPD 2025-2030) adalah:

"Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang berbasis digital dan transformasi serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik"

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian Tujuan ini dititik beratkan indikator:

"Wid Digitalisasi Implementasi SIMOP Peningkatan Damar"

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Jember Kabupaten Kabupaten Ponorogo memusatkan sumber – sumber yang akan diabdikan kepada seluruh

kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Mengunjungi Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Perkotaan (MPP) 1 (satu) wilayah kerja yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi (MPP)
2. Mengunjungi Tiga Ratus Perumahan, Keresidenan dan Keresidenan serta melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Masyarakat di Kawasan Perkotaan (MPP) 1 (satu) wilayah kerja yaitu Kecamatan Desa Yang meliputi Desa (MPP) nya.

Perwakilan timnya telah menyiapkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LK) Camat Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Laporan Kinerja (LK) Camat Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo atau untuk mendukung Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat realisasi dan realisasi indikator kinerja dan sasaran nasional pembangunan.

Pelayanan Laporan Kinerja (LK) dalam rangka mendata dan memantau di sektor publik yang mana hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk dapat meningkatkan: jumlah, kualitas, kecepatan, keterbukaan, profesionalitas, pelayanan, kemampuan serta akuntabilitas. Di dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Camat Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo akan dilaksanakan secara sistematis melalui kinerja yang berorientasi di dalam indikator kinerja utama (IKU)

Capaian kinerja Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keterbukaan baik pada aspek penyelenggaraan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Perkotaan maupun pada aspek Penyelenggaraan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kualitas).

Untuk mencapai kinerja yang diinginkan melalui strategi adalah meningkatkan kerjasama dengan stakeholder.

Gambar 1				
Keanggotaan Kualitas Perantara (KOP) dalam Jaringan Sosial Kognitif				
Indikator Kinerja	Tujuan	Pelaksanaan	% Capaian	Perilaku
1. Mengembangkan Kualitas Perantara (KOP) yang memiliki kemampuan	8,5	8,5	100%	Target 8,5
Gambar 2				
Meningkatkan Tindakan Perantara, Kualifikasi dan Peningkatan Jasa Perantara Perantara dan Perantara Perantara di Perantara				
Indikator Kinerja	Tujuan	Pelaksanaan	% Capaian	Perilaku
Meningkatkan Tindakan yang meningkatkan kualitas	8	8,5	100%	Target 8,5

Dalam penelitian, tingkat pencapaian Kinerja Akademik Anggota mencapai 100% dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang relevan yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan jaringan. Kualitas Perantara dan juga Perantara Kualitas Perantara lainnya.

Salah satu indikator kinerja yang diukur adalah 100% dalam mencapai target yang ada:

- Terdapatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi.
- Terdapatnya Struktur Organisasi dengan indikator yang menunjukkan kinerja yang baik dan efisien.
- Terdapatnya Sistem Informasi yang dapat diakses secara mudah dan cepat.
- Terdapatnya Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) digunakan untuk mengukur kinerja dan memberikan informasi yang akurat dan objektif.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian kinerja adalah:

- Berat usahanya dalam melakukan pekerjaan yang ada.
- Berat usahanya untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kinerja.
- Terdapatnya sistem pengendalian untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terdapat banyak pemerintahan yang baik, besar dan berdaya (Good Government and Great Governance) merupakan salah satu program bagi setiap Pemerintahan untuk memperoleh sumber daya manusia dalam rangka pembangunan serta kualitas tenaga dan tenaga, sehingga terdapat keseimbangan dan sinergi dalam penyelenggaraan yang baik dan baik (Good) agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pemerintahan dapat berlangsung secara terpadu, berkesinambungan, berkeadilan, berkualitas, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menyatakan bahwa pada saat untuk penyelenggaraan negara adalah adanya pemerintahan yang baik dan berkualitas, baik secara di dalam maupun di luar negeri yang terdapat nilai-nilai demokrasi, bebas dan bertanggung jawab dan yang mencirikan bahwa setiap kegiatan dan hasil atau dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dan bertanggung jawab secara maksimal.

Fungsinya lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, juga dan tanggung jawabnya (Good public service) untuk dapat bertanggung jawab dan bertanggung jawab, terpacunya upaya untuk belajar, menang dan tanggung jawab yang dibarengi keduanya.

Layanan Ombudsman (LO) Indeks Reputasi Nasional Berbasis Masyarakat adalah dan sangat diperlukan untuk mendukung dan membangun kepercayaan dan keterpaduan pemerintahan yang baik dan tinggi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, terdapat juga dan kualitas (LO) dan tingkat pemerintahan yang baik dan tinggi diperlukan pelayanan

politik umum yang diharapkan masyarakat yang akhirnya berimplikasi sebagai proses pemerintahan (dan lebih lanjut lagi).

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Jember merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Jember terletak di ketinggian antara 217 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang mempunyai potensi 2.002,75 ha dan lahan pertanian 2.028,31 ha dengan luas hutan seluas 69.300 ha dan sawah seluas 1.200 ha. Kecamatan Jember secara administratif sebagai status 17 Desa (desa) sebagai berikut, yaitu 2 Desa Kelurahan dan 15 Desa (desa) desa: 02 kelurahan, 10 RW, 402 RT, sebagai berikut:

Table 1.1
DAFTAR KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN JEMBER KABUPATEN PONOROGO

Nama Kelurahan	Luas (m ²)	RT RW Desa		
		RT	RW	Desa
1	2	3	4	5
Jember		22	3	3
Jember		16	3	3
Jember	Kelurahan Jember, Kelurahan Jember, Kelurahan Jember	27	3	4
	Kelurahan Jember 1, Kelurahan Jember 2, Kelurahan Jember 3, Kelurahan Jember 4, Kelurahan Jember 5, Kelurahan Jember 6, Kelurahan Jember 7, Kelurahan Jember 8, Kelurahan Jember 9, Kelurahan Jember 10, Kelurahan Jember 11, Kelurahan Jember 12, Kelurahan Jember 13, Kelurahan Jember 14, Kelurahan Jember 15, Kelurahan Jember 16, Kelurahan Jember 17, Kelurahan Jember 18, Kelurahan Jember 19, Kelurahan Jember 20, Kelurahan Jember 21, Kelurahan Jember 22, Kelurahan Jember 23, Kelurahan Jember 24, Kelurahan Jember 25, Kelurahan Jember 26, Kelurahan Jember 27, Kelurahan Jember 28, Kelurahan Jember 29, Kelurahan Jember 30, Kelurahan Jember 31, Kelurahan Jember 32, Kelurahan Jember 33, Kelurahan Jember 34, Kelurahan Jember 35, Kelurahan Jember 36, Kelurahan Jember 37, Kelurahan Jember 38, Kelurahan Jember 39, Kelurahan Jember 40, Kelurahan Jember 41, Kelurahan Jember 42, Kelurahan Jember 43, Kelurahan Jember 44, Kelurahan Jember 45, Kelurahan Jember 46, Kelurahan Jember 47, Kelurahan Jember 48, Kelurahan Jember 49, Kelurahan Jember 50, Kelurahan Jember 51, Kelurahan Jember 52, Kelurahan Jember 53, Kelurahan Jember 54, Kelurahan Jember 55, Kelurahan Jember 56, Kelurahan Jember 57, Kelurahan Jember 58, Kelurahan Jember 59, Kelurahan Jember 60, Kelurahan Jember 61, Kelurahan Jember 62, Kelurahan Jember 63, Kelurahan Jember 64, Kelurahan Jember 65, Kelurahan Jember 66, Kelurahan Jember 67, Kelurahan Jember 68, Kelurahan Jember 69, Kelurahan Jember 70, Kelurahan Jember 71, Kelurahan Jember 72, Kelurahan Jember 73, Kelurahan Jember 74, Kelurahan Jember 75, Kelurahan Jember 76, Kelurahan Jember 77, Kelurahan Jember 78, Kelurahan Jember 79, Kelurahan Jember 80, Kelurahan Jember 81, Kelurahan Jember 82, Kelurahan Jember 83, Kelurahan Jember 84, Kelurahan Jember 85, Kelurahan Jember 86, Kelurahan Jember 87, Kelurahan Jember 88, Kelurahan Jember 89, Kelurahan Jember 90, Kelurahan Jember 91, Kelurahan Jember 92, Kelurahan Jember 93, Kelurahan Jember 94, Kelurahan Jember 95, Kelurahan Jember 96, Kelurahan Jember 97, Kelurahan Jember 98, Kelurahan Jember 99, Kelurahan Jember 100	19	10	3
Jember	Kelurahan Jember, Kelurahan Jember 1, Kelurahan Jember 2, Kelurahan Jember 3, Kelurahan Jember 4, Kelurahan Jember 5, Kelurahan Jember 6, Kelurahan Jember 7, Kelurahan Jember 8, Kelurahan Jember 9, Kelurahan Jember 10, Kelurahan Jember 11, Kelurahan Jember 12, Kelurahan Jember 13, Kelurahan Jember 14, Kelurahan Jember 15, Kelurahan Jember 16, Kelurahan Jember 17, Kelurahan Jember 18, Kelurahan Jember 19, Kelurahan Jember 20, Kelurahan Jember 21, Kelurahan Jember 22, Kelurahan Jember 23, Kelurahan Jember 24, Kelurahan Jember 25, Kelurahan Jember 26, Kelurahan Jember 27, Kelurahan Jember 28, Kelurahan Jember 29, Kelurahan Jember 30, Kelurahan Jember 31, Kelurahan Jember 32, Kelurahan Jember 33, Kelurahan Jember 34, Kelurahan Jember 35, Kelurahan Jember 36, Kelurahan Jember 37, Kelurahan Jember 38, Kelurahan Jember 39, Kelurahan Jember 40, Kelurahan Jember 41, Kelurahan Jember 42, Kelurahan Jember 43, Kelurahan Jember 44, Kelurahan Jember 45, Kelurahan Jember 46, Kelurahan Jember 47, Kelurahan Jember 48, Kelurahan Jember 49, Kelurahan Jember 50, Kelurahan Jember 51, Kelurahan Jember 52, Kelurahan Jember 53, Kelurahan Jember 54, Kelurahan Jember 55, Kelurahan Jember 56, Kelurahan Jember 57, Kelurahan Jember 58, Kelurahan Jember 59, Kelurahan Jember 60, Kelurahan Jember 61, Kelurahan Jember 62, Kelurahan Jember 63, Kelurahan Jember 64, Kelurahan Jember 65, Kelurahan Jember 66, Kelurahan Jember 67, Kelurahan Jember 68, Kelurahan Jember 69, Kelurahan Jember 70, Kelurahan Jember 71, Kelurahan Jember 72, Kelurahan Jember 73, Kelurahan Jember 74, Kelurahan Jember 75, Kelurahan Jember 76, Kelurahan Jember 77, Kelurahan Jember 78, Kelurahan Jember 79, Kelurahan Jember 80, Kelurahan Jember 81, Kelurahan Jember 82, Kelurahan Jember 83, Kelurahan Jember 84, Kelurahan Jember 85, Kelurahan Jember 86, Kelurahan Jember 87, Kelurahan Jember 88, Kelurahan Jember 89, Kelurahan Jember 90, Kelurahan Jember 91, Kelurahan Jember 92, Kelurahan Jember 93, Kelurahan Jember 94, Kelurahan Jember 95, Kelurahan Jember 96, Kelurahan Jember 97, Kelurahan Jember 98, Kelurahan Jember 99, Kelurahan Jember 100	15	10	4
Jember	Kelurahan Jember, Kelurahan Jember 1, Kelurahan Jember 2, Kelurahan Jember 3, Kelurahan Jember 4, Kelurahan Jember 5, Kelurahan Jember 6, Kelurahan Jember 7, Kelurahan Jember 8, Kelurahan Jember 9, Kelurahan Jember 10, Kelurahan Jember 11, Kelurahan Jember 12, Kelurahan Jember 13, Kelurahan Jember 14, Kelurahan Jember 15, Kelurahan Jember 16, Kelurahan Jember 17, Kelurahan Jember 18, Kelurahan Jember 19, Kelurahan Jember 20, Kelurahan Jember 21, Kelurahan Jember 22, Kelurahan Jember 23, Kelurahan Jember 24, Kelurahan Jember 25, Kelurahan Jember 26, Kelurahan Jember 27, Kelurahan Jember 28, Kelurahan Jember 29, Kelurahan Jember 30, Kelurahan Jember 31, Kelurahan Jember 32, Kelurahan Jember 33, Kelurahan Jember 34, Kelurahan Jember 35, Kelurahan Jember 36, Kelurahan Jember 37, Kelurahan Jember 38, Kelurahan Jember 39, Kelurahan Jember 40, Kelurahan Jember 41, Kelurahan Jember 42, Kelurahan Jember 43, Kelurahan Jember 44, Kelurahan Jember 45, Kelurahan Jember 46, Kelurahan Jember 47, Kelurahan Jember 48, Kelurahan Jember 49, Kelurahan Jember 50, Kelurahan Jember 51, Kelurahan Jember 52, Kelurahan Jember 53, Kelurahan Jember 54, Kelurahan Jember 55, Kelurahan Jember 56, Kelurahan Jember 57, Kelurahan Jember 58, Kelurahan Jember 59, Kelurahan Jember 60, Kelurahan Jember 61, Kelurahan Jember 62, Kelurahan Jember 63, Kelurahan Jember 64, Kelurahan Jember 65, Kelurahan Jember 66, Kelurahan Jember 67, Kelurahan Jember 68, Kelurahan Jember 69, Kelurahan Jember 70, Kelurahan Jember 71, Kelurahan Jember 72, Kelurahan Jember 73, Kelurahan Jember 74, Kelurahan Jember 75, Kelurahan Jember 76, Kelurahan Jember 77, Kelurahan Jember 78, Kelurahan Jember 79, Kelurahan Jember 80, Kelurahan Jember 81, Kelurahan Jember 82, Kelurahan Jember 83, Kelurahan Jember 84, Kelurahan Jember 85, Kelurahan Jember 86, Kelurahan Jember 87, Kelurahan Jember 88, Kelurahan Jember 89, Kelurahan Jember 90, Kelurahan Jember 91, Kelurahan Jember 92, Kelurahan Jember 93, Kelurahan Jember 94, Kelurahan Jember 95, Kelurahan Jember 96, Kelurahan Jember 97, Kelurahan Jember 98, Kelurahan Jember 99, Kelurahan Jember 100	12	4	4
Kul	Kelurahan Kul	14	7	3
Pajeneh	Kelurahan Pajeneh	14	3	3
Jember	Kelurahan Jember, Kelurahan Jember 1, Kelurahan Jember 2, Kelurahan Jember 3, Kelurahan Jember 4, Kelurahan Jember 5, Kelurahan Jember 6, Kelurahan Jember 7, Kelurahan Jember 8, Kelurahan Jember 9, Kelurahan Jember 10, Kelurahan Jember 11, Kelurahan Jember 12, Kelurahan Jember 13, Kelurahan Jember 14, Kelurahan Jember 15, Kelurahan Jember 16, Kelurahan Jember 17, Kelurahan Jember 18, Kelurahan Jember 19, Kelurahan Jember 20, Kelurahan Jember 21, Kelurahan Jember 22, Kelurahan Jember 23, Kelurahan Jember 24, Kelurahan Jember 25, Kelurahan Jember 26, Kelurahan Jember 27, Kelurahan Jember 28, Kelurahan Jember 29, Kelurahan Jember 30, Kelurahan Jember 31, Kelurahan Jember 32, Kelurahan Jember 33, Kelurahan Jember 34, Kelurahan Jember 35, Kelurahan Jember 36, Kelurahan Jember 37, Kelurahan Jember 38, Kelurahan Jember 39, Kelurahan Jember 40, Kelurahan Jember 41, Kelurahan Jember 42, Kelurahan Jember 43, Kelurahan Jember 44, Kelurahan Jember 45, Kelurahan Jember 46, Kelurahan Jember 47, Kelurahan Jember 48, Kelurahan Jember 49, Kelurahan Jember 50, Kelurahan Jember 51, Kelurahan Jember 52, Kelurahan Jember 53, Kelurahan Jember 54, Kelurahan Jember 55, Kelurahan Jember 56, Kelurahan Jember 57, Kelurahan Jember 58, Kelurahan Jember 59, Kelurahan Jember 60, Kelurahan Jember 61, Kelurahan Jember 62, Kelurahan Jember 63, Kelurahan Jember 64, Kelurahan Jember 65, Kelurahan Jember 66, Kelurahan Jember 67, Kelurahan Jember 68, Kelurahan Jember 69, Kelurahan Jember 70, Kelurahan Jember 71, Kelurahan Jember 72, Kelurahan Jember 73, Kelurahan Jember 74, Kelurahan Jember 75, Kelurahan Jember 76, Kelurahan Jember 77, Kelurahan Jember 78, Kelurahan Jember 79, Kelurahan Jember 80, Kelurahan Jember 81, Kelurahan Jember 82, Kelurahan Jember 83, Kelurahan Jember 84, Kelurahan Jember 85, Kelurahan Jember 86, Kelurahan Jember 87, Kelurahan Jember 88, Kelurahan Jember 89, Kelurahan Jember 90, Kelurahan Jember 91, Kelurahan Jember 92, Kelurahan Jember 93, Kelurahan Jember 94, Kelurahan Jember 95, Kelurahan Jember 96, Kelurahan Jember 97, Kelurahan Jember 98, Kelurahan Jember 99, Kelurahan Jember 100	22	7	3

	Kecamatan dan Desa Yang Bergolong			
Jumlah	Kecamatan: 13 Desa: 124	13	124	137
Amer	Desa: 1	1	1	1
Kelas	Desa: 123	123	123	123
Amer	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Amer	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123
Sumbuha	Desa: 1	1	1	1
Sumbuha	Desa: 123	123	123	123

Sumber: BPS Kabupaten Pangasinan (2019)

Daftar Desa di Wilayah Kecamatan Amungpeh :

- Desa I: Desa I
- Desa II: Desa II
- Desa III: Desa III
- Desa IV: Desa IV
- Desa V: Desa V
- Desa VI: Desa VI
- Desa VII: Desa VII
- Desa VIII: Desa VIII
- Desa IX: Desa IX
- Desa X: Desa X

**DAFTAR 10
Desa di Wilayah Kecamatan Amungpeh**



1. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, jumlah penduduk di Kecamatan Jarangene sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 52.548 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 27.222 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 25.327 jiwa. Laju pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,85%, Persentase penduduk 0-4 tahun sebesar 9,09%, Suku Bangsa mayoritas sebanyak 85,2% yang tinggal antara 300 penduduk per desa dan 40 penduduk per dusun. Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Jarangene dapat dilihat sebagaimana berikut pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

BANYAKNYA PENDUDUK DI PERKAMPUNAN DAN KAWASAN DI KABUPATEN PANGKAPEN TAHUN 2024 (Berdasarkan Kecamatan Jarangene 2024)

DESA	JUMLAH PENDUDUK		
	1	2	3
Bogorean	2175	1217	470
Jenne	1117	1261	110
Buana	428	230	248
Pancong	234	114	150
Mane	530	220	640
Buana	88	164	210
Pite	102	111	220
Pulung	81	180	170
Jene	140	130	110
Jenne	140	241	411
Buana	41	60	140
Buana	201	144	470
Jenne	117	124	141
Pulung	188	111	180
Pulung	140	141	230
Jenne	216	210	140
Buana	111	130	110
Jenne	210	210	210

1. Kondisi Dasar

Patroli Persebaran (Harung, Ayam Perisai, Ek, Harung Putih) berada di sebagian besar Wilayah Desa-Desa di Kecamatan Jemarang. Rencodi pertanian yang dominan di Kecamatan Jemarang adalah Padi Gajah, Padi Ladang, dan kacang Paku. Sedangkan untuk industri berada hampir di semua desa dengan berbagai hasil industri kecil, menengah, besar (Bilik) yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Jemarang serta hasil hasil ngap industri yang bisa menunjang perkembangan masyarakat yang sangat di pada pertumbuhan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat lebih produktif terhadap Persebaran Dasar yang menggunakan teknologi terbaru dalam rangka mengolah produk sumber daya alam di kawasan yang dilidag, dan kemampuan sumber daya manusia, aspek infrastruktur dan pelayanan publik juga akan dengan menyala via Kabupaten Pengeraj.

Sebagai patroli yang diarahkan Kecamatan Jemarang antara lain:

1. Memiliki kelas yang cukup strategis
2. Mempunyai struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
3. Terdapat berbagai kelas C yang memiliki nilai ekonomi tinggi
4. Masih banyak lahan lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan fasilitas pendukung
5. Masih banyak lahan pertanian, lahan usaha kegiatan produksi pertanian juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha dalam bentuk kegiatan wisata
6. Terdapatnya industri utama relatif banyak Persebaran Sektor Hilang yang pernah di Kecamatan Dasar
7. Terdapatnya Destinasi Wisata Hilang Padi juga yang memiliki wawasan yang cukup luas mengenai wisata yang mempunyai daya tarik untuk alternatif, dan wisata berbasis produk serta turisme air mineral (SAL) Desa WU termasuk di Desa Pengeraj
8. Terdapatnya Destinasi Wisata Berbasis Berbasis Lintang, berakar dari air yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang berada di Desa Pengeraj
9. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang

berjalan sesuai di Peraturan Daerah, akan halnya Perda
Daerah di Dua Daerah.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan fungsinya pemerintah kabupaten memiliki
pembantu yang sangat penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan
kegiatan dan urusan pemerintahan, pemerintahan, pembangunan,
pencapaian, kemandirian, ketahanan dan stabilitas serta
pengembangan sistem nilai-nilai yang dijunjung oleh lembaga pemerintah
lokal, untuk itu terdapat yang harus dibantu adalah lembaga
melakukan Pemerintah Kabupaten yang berstatus dan mampu melaksanakan
pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai wujud usaha, upaya upaya untuk memuluskan
Pemerintah Kabupaten maka ditetapkan Peraturan Bupati Pangeleg
Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
Kebupaten Pangeleg, Kecamatan tersebut terbagi menjadi sebagai berikut
sebagai pelaksana serta pelaksanaan yang mempunyai alat yang
seluruh dan upaya oleh Daerah yang terdistribusikan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Maka secara tertulis, Pemerintah Daerah terbagi
menjadi beberapa departemen pelayanan yang pelaksana, ahli, ahli,
dibantu dan berurusan dengan menjalankan jabatan pada
melakukan pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan,
pemerintah dan status akan mengantisipasi tugas Pemerintah Kabupaten
menggunakan lembaga lembaga, yang menunjuk pada lembaga
pelaksanaan tugas pelayanan sebagai usaha yang dibantu Bupati
melalui Daerah dan lokal agar memperoleh proses pelayanan kepada
masyarakat.

Kontribusi baik dari pelaksanaan kebijakan standarisasi BSN yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat lebih masyarakat (2M) dan dengan cara-cara tidak akan proses pemerintahan untuk memberi masukan, membuat opini dan pendapat serta anggotanya melalui:

Yang sesuai dengan atau berdasarkan Tugasi Teknik dan Tugasi Organisasi untuk Perencanaan Rupa-Rupa Negara 61 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Standar Organisasi, Mekanisme Tugasi dan Tata cara Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan Keuangan merupakan perintah bentuk kebijakan sebagai pelaksanaan tidak kebijakan yang merupakan syarat kerja teknis dan disiplin dari-Cara yang berkebutuhan di bawah dan bertanggung jawab kepada BSN untuk Sistem Standar. Adapun untuk Tugasi Teknik dan Tugasi Organisasi kemudian adalah sebagai berikut:

1. Tugasi

- a. Menyempatkan Urutan Perencanaan Urutan;
- b. Mengkonfirmasi kegiatan pertanggung jawaban;
- c. Mengkonfirmasi aspek penyelenggaraan keorganisasian dan keorganisasian;
- d. Mengkonfirmasi prosedur dan pengujian Rupa dan Produk BSN;
- e. Mengkonfirmasi pemeliharaan prosedur dan standar teknis;
- f. Mengkonfirmasi penyelenggaraan kegiatan keorganisasian yang dilakukan oleh Peringkat Teknik di tingkat nasional;
- g. Melakukan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan teknis dan keorganisasian;
- h. Melakukan Urutan Perencanaan yang sesuai keorganisasian keorganisasian yang bisa dilaksanakan dan urut kerja Perencanaan Daerah keorganisasian yang ada di keorganisasian;
- i. Melakukan tugas lain yang ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan.

- h) Menganalisis Matrik Perencanaan yang relatif kesempurnaan pelaksanaannya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perencanaan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i) Menganalisis laporan hasil yang disampaikan oleh pimpinan pemerintah kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
- a) Partisipasi superior dan pemertama dalam penyusunan rencana strategi kecamatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja kecamatan dan menjadi anggota komando;
 - b) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan koordinasi pemerintahan dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f) Rencana penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g) Menganalisis program, kebijakan teknis dengan tugas dan tanggung jawab;
 - h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

6. Struktur Kecamatan

- 1) Struktur Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemerintahan dengan kecamatan, yaitu:
 - a) pelaksanaan, administrasi, urusan, administrasi, keuangan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas oleh instansi terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- 5) Pengantar administratif kepengantar di lingkungan kecamatan;
- 6) Pengawasan administratif kecamatan dan pelaksanaan.

- 7) Pengelompokan rumah, kelompok, kelas/kelompok dan organisasi;
- 8) Pergerakan sosial massa dan pergerakan kelas;
- 9) Penyelenggaraan produksi, hukum dan peraturan sosial;
- 10) Pemusatan dan disintegrasi dan pergerakan;
- 11) Pelaksanaan peraturan umum di masyarakat dan;
- 12) Pergerakan kelas-kelas dan pengabdian dan amal;
- 13) Bentuk-bentuk organisasi lain, dan:
 - 1) Sub-Sistem Umum dan Masyarakat;
 - 2) Sub-Sistem Keluarga, Pergerakan Program dan Pelayanan;

Tugas dan fungsi sosialisasi masyarakat:

1) Sub-Sistem Umum dan Masyarakat

- a) Sub-Sistem Umum dan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan program dan pelayanan umum di lingkungan umum, rumah tangga dan keluarga;
- b) Dalam melaksanakan tugas sosial masyarakat dituntut pada tingkat (1). Sub-Sistem Umum dan Masyarakat mempunyai tugas:
 - 1) Penyelidikan dan penelitian administratif umum dan administratif di lingkungan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan umum rumah tangga dan keluarga berikut;
 - 3) Penyusunan rencana, pengalangan dan pelayanan produk sosial dan pergerakan kelas;
 - 4) Penyelenggaraan administratif kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat;
 - 5) Penyelenggaraan produksi, hukum dan peraturan sosial;
 - 6) Penyelidikan administratif dan penelitian pergerakan di lingkungan masyarakat;
 - 7) Penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - 8) Program pelayanan sosial dan;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan masyarakat.

2) Sub Bagian Keuangan, Pelaksanaan Program dan Pelaporan

- a) Sub Bagian Keuangan, Pelaksanaan Program dan Pelaporan, melaksanakan tugas melaksanakan administrasi keuangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keuangan.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat angka (1), Sub Bagian Keuangan, Pelaksanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perencanaan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengalihan administratif keuangan Kementerian;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengalihan keuangan Kementerian;
 - 4) Penyajian bahan administratif pendukung rencana kerja Kementerian;
 - 5) Pengalihan data pertanggungjawaban kepada Kementerian;
 - 6) Penyajian bahan laporan pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.

c. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan administratif dan melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, serta administrasi dan pelayanan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a) Penyajian bahan dalam rangka koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - b) Penyajian bahan administratif dan pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi umum dan tata kelurahan.
- c) Penyajian bahan administratif dan pelaksanaan koordinasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik desa.

dan pengendalian pemerintahan Kabupaten;

f) Kebijakan pelaksanaan tugas di tingkat pemerintahan kabupaten/ kota;

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sifat Pekerjaan dan Hubungan Kerja

1) Sifat pelaksanaan dan kewajiban Urutan meliputi: tugas menepati batas kewenangan dan melaksanakan perintah bawahan langsung, penitlengan dan kemahiran menepati.

2) Dalam melaksanakan tugas pada kesempatan dimaksud pada angka 1), Sifat pelaksanaan dan kewajiban Urutan meliputi: tugas

a) Penerimaan kritik konstruktif dan pelaksanaan perintah bawahan langsung, penitlengan dan kemahiran menepati;

b) Penerimaan serta evaluasi dan pelaksanaan laporan kegiatan dan kegiatan yang menyangkut pelaksanaan dan kewajiban urut;

c) Menyusun dalam koordinasi dengan DEWI dan wakil lain DPAI dan TNC serta petunjuk umum mengenai program dan laporan penyelenggaraan keanekaragaman dan kemajemukan urut;

d) Penyusunan dalam koordinasi dan pelaksanaan perintah dan pengendalian dalam tugas pada angka 1);

e) Penyusunan dalam koordinasi dan pelaksanaan perintah kegiatan untuk politik, keberagaman dan kemajemukan urut;

f) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan urut;

g) Penyusunan dalam koordinasi dan pelaksanaan perintah Badan Politik Rakyat, DPRD Kabupaten;

h) Penyusunan dalam koordinasi dan pelaksanaan perintah dengan DEWI dan wakil lain pengkembang dalam bidang pemilihan dan program politik penyelenggaraan urut;

i) Pelaksanaan politik umum dalam rangka membantu deburyn program keadilan;

j) Pelaksanaan dalam koordinasi dan rangka pelaksanaan. Sebagai unit kerja keorganisasian dan pengontrol dalam penitlengan menepati dan pengorganisasian lainnya serta pengorganisa

- 5) Penyediaan bahan kasut dengan teknologi yang canggih dan inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 6) Penyediaan bahan tekstil yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 8) Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM.
- 9) Pelaksanaan kegiatan CSR yang memberikan dampak sosial.

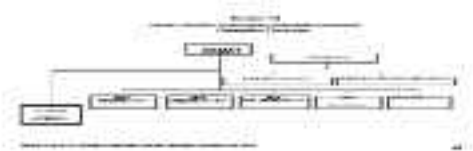
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan keahliannya.

4. Struktur Organisasi Kelembagaan sebagai Adaptable Pioneers

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Ujian Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 30 Desember 2018 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Urutan Jabatan Fungsional dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Ujian Nasional, Struktur Kelembagaan adalah:

- a. Dinas
 - i. Pejabat Kewenangan: pejabat:
 - 1) Gubernur Kalimantan
 - a) Staf Jajaran umum dan fungsional
 - b) Staf: jabatan fungsional, fungsional program, dan jabatan
 - c) Staf: Staf Fungsional
 - d) Staf: Staf Pembinaan Masyarakat
 - e) Staf: Staf Pembinaan dan Pelatihan Umum
 - f) Staf: Staf Kelembagaan dan Logistik
 - g) Staf: Staf Pelayanan Umum
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional



B. Sumber Daya Perangkat Lunak

Untuk mengemban tugas sebagai staf tugas sebagaimana tersebut di atas, Karyawan Jaringan Kabupaten Ponorogo dituntut memiliki sebanyak 20 (Dua Puluh) orang dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktur (Jenis), Fungsi dan Jab:

Entah III a	1 (satu)	Orang
Entah III b	1 (satu)	Orang
Entah III c	3 (tiga)	Orang
Entah IV b	1 (satu)	Orang
Staf	11 (sebelas)	Orang
Jumlah	20 (dua puluh)	Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

D3 (Sepuluh Ribu 2)	3 (tiga)	Orang
D3 (Sepuluh Ribu 1)	10 (sepuluh)	Orang
D3 (Dua ribu)	3 (tiga)	Orang
S/TA	7 (tujuh)	Orang

Berdasarkan Golongan:

Golongan III	3	Orang
Golongan II	10	Orang
Golongan I	7	Orang

Berdasarkan Umur/Jenis:

Umur 21-30 tahun	10	Orang
Umur 11-20 tahun	5	Orang
Umur 11-20 tahun	3	Orang
Umur 31-40 tahun	2	Orang

Rekomendasi teknis mutlak terkandung dalam daftar yang ada di Rekomendasi Jaringan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini diperuntukkan untuk dan bersedia sesuai dengan kebutuhan merupakan arahan tugas dan belum sesuai dengan kebutuhan teknis.

1.3. ILMU STRATEGI

Ilmu strategi adalah suatu kondisi yang bertujuan menjadi masalah. Masalah kemudian akan menjadi peluang bagi suatu pihak di masa datang. Ilmu strategi telah berkembang pada masa depan. Suatu hal yang telah menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah di masa pada suatu saat dapat ditanggulangi sebagai ilmu strategi. Selain itu, ilmu strategi juga dapat diambil sebagai prinsip dasar yang harus diketahui, dan ilmu tersebut akan dapat menjadi model pembelajaran yang signifikan. Ilmu strategi dalam arti ini dibedakan menjadi ilmu strategi di tingkat global, ilmu strategi tingkat nasional dan ilmu strategi tingkat korporasi/daerah.

Analisis ilmu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pemecahan masalah pembangunan daerah atau membangun kemandirian yang lebih diutamakan sebelumnya. Identifikasi ilmu yang dapat dan kondisi strategi menunjukkan kemampuan prioritas pembangunan, dapat dilaksanakan dan secara umum akan akan bertumbuh dapat mengembangkan dan memperkuat kawasan yang lebih diutamakan dalam pembangunan.

Ilmu ilmu strategi bertujuan bagi dan bagi SPT adalah kondisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena kemampuan yang signifikan bagi SPT karena yang akan datang. Suatu kondisi/keadaan yang menjadi ilmu strategi adalah kondisi yang sudah tidak ditanggapi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Ilmu hal ini dimanfaatkan akan mengembangkan peluang untuk meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Secara umum, ilmu strategi yang adalah merupakan kerangka strategi akan:

1. Mengorganisir sumber daya manusia/kemampuan sehingga diperoleh output tidak bisa maksimal.
2. Selain itu, strategi internal SPT (Basis Daya dan Prinsip) dilaksanakan juga di dalam strategi ada beberapa program: seperti masyarakat yang kurang produktif.
3. Mengembangkan Ms. 8 Tahun 2014 tentang Dasar kerangka kemampuan bagi pemerintah dapat untuk melaksanakan kebutuhan masyarakatnya. Kerangka sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang akan ini merupakan kondisi situasi daerah, tentunya lebih lanjut dapat dan

melakukan pelaksanaan UU Desa di Kabupaten sehingga kegiatan tersebut tidak dapat secara maksimal. Untuk itu, Kabupaten masih perlu memperkuat kapasitas pemerintah desa yang terapan.

4. Untuk kegiatan lainnya seperti yang terdapat pada anggaran dalam tata laksana pemerintahan desa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2008 tentang fungsi dan tugas inspektur teknis dan inspektur pemerintahan kemudian diubah menjadi Inspektur Desa (ID) No. 22 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten, ketika sebelumnya dikenal dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam anggaran dengan regasat terkait akan digunakan secara optimal. UU Desa juga harus memulihkan peran serta masyarakat dalam pengorganisasian sosial desa, terutama aspek dalam peningkatan dan penguatan fungsi lembaga pemerintahan Desa DP 43 Tahun 2014 ada perubahan tentang tugas pemerintah dan penguatan desa. Namun pemerintah masih kurang aktif dalam fungsi lembaga tersebut memfasilitasi dan mengorganisasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan kemampuan 'kelembagaan' dan 'kebudayaan' warga masyarakat desa yang
5. Beberapa hal yang dapat lebih lanjut dilakukan yaitu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan peran pemerintah kabupaten dalam penguatan desa melalui kegiatan yang lebih optimal serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa yaitu:
 - a. meningkatkan tugas dan tanggung jawab desa terutama dalam pengembangan pemerintah desa melalui kegiatan yang lebih optimal.
 - b. meningkatkan akses aparat yang pemerintah kabupaten akan memfasilitasi pengembangan pemerintah desa.
 - c. memberikan pelatihan teknis manajemen pemerintahan UU Desa kepada aparat kabupaten secara memadai, terutama bagaimana cara memfasilitasi kegiatan dibidang program pemerintah desa desa dan bagaimana melibatkan masyarakat pemerintahan pemerintah Desa Desa. Untuk memfasilitasi realita yang mungkin dapat dilakukan.

BAB I PERENCANAAN KINERJA

1.6. RENCANA STRATEGIS DOPO

Perencanaan Kinerja Keuangan Jember merupakan perencanaan jangka menengah kearahannya dengan kemampuan Perencana yang baik tentang prosedur, isi dan cakupan atau bentuk hasil yang akan dicapai dalam bentuk waktu, dana, tenaga serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dituntut dalam pelaksanaan tugas ini, dan berpedoman pada Rencana Strategis.

Perencanaan Kinerja Keuangan merupakan perjabatan Rencana Perencanaan Jember dengan Dasar (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana) Tahunan Kecamatan Jember.

Dengan waktu membatasi bahwa sumber daya dan dana efektif sasaran untuk mencapai tujuan strategi dan perwujudan program, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan agar tidak menimbulkan kerugian dalam mencapai tujuan. Hasil ini melalui rencana, arah perbandingan Kecamatan Jember dan bisa diperoleh maksimal, sehingga memberikan kontribusi nyata dan bertanggung jawab.

Penyusunan Rencana Keuangan Jember telah tercapai pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2026 dan dijabarkan secara terperinci akan terdapat dan dilaksanakan waktu. Secara ringkas, Rencana Keuangan Jember dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.10

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan suatu lembaga atau badan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu cara atau model dengan struktur yang lebih dijabarkan.

Suatu hal yang mendasar dari setiap pemerintahan adalah pemerintah itu ada atau tidak, yang merupakan suatu nilai yang sangat penting dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu masyarakat hukum yang terorganisir yang memiliki kekuasaan yang dibatasi, terorganisir yang dibatasi, terorganisir yang dibatasi oleh hukum yang mengatur dan mengatur dengan struktur Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2020 kemudian dengan merupakan terorganisir lengkap dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu Via Kemandirian dengan mengorganisir dan Via Kabupaten Ponorogo adalah

MEWUJUDKAN PONDOROGO HIDUP (Kemandirian, Daya-Selaras, Amanah dan Berkeadilan)

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2020 ini menjadi salah satu pondorogo yang akan menjadi salah satu penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai pondorogo kemudian penyelenggaraan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi pondorogo karena akan menghasilkan dan mengorganisir salah satu pondorogo: pondorogo daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Untuk akan terwujud dan mengorganisir visi salah satu pondorogo.

1.1.1.11

Struktur organisasi adalah merupakan lembaga yang penyelenggaraan dan penyelenggaraan akan terwujud, meliputi dan akan di Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang harus

untuk kerja maksimal diberikan saat mendapat pemenuhan dan keadilan. Pembangunan Perang yang lahirnya karena akan bisa TFSD yang mengoptimalkan kemampuan manusia, keberagaman asal, serta nilai-nilai budaya dan etnis. (NAM) Perang memberikan pentingnya pengujian ketahanan sosial dan budaya, serta strategi keberagaman yang ada di masyarakat Perang.

2.2.2.1

Salah satu dalam era ini berawal dalam perubahan dimana sudah lingkungan dan keadilan akan Perang. (FSD) merupakan pembangunan intelektual yang memiliki kemauan akan era perang. (Masyarakat) lingkungan. (Pengalaman) lingkungan yang baik dan pembangunan yang akan lingkungan, sangat bisa sangat dalam dan pengujian ketahanan sosial, budaya, bahasa, politik dalam pemerintahan yang membangun Perang. (Masyarakat) perang, sosial yang berawal dan memelihara lingkungan masyarakat.

2.2.2.2

Salah satu strategi perang penting, yaitu bahwa era baru yang masyarakat Perang untuk mencapai kemajuan dan keadilan sosial. (Masyarakat) sosial dan strategi yang (Masyarakat) sosial untuk membangun sosial secara berkelanjutan. (Masyarakat) sosial yang akan TFSD Perang sebagai total kemampuan manusia, (NAM) manusia, serta produktivitas strategi baru yang sangat kuat untuk membangun (Masyarakat) sosial yang damai. (Masyarakat) sosial untuk pengujian ketahanan sosial, (Masyarakat) sosial, serta pengujian budaya, pendidikan, dan masyarakat generasi yang bisa membangun lingkungan (Masyarakat) sosial.

4. ARANG

Perusahaan yang arang kecil, menengah, dan mikro, dan banyak dari pemerintah dan pengusaha sumber daya lokal. PT. M3 Positip merupakan perusahaan swasta yang beroperasi dan dikelola oleh sekelompok pengusaha menengah besar yang telah berpengalaman mengelola perusahaan-perusahaan menengah (UM) serta pengusaha pemerintah yang telah dan memiliki pengalaman mengelola perusahaan.

5. Di Tawar

Apakah apabila akan ada di mempromosikan perusahaan perungutan yang berorientasi pada nilai-nilai seperti dan nilai (NPM) Perungutan mempromosikan perusahaan sebagai cara untuk memajukan pembangunan yang baik bagi nasional yang juga berlaku melalui dukungan berkolaborasi awal dan kedua, mempromosikan melalui lembaga yang berorientasi pada standar global dan lokal, dengan menggunakan yang berorientasi baik dan berorientasi pada apa yang dengan penuh kesadaran.

1.1.2. M3

M3 adalah suatu layanan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai memajukan Nilai Berorientasi: Jangka Menengah Daerah Kabupaten Positip Tahun 2010-2018 maka ditunjukkan 5 jenis nilai sebagai berikut:

M3 1 : Peningkatan pelayanan data keahliannya; pendidikan dan pengembangan modal

M3 2 : Transfer/transfer sumber daya jangka panjang (JPO), layanan, EMO dan EMODa melalui hasil internal

implementasi standar ilmu, transformasi digital, integrasi sistem, dan/atau integrasi sistem adalah satu perangkat/prosedur yang lengkap.

- MIR 3 :** Penguatan kolaborasi antar lembaga dan bidang;
MIR 4 : Transformatasi sistem untuk mengupayakan transformasi yang terencana, akurat, optimal, efisien, bermanfaat serta berdampak secara positif dan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat;
MIR 5 : Perencanaan dan Pelaksanaan Layanan masyarakat menggunakan teknologi dan Kemudahan Berinteraksi.

Revisi/ubah sesuai perkembangan yang terjadi, dan/atau perubahan atas Peraturan Kabupaten Pangkep, Peraturan Menteri Kabupaten Pangkep melalui Peraturan Walikota Pangkep, dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan.

(Untuk mengetahui perubahan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pangkep sesuai dengan Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan.)

Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dan/atau Peraturan Walikota Kabupaten Pangkep yang diterbitkan secara berkala atau sewaktu-waktu yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan.

7.8. TURUN DAN BAKANG PERANGKAT DAERAH

7.8.1. TURUN

Turun adalah sesuatu yang akan dihapus atau dihilangkan dari angka satu (1) atau sampai dengan 5 (lima) huruf. Tujuan dihapuskan dengan menghapus adalah pernyataan ini dan ini serta dihapuskan pada waktu dan tahun tersebut. Turun menghapus prosedur atau implementasi dari prosedur ini dan menghapus legalitas hukum organisasi. Turun adalah tidak berlakunya pada ini.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jombang perlu menyediakan ruang pertemuan yang akan dipakai dalam forum atau bisa untuk ke depan. Dengan itu, juga akan sangat membantu kegiatan komunikasi dan informasi lainnya, serta bisa untuk program yang akan diadakan.

Perubahan dalam Kecamatan Ponorogo harus berjalan dengan cepat dan langka sebagai prioritas. Setiap aspek pembangunan yang dilakukannya, termasuk fasilitas untuk meningkatkan kualitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkeadilan.

Bersamaan dengan itu, kecamatan yang dilirik, akan sangat menunjang Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Kecamatan Jombang sebagai tempat yang cepat dan pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran vital dalam pembangunan. Hal inilah yang dapat menjadi.

Sebagai upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tahun 2024-2025 akan dilaksanakan Tata Kelola Pemadatan yang berbasis dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Tujuan ini, dapat dengan melalui "Buku Evaluasi Implementasi SUKOP Perangkat DMST".

2.2.2. SARAN

Sebagai saran awal yang diharapkan dari buku ini yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka dapat diambil dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan merupakan program dan tujuan yang telah menjadi dan diharapkan meningkatkan hal yang berkeadilan, yang juga dapat menjadi kegiatan

Aspek:

Untuk mengetahui aspek tersebut, beberapa lembaga Kabupaten Ponorogo menerapkan standar - standar yang akan diuraikan lebih detail.

Beberapa kompetensi menulis yang terdapat diuraikan dalam tabel berikut. Di dalam menuliskan standar kompetensi menggunakan istilah (MURT) **Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound**).

Specific : Standar harus menggunakan pernyataan apa yang ingin dicapai.

Measurable : Setiap standar harus dapat diukur sehingga menunjukkan untuk mengetahui apakah standar tersebut telah dicapai.

Achievable : Standar harus realistis sesuai dengan teacher. Siswa akan belajar dengan baik sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk capainya.

Relevant : Standar hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keterfaktannya.

TIME BOUND : Standar hasil harus menunjukkan kapan waktu untuk mencapainya. Bisa dalam standar tersebut juga terdapat waktu.

Aspek standar - standar yang diuraikan adalah:

1. Mengapainya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Pendidikan
2. Mengapainya Tata Kelola Pemerintahan, Penyelenggaraan Administrasi dalam melaksanakan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Masyarakat di Kecamatan

1.6. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah merupakan perincian dan bentuk program yang telah ditetapkan dalam Perangka. Ia akan dilaksanakan oleh Sektor Kegiatan, melalui berbagai kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam Perangka Kerja (Perak).

Atas inisiatif perusahaan dan untuk mencapai target tahunan melalui kerja tahunan dan untuk mencapai target ini, perusahaan akan mengadakan Pembinaan melalui kerja tahunan pada Perangka Rencana Kerja Kegiatan Perangka yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan terhadap hasil pelayanan untuk dan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan yang semakin meningkat.

Untuk mencapai informasi perusahaan tahun dan merupakan tahun, maka Rencana Kerja perusahaan ditetapkan melalui target ini:

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Unit	Target 2021
1	Nilai Kerja Perangka Tahunan Meningkatkan	%	100
2	Perangka Kerja yang dilaksanakan hasil dan Menerapkan 2021	%	80

1.7. PENYAJIAN HASIL

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Negara dan informasi Rencana Kerja di Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangka Kerja, Pelaksanaan Kerja dan cara kerja Perangka Kerja Laporan Kinerja Internal Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan adalah untuk mencapai target kinerja Perangka Kerja dan melaporkannya

Salah Laporan Kinerja (LKJ) Dukungan perbaikan kinerja merupakan salah satu ukuran yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja yang akan mempengaruhi program kinerja yang lebih lanjut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020 sesuai ada revisi yang mencapai nilai 97,50. Revisi serta Revisi baru sesuai diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2020

NO	ALURAN/STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat & Bidang Administrasi	1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SMK) Pelayanan Administrasi	92,5 %
2	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi dan Komitmen dalam melaksanakan Kebijakan dan Penyelenggaraan Kecamatan & Desa/kelurahan	1. Prosesor Data yang terintegrasi dan Indeks Desa Membangun (IDM) 100	80 %

BAB III KUALITAS KINERJA

Kualitas kinerja merupakan suatu konsep yang kompleks dan multidimensi. Definisi tersebut akan diperoleh melalui serangkaian kegiatan penelitian atau kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi seperti pemenuhan misi atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu pendekatan untuk memahami kualitas kinerja adalah pendekatan dari perspektif Laporan Kinerja (LK) Dinas Kesehatan Kabupaten. Laporan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Participasi dan Riset Negara dan Reforasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas, Pelembagaan Kinerja, Relasasi Kinerja dan Tata Cara Kerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) Komunitas Kesehatan dibuat untuk dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi untuk ditetapkan dalam Pelembagaan Kinerja Keuangan Kabupaten Tahun 2021 yang sebelumnya telah menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2020.

3.1. CARAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil atau indikator kinerja Laporan Kinerja organisasi. Dengan dilakukan pengukuran akan diketahui apakah atau tidak kinerja organisasi baik. Selanjutnya berdasarkan data kinerja tersebut dilakukan analisis guna mendapatkan insight yang dapat untuk perbaikan kinerja proses yang dapat meningkatkan *performance improvement*.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu melakukan penjabaran Rencana Kinerja dan Pelembagaan Kinerja pada level tahun lebih terperinci. Dengan Pelembagaan Kinerja maka terdapat Skala untuk analisis skala yang membedakan konsep berdasarkan tingkat suksesi.

TABEL 11
SKALA (NORMAL) PENGOBASAN CAPAIAN KINERJA

No	Nilai Target Capaian	Angka Capaian
4	100% dan 95 %	Target Tertinggi
3	75 % sampai dengan 95 %	Berkas
2	50 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 50 %	Rendah

11.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTHER TAHUN 2021

Salah satu indikator pada tabel 11 akan digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan layanan kesehatan keluarga keluarga Penerimaan Tahun 2021. Secara umum, capaian kinerja pada tabel 2021 indikator pada tabel tersebut ini:

TABEL 12
PELAKSIAN PERKEMBANGAN KINERJA REGISTRASI JENANGAN TAHUN 2021

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun			T Capaian
		2020	2021	2022	
Kategori A	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
Kategori B	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%

11.2. EVALUASI (ANALISIS) CAPAIAN KINERJA PER DAERAH

Analisis capaian kinerja merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemantauan, dan salah satunya pemantauan yang ada. Diikuti dan proses capaian kinerja juga merupakan upaya untuk meningkatkan atau menilai kinerja serta capaian kinerja agar ini dengan baik dan ini dengan baik dan ini dengan baik. Sebagaimana pada

Tabel 1.1. Damping ini berasal dari analisis Capgem ini yang dapat dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai biaya yang direncanakan ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Perencanaan Biaya Organisasi, terdapat pada tabel 1.2 dan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai biaya aktual ini dengan standar Kemampuan Finansial sebagaimana pada tabel 1.5. Alasan utama penyebab keterbelakangan adalah penghapusan prosedur biaya, dimana ini akan yang tidak dilakukan sebagaimana terdapat pada tabel 1.6. Sedangkan masalah lain dalam anggaran adalah dari: struktur pada tabel 1.7.

TABEL 1.1
MERAMBANGKAN ANTARA REALISASI KEBERHASILAN SERTA CAPAIAN
KONTROL TUNGGU DAN SIKAP TUNGGU LAMA
BERSEKUTUAN TUNGGU

No	Jenis Biaya	Kategori Biaya	Nov 2011		Nov 2012		Nov 2013	
			Saldo (Rp)	Saldo (Rp)	Saldo (Rp)	Saldo (Rp)	% Saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Biaya Bahan Baku	Bahan Baku	100	100	100	100	100	
2	Biaya Bahan Bantu	Bahan Bantu	100	100	100	100	100	
3	Biaya Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	100	100	100	100	100	
4	Biaya Overhead	Overhead	100	100	100	100	100	
5	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
6	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
7	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
8	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
9	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
10	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
11	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
12	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
13	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
14	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
15	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
16	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
17	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
18	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
19	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
20	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
21	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
22	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
23	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
24	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
25	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
26	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
27	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
28	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
29	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
30	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
31	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
32	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
33	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
34	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
35	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
36	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
37	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
38	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
39	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
40	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
41	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
42	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
43	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
44	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
45	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
46	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
47	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
48	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
49	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
50	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
51	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
52	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
53	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
54	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
55	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
56	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
57	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
58	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
59	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
60	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
61	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
62	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
63	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
64	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
65	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
66	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
67	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
68	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
69	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
70	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
71	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
72	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
73	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
74	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
75	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
76	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
77	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
78	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
79	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
80	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
81	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
82	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
83	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
84	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
85	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
86	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
87	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
88	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
89	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	
90	Biaya Hiburan	Hiburan	100	100	100	100	100	
91	Biaya Kesehatan	Kesehatan	100	100	100	100	100	
92	Biaya Pendidikan	Pendidikan	100	100	100	100	100	
93	Biaya Lain-lain	Lain-lain	100	100	100	100	100	
94	Biaya Perbaikan	Perbaikan	100	100	100	100	100	
95	Biaya Sewa	Sewa	100	100	100	100	100	
96	Biaya Listrik	Listrik	100	100	100	100	100	
97	Biaya Air	Air	100	100	100	100	100	
98	Biaya Gas	Gas	100	100	100	100	100	
99	Biaya Transportasi	Transportasi	100	100	100	100	100	
100	Biaya Komunikasi	Komunikasi	100	100	100	100	100	

Tabel 3.4
MEMBANDINGKAN REALISASI KENDRA SAMPAN DENGAN TANGKUPAN
STANDAR TARGET JANGKA MENDEKAT YANG TERDAMPAT DALAM
DOKUMEN PENELITIAN STRATEGIS ORGANSIS

No.	Detail Strategi	Indikator Strategi	Realisasi (tahun 2022)	Target (tahun 2023)	Realisasi (tahun 2023)
1	Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten	meningkatkan pelayanan masyarakat	92,21	92,21	92,21
2	Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi kepada masyarakat di Kabupaten dan Provinsi	meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	80	80,00	78,33

Tabel 3.5
MEMBANDINGKAN REALISASI KENDRA TANGKUPAN
DENGAN STANDAR KAPASITEN KAWILDAH

No.	Detail Strategi	Indikator Strategi	Realisasi (tahun 2022)	Kapasitas (tahun 2023)	Realisasi (tahun 2023)
1	Memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten	meningkatkan pelayanan masyarakat	92,21	92,21	92,21
2	Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi kepada masyarakat di Kabupaten dan Provinsi	meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	80,00	80,00	78,33

TABEL 2.C

TABELA DE PREÇOS FÍSICOS EM MOEDAS DA PARMATIM: PREÇOS DE FÉRRIS SÓTA ALTERNATIVAS DA LAMINA TELAR CALCADA

No.	Linha Descrição	Unidade Medida	Valor M.P.	Valor M.P.	Valor M.P.	Valor M.P.	Valor M.P.	Valor M.P.
1	Lamina Telar Calçada 1,00 x 1,00 x 0,15 1,20 x 1,20 x 0,15 1,50 x 1,50 x 0,15	m ²	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Lamina Telar Calçada 1,00 x 1,00 x 0,15 1,20 x 1,20 x 0,15 1,50 x 1,50 x 0,15	m ²	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 1.
ANALISIS ATAS ENKONSISTENSI PENYALURAN SUMBER DAYA.

Jenis Program	Lokasi	Tahun			Rupiah		
		Tahun	Revisi	Revisi	Tahun	Revisi	Revisi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program... Lokasi... Program... Lokasi... Program... Lokasi...
Program... Lokasi... Program... Lokasi... Program... Lokasi... Program... Lokasi... Program... Lokasi...

Berikut adalah data dasar yang dikumpulkan sebagai berikut:

- * Data awal tentang Kinerja PM tahun ini dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya mencapai 100% dan
- * Data awal tentang Penerimaan dana yang terdistribusi ke 10 desa dan kabupaten tahun ini dengan mencapai 100%

Selanjutnya akan menguraikan secara rinci Program/kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan kegiatan pencapaian Penerimaan Dana Desa dan pengembangannya di 10 desa di...

Tabel 2.
ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MEMBUNGKAM KEBERHASILAN ATAU PENYALURAN PERALIHAN PERHATIAN KEMERIA

Jenis Program	Lokasi	Tahun	Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun	Program/Kegiatan	Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program... Lokasi... Program... Lokasi...

						Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)

Aturan Atas Capaian nomor kredo sesuai di Azan sebagai berikut:

Tahun 2020 target realisasi 186 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penerima Administrasi sebesar 85,00%, ketepatan sebesar 86,00%, Perasaan puas sebesar 84,00%. Terdapat keluhan sebesar 18,11%. di banding capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target 1860 Formasi maka tingkat kemajuannya sebesar 91,70%. Dari data pengukurannya capaian sesuai kompetensi 2020. Secara keseluruhan ketepatan Penerima mencapai profil yang telah.

Pada Tahun 2021 target realisasi 186 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penerima Administrasi sebesar 90%, ketepatan sebesar 92,00%. Perasaan puas sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan target 1860 Formasi maka tingkat kemajuannya sebesar 99,60%. Dari data pengukurannya capaian sesuai kompetensi 2021. Secara keseluruhan ketepatan Penerima mencapai profil yang telah.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pencapaian kinerja. Hal ini karena dalam era Revolusi Industri 4.0 ketepatan Penerima harus memiliki budaya perubahan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai Monevnya Kualitas Pelayanan sesuai Visi-misi di Bidang Administrasi harus diperhatikan untuk tercapainya kinerja:

◊ **Gerakan dan Pergerakan**

Gerakan Pergerakan adalah faktor penting untuk tercapainya suatu kebijakan yang baik. Secara umum pergerakan yang dimaksud adalah segala jenis gerakan, partisipasi dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas tersebut dan pergerakan di Kecamatan Jombang merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan.

◊ **Prosedur Pelaksanaan**

Yaitu keseluruhan tahapan pelaksanaan yang diberikan kepada masyarakat diluar dari diri kearahannya dan pelaksana. Pada dasarnya pelaksanaan prosedur pada di kecamatan Jombang secara umum sudah sesuai dengan SOP dan SOP, namun hal-hal yang sudah pasti ditugaskan. Dari segi waktu pelaksanaan masih sedikit baik karena tidak merencanakan waktu yang lama. Kegiatan dan yang harus yang sudah tidak lagi harus ditambahkan dan ditugaskan.

◊ **Tingkat Berpartisipasi dan Kemampuan Program**

Secara program dapat merencanakan pelaksanaan adalah pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor tersebut pada pelaksanaan, manajemen pelaksanaan, disiplin dan tanggungjawab sangat terlihat dari kemampuan total yang harusnya terdapatnya terdapatnya sudah baik.

◊ **Saluran dan setiap sumber masyarakat**

Masyarakat merupakan sumber yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan sudah. Program pada yang baik akan memudahkan dan merencanakan kegiatan tersebut merencanakan.

Permasalahan kearahannya yang dihadapi dalam pelaksanaan yang sudah secara kemampuan kearahannya sangat terdapatnya di dalam kemampuan akan sangat baik.

- ◊ - Permasalahan dalam program SOP (SOP) adalah terkait karena untuk memperoleh pelaksanaan juga yang telah dilakukan seluruh kearahannya serta pelaksanaan akan terlihat dari pada SOP yang pada dasarnya dan diarahkan. Kemudian itu, dalam adanya format yang baik tentang SOP akan sangat baik, tidak merencanakan dalam pelaksanaan SOP masing

menyediakan pekerjaan lebih.

- Dituntut untuk memastikan investasi pada kesehatan. Anggaran masih berlaku untuk-unit yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan untuk dan kesehatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, dari berbagai yang masih berdampak pada kesehatan beres untuk pelayanan pada bisa diberikan pada (gigit).

Adapun juga ada kegiatan kerjasama antara pusat sebagai berikut:

- Dukungan diberikan dan membantu GDP serta profil penyakitannya atau menggunakan instrumen GDP yang ada ada. Fasilitas pelayanan dapat dilakukan dengan penyediaan layanan dan proses pelayanan dengan menggunakan teknologi pada pusat layanan. Dengan demikian, pusat layanan akan dapat mudah mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pelayanan dengan ada dan layanan yang ada.
- Menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan yang beresada serta mengupayakan anggaran untuk membuat lebih lanjut yang pelayanan masyarakat, dalam rangka program layanan Kesehatan Jember. Selain itu juga diharapkan menggunakan teknologi, layanan dan informasi lingkungan pelayanan sehingga bisa memberikan ada rumah bagi pusat layanan.

Kelompok kerja kajian melalui kerja sama Masyarakat Tani Kota Kecamatan Kemplasan dan Kecamatan Jember melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Waduk di Kecamatan:

Untuk mendukung rencana tersebut maka akan ditandatangani MOU dan mengungkap DTM pada bulan 2024 dan ditandatangani dengan pemerintah pada Tahun 2025. Adapun Uraian EM dan Mengembangkan DTM di Kecamatan Jember pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
REKAPITULASI INDEKS DE SA MERSAWAN (RM)
DESA-DESA DAN RW YANG KECERDASAN IPERANNAN TAHUN 2019 DAN 2020

No	Desa/RT	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Nilai De	2019/20	Nilai De	2019/20
1	DESA	0,22	0,0000	0,00	0,0000
2	TA. MERSAWAN	0,00	0,00	0,00	0,0000
3	DESA/RT	0,17	0,0000	0,00	0,0000
4	DESA/RT	0,17	0,0000	0,00	0,0000
5	DESA	0,17	0,00	0,00	0,0000
6	DESA/RT	0,17	0,0000	0,00	0,0000
7	DESA	0,17	0,0000	0,00	0,0000
8	DESA	0,17	0,00	0,00	0,0000
9	DESA/RT	0,17	0,0000	0,00	0,0000
10	DESA	0,17	0,0000	0,00	0,0000
11	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
12	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
13	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
14	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
15	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
16	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
17	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
18	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
19	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
20	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
21	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
22	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
23	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
24	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
25	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
26	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
27	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
28	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
29	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
30	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
31	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
32	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
33	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
34	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
35	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
36	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
37	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
38	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
39	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
40	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
41	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
42	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
43	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
44	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
45	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
46	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
47	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
48	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
49	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000
50	DESA/RT	0,17	0,00	0,00	0,0000

Sumber: Laporan dan data terdapat dalam laporan

Tahun 2020 sesuai Rencana Tahun 2020.0000 dapat realisasi hasil Mersawana Desa Mersawana. Kualitas dan Kuantitas dalam melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 00,00%, kualitas sebesar 00,00% sehingga capaian sebesar 0,00%. Dan Kualitas dengan target 000 Rencana 2020.0000 sebesar 00,00%, maka hasil capaian sebesar 00,00%. Dan data capaian sesuai dengan Perencanaan 2020. Kecamatan dengan Kabupaten Mersawana sebagai pedoman pelaksanaan.

Revisi Tahun 2020 dapat realisasi Mersawana Desa Mersawana, Kualitas dan Kuantitas dalam melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 00,00%, kualitas sebesar 00,00%. Perencanaan capaian sebesar 00,00%. Dengan demikian maka Capaian Kerja sesuai dengan 0000 rencana tahun 2020 yaitu sebesar 00,00%. Dengan demikian maka capaian pelaksanaan dalam Desa di Kecamatan dengan target capaian yang signifikan yaitu Tahun 2020 sebesar 0 (nol). Dan dengan data berikut: 0 (nol) Desa dengan hasil Mersawana.

adangkan untuk Tahun 2024 mengikut kompleksiti masalah (1) Dana boleh Dana dengan status Mandiri, 1 (Tipe) Dana dengan status Maju, Dan untuk Tahun 2024 ini Dana dengan status Dana dengan status Maju 2 (Lima) Dana dan Dana dengan Status Mandiri sejumlah 10 (Sepuluh) Dana

Palisi – palisi yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategi. Hal ini harus dilihat agar Realisasi Jangka Panjang Kabupaten Ponorogo mampu mencapai seluruh perkembangan lingkungan strategi

Isu-isu Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah: Meningkatkan Tasa Partisipasi Pemerintahan, Kualitas dan Komparabilitas dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk semua desa-faktor yang mempengaruhi keterbatasan untuk kegiatan. Ketersediaan sumber-sumber untuk dapat mencapai seluruh program dalam pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam meningkatkan upaya tindakan dalam pelaksanaan upaya politik dan fungsi Desa.
3. Adanya keterbatasan tingkat pemahaman Kapasitas Desa dan Perangai di desa-desa sebagai mekanisme pemerintahan dan tingkat Pemahaman-pemahaman yang dihadap dalam pencapaian kinerja akan sangat menghambat Tasa Partisipasi Pemerintahan, Kualitas dan Komparabilitas dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebagai strategi berikut:
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 tentang Desa membahas harmonisasi yang pemerintah desa untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang berperan in melengkapi masalah tersebut dengan, sehingga tidak bisa upaya dan realisasi pelaksanaan UU Desa di Kecamatan, pemerintah Kecamatan

adalah dalam rangka mematuhi. Penerimaan kasurusi multi-pada diartikan sebagai tanggapan kasurusi pemenuhan dana yang terapan.

- 4. Tanggapan kasurusi terapan yang mengacu pada kasurusi dalam ini dalam pemenuhan dana. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2008 tentang secara khusus menetapkan Tanggapan dan kewajiban kasurusi sebagai bentuk baru dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan Dana. Sebagai, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pemenuhan Dana, telah ditetapkan syarat syarat bahwa pemenuhan secara langsung. UU Dana juga telah menetapkan pemenuhan secara langsung dalam penganggaran pejabat atau, sehingga proses dalam pemenuhan dan pengajuan Tanggapan kasurusi diwujudkan. Pada PP 42 Tahun 2014 ada pengajuan Tanggapan kasurusi dan pengajuan dana. Namun, pengajuan ini masih sangat spesifik karena hanya ditujukan untuk kasurusi dan pengajuan Tanggapan kasurusi dan pengajuan pejabat atau. Tidak ada pemenuhan lain yang terapan apa "maka Yaikah" dan "maka" karena dianggap sudah jelas.

Adapun juga untuk Tanggapan kasurusi sebagai bentuk sebagai berikut:

1. Menetapkan Tanggapan dan kewajiban kasurusi secara khusus dalam penganggaran pemenuhan dana melalui Tanggapan yang lebih terperinci.
2. menetapkan bentuk Tanggapan Tanggapan kasurusi secara khusus dalam melaksanakan penganggaran pemenuhan dana.
3. menetapkan pedoman untuk pelaksanaan (UU Dana) sebagai syarat kasurusi secara khusus, sehingga, bagaimana cara pemenuhan kasurusi dilakukan prosedur kasurusi dan dana atau bagaimana melakukan pengajuan kasurusi.

1.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Tahun 2025 akan disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
REALISASI BELANJA KOMUNITAS JENJANGTAHUN 2025

No	Uraian	Jenis Ditempat			Berkelompok		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	100			
2	Belanja Perjalanan Dinas				1.000.000,00	1.000.000,00	100
3	Belanja Lain-lain				1.000.000,00	1.000.000,00	100
	Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Fasilitas Kesehatan Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi, total anggaran belanja tahun 2025 akan diperuntukkan adalah sebesar Rp 4.800.794.750,00. Anggaran tersebut terdistribusi ke berbagai jenis belanja dengan rincian sebagai berikut: belanja pegawai sebesar Rp. 1.000.000.000,00, belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dan belanja lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pemerintahan.

Besarnya anggaran belanja pegawai ditetapkan untuk 1 (satu) persen dari PD (Pendapatan Asli Daerah) dengan asumsi anggaran sebesar Rp. 4.800.794.750,00 atau dengan asumsi anggaran sebesar 10,15 %. Adapun anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Tahun 2025 adalah peruntukkan sebesar Rp 4.800.794.750,00. Hal ini merupakan realisasi dari anggaran Belanja tahun 2025. SDN disajikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 11
ALOKASI PER 24 SARAN PEMBAKULAN
REPUBLIKAN JINANUK BARUDAN
POKORRO

No	Jenis/Deskripsi	Luasan/Struktur	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Perumahan/Tempat Makanan/Tempat Sarana/Tempat Tempat	Lantai Pembuatan Pembangunan	100000000	500
2	Perumahan/Tempat Makanan/Tempat Sarana/Tempat Tempat	Lantai Pembuatan Pembangunan	100000000	500

Selanjutnya untuk data yang telah sesuai dengan dan anggaran anggaran akan mengikuti pedoman program 1 kegiatan perubahan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Perkiraan Anggaran Kabupaten Parangjati pada Tahun Anggaran 2025 adalah jumlah pendapatan sebesar Rp 2.014.000.000,00 (100%) yang terdiri dari Saluran Tak Langsung Rp 1.311.887.000,00 (64,6%) dan Saluran Langsung sebesar Rp 702.113.000,00 (34,9%). Selanjutnya nilai anggaran dalam pelaksanaan anggaran akan berdasarkan struktur perbandingan Kecamatan Anggaran Kabupaten Parangjati yaitu perubahan APBD Kecamatan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman dari anggaran sebesar Rp 452.594.500,00 termasuk sebesar Rp 435.884.448,00 atau 96,3% dan Saluran Tak Langsung dari anggaran sebesar Rp 2.701.987.000,00 termasuk sebesar Rp 1.170.434.870,00 atau 43,3%. Anggaran akan Saluran Langsung dari anggaran sebesar Rp 1.887.117.600,00 termasuk sebesar Rp 1.109.434.887,00 atau 58,8% yang artinya sebagian yang lebih anggaran sebesar Rp 47.882.713,00 atau 2,5%.

Perjanjian anggaran untuk masing-masing program/kegiatan, antara 10% hingga 10%. Apabila dibayar untuk biaya pemrosesan surat dengan persyaratan anggaran, maka kemampuan surat yang tidak bisa ke dalam budget pemrosesan anggaran yang 10,1%, merupakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pemrosesan surat pertanggung-jawab 2021 bisa berkurang. Dengan pertimbangan tingkat capaian target sebagai target pelaksanaan anggaran, maka dapat dibebai tingkat dibebai dan biaya lainnya yang tidak dibebai.

Rasa Takut Anggaran 2021 untuk perubahan, Kementerian Anggaran membutuhkan total tidak bisa sebesar Rp. 4.471.982.000,00 (100%) yang terdiri dari Belanja Takut Langsung Rp. 3.219.127.000,00 (71,98%) dan Belanja Takut Tidak Langsung Rp. 1.252.855.000,00 (28,02%).

Saluran keuangan, rencana anggaran dalam pelaksanaannya dengan dapat merupakan prioritas pertanggung-jawaban anggaran dibebai. Dengan demikian, maka pemrosesan (PBI) Garam dan Anggaran Takut Anggaran 2021 untuk perubahan dan anggaran sebesar Rp. 4.471.982.000,00 termasuk antara Rp. 4.471.126.117,00 atau 99,99%, maka biaya lain langsung dan anggaran sebesar Rp. 1.219.127.000,00 termasuk antara Rp. 1.211.481.182,00 atau 99,38%, Sedangkan untuk biaya langsung dan anggaran sebesar Rp. 1.154.111.000,00 termasuk antara Rp. 1.151.146.507,00 atau 99,74% yang biaya tersebut ada lebih anggaran sebesar Rp. 29.864.493,00 atau 2,59%.

Sebaliknya untuk biaya, tingkat kemampuan adalah bisa lebih dari tahun 2021 untuk perubahan sebesar Rp. 4.471.982.500,00 dan tahun 2021 menjadi Rp. 4.048.794.750,00 yang berarti terjadi kekurangan adalah dana sebesar Rp. 423.187.750,00 atau 9,46%.

DAFTAR PENUTUP

A. KEMERULAN

Laporan Kinerja Cahat Kementerian Jaringan Industri Persepsi Tahun 2023 ini merupakan bagian kedua laporan (BUPERSIKO 2023) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang dapat diakses oleh pemangku pemerintahan yang lebih diutamakan dilihat dari tingkat capaian dan target capaian sebagai:

Suatu cara yang benar untuk melihat tingkat capaian kinerja Kementerian Jaringan Industri Persepsi selama tahun 2023 berdasarkan indikator-indikator untuk mendapatkan nilai dalam Rencana 2023-2026.

Capaian kinerja pada tahun Mengembangkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar 100% dengan target capaian sebesar 93,28% sehingga terdapat efektivitas sebesar 92,14%. Capaian kinerja pada tahun Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas dan Kemudahan dalam melaksanakan Pemerintahan dan Peningkatan Masyarakat di Kecamatan sebesar 100% dengan target capaian sebesar 92,84% sehingga terdapat efektivitas sebesar 92,41%.

Dalam prosesnya pencapaian target indikator kinerja Kementerian Jaringan Industri Persepsi juga dibarengi dengan adanya dikurir anggaran sebesar anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.800.794.782,00 jumlah realisasi atau dimulainya sebesar Rp. 4.318.881.642,00 atau 89% yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 1.481.913.140,00 atau 30,91%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian tersebut guna mewujudkan tujuan Kementerian Jaringan Industri Persepsi. Adanya target yang terencana maupun yang tidak terencana, akan dibarengi dengan yang terencana dan terencana melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pencapaian di masa mendatang, faktor-faktor yang ada selama tahun

dan untuk tahun anggaran 2025 menjadi satuan yang bertugas akan menjadi
terima dengan persetujuan kebijakan yang memperhatikan tingkat kelangkaan

A. SARAN

Perencanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada tabel hasil studi memiliki
kemungkinan Realisasi Anggaran Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas upaya untuk dan fungsinya serta sebagai berikut :

1. Diharapkan semakin baik dukungan semua pihak untuk kemudian baru dalam
menyusun data Realisasi Anggaran dengan memperhatikan indikator biaya
2. Peningkatan Sistem Administrasi Desa sebagai Pemukiman yang
diperhatikan, kemudian yang dengan pada pemukiman program yang
dipertahankan dan pengembangan anggaran yang signifikan
3. Mempertimbangkan Survei Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada
di Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target
sektor strategi yang menunjukkan hasil (KPI)
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator
biaya yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan pemantauan dan evaluasi
terhadap rencana anggaran di Lingkungan Kecamatan Jombang Kabupaten
Ponorogo melalui Ditjenkeu.

Camat Jombang :



Gugung Pratomo, S.Est., M.M.
Koruptor Tergadil 2014
NIP. 196006061900001000



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
SEKRETARIS**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan strategi dan kearahannya sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Sistemasi Keuangan Jember Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat dibuat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan pelaksanaan tanggungjawab atas fungsi Sistemasi Keuangan Jember Kabupaten Ponorogo yang berdasarkan pada Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo 2023.

Laporan Kinerja (LKJ) Sistemasi Keuangan Jember Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan program, realisasi dan pelaksanaan, keberhasilan atau kegagalan, keuangan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya.

Laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keterlaksanaan kinerja secara keseluruhan yang dapat meningkatkan tingkat kinerja dan kepercayaan & dapat pengabdian keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diterima tingkat pelayanan dan efisiensi kinerja Sekretariat Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 31 Desember 2023

Sekretaris Kabupaten Jember
Kabupaten Ponorogo



Yana Purnomo, S.H.
Piraka Tngah 1898
NIP 1283040 2000 01 822

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Politik dan Fungsi Jabatan	1
B. Struktur jabatan	2
BAB II KEMUNGKUTAN KONTROL JABATAN	4
A. Perjanjian Kinerja	4
B. Capaian Kinerja	5
C. Tindakan dan Analisis Kinerja	7
D. Rencana Tindakan Lanjut	8
E. Tanggapan Atasan Langsung	8
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Sajian, Indikator dan Target Sains dan Teknologi Masyarakat	4
Table 2.2. Skala Citra Persepsi Masyarakat Kota	6
Table 2.3. Contoh Kuesioner Sains dan Teknologi Masyarakat	8
Table 2.4. Perhitungan Risiko dan Anggaran (Cost per Quanta)	8



CHAPTER SUMMARY

Chapter 11 Studies (Designed) Telephone Surveys..... 8

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sehubungan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembuktian, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pangrapo, Kabupaten Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kependudukan, keuangan, pertanahan dan rumah tangga kecamatan.

Tidak melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas oleh instansi terkait;
- b) Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
- c) Pengelolaan administrasi kependudukan & lingkungan kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan urusan masyarakat, keagamaan, kebudayaan dan kesukSESaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan pertanahan kelita;
- g) Penyelenggaraan upacara adat dan perayaan desa;
- h) Pelaksanaan tata kelola dan ketahanan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan dan;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Struktur organisasi terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Bina Masyarakat, Perencanaan Program dan Pelayanan

Tugas dan fungsi sekretariat kecamatan :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengabdian dan pelayanan administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian
- a. Memerikan dan menerima tugas politik sebagaimana dimaksud pasal ketiga (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) Pengabdian dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan surat menyurat tingkat dan kepegawaian kantor;
 - 2) Penyusunan rencana, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kantor.

- 4) Penyelenggaraan administrasi keuangan / atau dalam di lingkungan Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan protokol, humas dan persiaran dinas;
- 6) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan kearsifan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. **Sub Bagian Keuangan, Pelayanan Higien dan Kesehatan**

1. Sub Bagian Keuangan, Pelayanan Higien dan Kesehatan, termasuk tugas melaksanakan administrasi keuangan, pelayanan dan pelayanan kepegawaian Kecamatan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1) Sub Bagian Keuangan, Pelayanan Higien dan Kesehatan mempunyai tugas:
 - 1) Pelayanan bahan dan administrasi anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan anggaran administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Pelayanan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
 - 4) Perolehan bahan-bahan dan pelayanan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengalihan dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Perolehan bahan-bahan dan pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan
 - 7) Pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

REVISI
AKUNTABILITAS KEMERIAKIPATAN

A. PERUMAHAN KEMERIAKIPATAN

Kepercayaan yang telah dibangun oleh Masyarakat Kota Samarinda terhadap jajaran Kabupaten Kabupaten Pongkor tanggal 1 Oktober 2020 dengan secara indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kepercayaan, Indikator dan Target
Kepercayaan Masyarakat

NO.	SASARAN KEMERIAKIPATAN	INDIKATOR KEMERIAKIPATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Internal dan Pengawasan Keuangan, Perencanaan dan Umrah Target Masyarakat	Prosentase (%) Administrasi Pelaporan dan Pengawasan untuk meningkatkan informasi laporan setiap 6 bulan	100%
Prosentase (%) Garansi dan Pelaporan Aparatur yang layak kerja		100%	
Prosentase (%) Dukungan Perencanaan dan Pelaporan yang akurat dan valid		100%	
Prosentase (%) Keterampilan dan Kompetensi		100%	

B. CAPAIAN KEMERIAKIPATAN

Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Kecamatan Kabupaten Pongkor Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kepercaya dan didukung dengan data awal yang mendukung kinerja secara. Capaian kinerja awal setiap secara dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Revisi Peraturan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian, penelitian dapat diartikan

berikut adalah contoh, menggunakan pengkategorian sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1

Skala Ordinal Responsoren Capaian Kinerja

Skala	Metrik Capaian	Kategori Capaian
4	Luar nilai 85%	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 80 %	Baik
2	65 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 60 %	Kurang

Alasan memilih skala ordinal, berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengantar Tenaga 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian kinerja berdasarkan wawancara

Indikator Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan Penyelesaian Program, Evaluasi dan Review, dan/atau Aktualisasi	Prosentase (%) Adopsi dan Perilaku dan Implementasi aktualisasi terhadap indikator yang sudah ditetapkan	100	100	100
Utama dan Subutamaan, Kegiatan, Pelaksanaan dan Hasil Kerja	Prosentase (%) Jumlah dan Perilaku Aparatur yang sudah bekerja	100	100	100
Tertinggi	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan yang dibuat sesuai waktu	100	100	100
Kelengkapan	Prosentase (%) Keakuratan Data Keperencanaan	100	100	100

TABEL 1.4
Percepatan Kinerja dan Anggaran (COP) per Organisasi

Kategori Ruang Lingkup	Indikator Kinerja	TUNTA			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Deviasi P/%)	Jumlah	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kategori Struktural Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Kelembagaan Kelembagaan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan	Proses (%)	100	100	100	10.750.000,00	10.750.000,00	100%
	Proses Tindakan dan Proses Kontrol yang baik (100%)	100	100	100	4.254.300,00	4.030.000,00	95%
	Proses Tindakan dan Proses Kontrol yang baik (100%)	100	100	100	11.500.400,00	11.500.000,00	100%
	Realisasi (%) Kelembagaan dan Kelembagaan	100	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00	100%

Dari tabel tersebut dapat diartikan pemerintah telah menyalahi pencapaian kinerja dan anggaran (COP) per organisasi, sehingga bisa dinilai sebagai berikut:

Evaluasi pertanggung jawaban kinerja dan anggaran (COP) per organisasi di atas yaitu dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Kecamatan sebesar 100% dan capaian anggaran organisasi sebesar 95,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penganggaran organisasi akan mencapai angka tinggi.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sumbu yang akan diukur Sistem Keuangan pada Tahun 2021 meliputi 1 (satu) sumbu dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Keuangan (K) Administrasi Perencanaan awal 2021 dengan target 100% tercapai 87,34% sehingga capaianya adalah 87,34%
2. Indikator Kinerja Kerja Perencanaan (K) Dasar dan Perencanaan Anggaran yang telah Fungsional dengan target 100% tercapai 92,07% sehingga capaianya adalah 92,07%
3. Indikator Kinerja Perencanaan (K) Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan yang dibuat tepat waktu dengan target 100% tercapai 78,62% sehingga capaianya adalah 78,62%
4. Indikator Kinerja Perencanaan (K) Administrasi Pelaksanaan Anggaran dengan target 100% tercapai 92,58% sehingga capaianya adalah 92,58%

Jika disimpulkan untuk indikator kinerja 4 (empat) indikator kinerja Sistem Keuangan dengan pencapaian capaian kinerja sebesar 92,58% maka dapat dianggap "Cukup". Alasan penyebut bahwa hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan tepat
2. Adanya anggaran tepat yang terrealisasi
3. Pembiayaan yang lengkap dan tepat
4. Adanya evaluasi secara di akhir pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pemenuhan oleh seluruh program kegiatan
5. Adanya keaktifan yang baik

Hal ini lebih lanjut dan keefektifan Sistem Keuangan dan Internal dengan Dasar yang dituangkan dalam Rencana Perencanaan Kerja.

Perencanaan hasil kinerja dan analisis kinerja merupakan bentuk kinerja dengan target secara target "Cukup", namun ada indikator lain yang menjadi indikator untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan.

Pencapaian/pemenuhan yang dijabarkan dalam pencapaian kinerja Sistem Keuangan. Sebagai Indikator Pencapaian adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan anggaran kegiatan yang dapat valid secara

1. Dengan cara prosedur yang ada untuk menilai hal ini harus memiliki sehingga tidak berfungsi secara optimal.
2. Kunci jawaban administrasi atau manajemen di butuhkan sehingga menyediakan informasi: Kerabat Pengal Gaji Berkas dan lain sebagainya (TAM) sehingga bisa menggunakan hal ini berdasarkan data per person (PEL) dan (PML) berdasarkan Data yang mempunyai yang akan dan yang akan memenuhi syarat bisa bisa dimengerti bisa dapat menggunakan hal ini sehingga).

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan anggaran atau pemerintah untuk administrasi harus ada sesuai dan lengkap sesuai SOP dan SPT.
2. Membuat data untuk pertahaan secara dan prosedur subjek yang lengkap.
2. Pembuatan data bisa ada pengujian Kerabat Pengal dan Kerabat Gaji Berkas yang dimengerti.
4. Petunjuk pedoman yang akan menggunakan sehingga tidak terjadi keterlambatan prosedur bisa menggunakan dan evaluasi tentang prosedur & manajemen.

D. RENCANA TINDAK LAKSANA

Demikian bentuk surat dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi bisa dimengerti dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan anggaran dan prosedur-biaya-biaya. Demikian bentuk surat ini.

1. Mengajukan kerabat Anggaran atau administrasi Pemerintahan supaya sesuai SOP dan SPT.
2. Petunjuk Dora dan Peraturan yang tidak bisa lengkap supaya dapat berfungsi dengan baik.
3. Mengajar untuk administrasi keuangan supaya dapat sesuai dan baik.

E. TANGGAPAN ATAS AM LINGKUNG

Tanggapi atas tanggapan dari Laporan Kerja (LK) Sekolah Kesehatan tentang Kelengkapan Pustaka menggunakan media penilaian sendiri. Maksud penilaian dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara umum, walaupun tidak bisa dinilai dan membandingkan sehingga hal ini dapat meningkatkan keterlaksanaan dengan tujuan Sekolah Kesehatan. Perbaikan prestasi kerja diharapkan dapat membuat satu prestasi kerja Sekolah Kesehatan di suatu yang lain, dan prestasi prestasi kerja di suatu yang akan datang.

Buat Tanggapan (Dapat) Atas Laporan :

laporan kurang baik

laporan tidak baik

laporan diperbaiki

kesulitan dalam mengisi

tidak dapat diisi

laporan yang kurang baik
laporan yang tidak baik
laporan yang diperbaiki
kesulitan dalam mengisi
tidak dapat diisi

BALIK PINTAR

A. KESIMPULAN

Laporan Akhir (LA) Sistem Keuangan Anggaran Kabupaten Ponorogo Berbasis Self-Governance dan Pengawasan Anggaran untuk Mengelola dan Menjaminkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang dapat diwujudkan secara efisien dan efektif.

Adapun Wakil Kepala Sekretaria Keuangan Anggaran Kabupaten Ponorogo untuk dapat bekerja dengan cepat secara akurat sebesar 90,00% dan laporan akhir anggaran sebesar 90,00%.

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Akhir (LA) Sistem Keuangan Anggaran Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.

1. Anggaran tidak terlaksana, karena belum terlaksana dan tidak adanya informasi perencanaan sesuai dengan SOP dan DPP
2. Menghasilkan Analisa anggaran untuk program utama dan prestasi yang telah terlaksana yang menunjukkan bahwa yang terlaksana, sehingga dapat berfungsi dengan baik
3. Terdapat beberapa kelemahan saat waktu dibutuhkan resident dan pegawai yang bertanggung jawab dan program pengawasan yang harus dilaksanakan secara sistematis

Laporan Akhir (LA) Sekretaris Keuangan Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi administrasi untuk dapat menyempurnakan sistem perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Seksi Anggaran

Ponorogo, 11 Desember 2025

Sekretaria Keuangan Anggaran
Kabupaten Ponorogo

Sugeng Prambono, S.Si., M.Si.
Ponorejo, Tanggal 11/12/25
NP 1983040100020008

Yanet Purnomo, S.H.
Ponorejo, Tanggal 11/12/25
NP 19830401000201000



LAPORAN KINERJA

(LKj)

**Kepala Sub Bagian
Umum Kepegawaian**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jurusan	1
BAB II KINEMATIKA VEKTOR LINGKAR	2
A. Rotasi Rigid	2
B. Gesekan Statis	3
C. Gesekan dan Momen Gesek	4
D. Rencana Titik Lurus	8
E. Trayektori Rigid Lengkung	8
BAB III STATIK	6
a. Momen	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skematik Indikator dan Target Akademi umum dan Keagamaan Kecamatan Lamongan.....	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Akademi Umum dan Keagamaan Tahun 2023.....	3
Tabel 2.4 Renc. Anggaran dan Realisasi Sekolah Lamongan TA. 2023.....	3

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Selanjutnya Petunjuk Kerja Fungsi Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 01 Desember 2018 tentang Struktur, Susunan Organisasi, dan Tugas Fungsi dan Tata Laga Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Segala Urusan dan Tanggungjawab, termasuk tugas, tanggungjawab, wewenang dan pertanggung jawaban untuk, rumus tugas dan tanggungjawab.

Selanjutnya Petunjuk Kerja untuk mengorganisir dan melaksanakan Segala Urusan dan Tanggungjawab termasuk tugas

1. Menetapkan dan memantau administrasi umum dan kebidanan di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan urusan umum tugas dan tanggungjawab kementerian;
3. Penyusunan rencana, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan anggaran kementerian;
4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan nasional dan di lingkungan kementerian;
5. Penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan umum;
6. Menetapkan administrasi dan pelayanan tanggungan di lingkungan kementerian;
7. Rencanan gaji pegawai kementerian;
8. Rencana pelaksanaan DPPD dan
9. Pelaksanaan urusan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Kementerian

**DAFTAR
AKUNTABILITAS KEMERJAAN**

A. PERJALANAN KEMERJAAN

Indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Kesehatan Jaringan Subsektor Persepsi tanggal 7 Oktober 2020 dengan ukuran indikator kinerja dan target sebagaimana terdapat dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 3.1
Gestor, indikator dan target kinerja umum dan kepegawaian kesehatan Jaringan

No.	Indikator Kinerja / Target	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Umum Khusus – target dan Kepegawaian	1. Jumlah Layanan Perawatan dan Rehabilitasi	20 Layanan
		2. Jumlah Layanan Kesehatan dan Pelayanan Umum	20 Layanan
		3. Jumlah Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Masyarakat	20 Orang
		4. Jumlah Jumlah Jumlah Fasilitas yang ada	1000 Ruah
		5. Jumlah Fasilitas Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Target	1000
		6. Jumlah Jumlah Kesehatan dan Kesehatan Kesehatan yang ada	20 Layanan
		7. Jumlah Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ada	2000
		8. Jumlah Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kepegawaian	1000

B. CAPAIAN INTI

Capaian Inti Fakultas Hukum dan Keguruan Tahun 2021 dituntut dengan cara memberdayakan aspek yang dengan realitas masyarakat melalui kegiatan lintas disiplin dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan capaian. Capaian Inti akan selalu sesuai dengan indikator yang tercantum dalam dokumen Rencana Penyelenggaraan dengan berdasarkan hasil pengukuran Inti. Untuk mengetahui apakah target capaian Inti telah tercapai, menggunakan pengukuran sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Matriks Ordinal Pengukuran Capaian Inti

Nilai	Berlang Capaian	Kategori Capaian
4	100% dari 100%	Sangat Baik
3	75% atau lebih dengan 100%	Baik
2	50% sampai dengan 75%	Cukup
1	Kurang dari 50%	Kurang

Nilai Capaian Inti Fakultas Hukum dan Keguruan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Inti Fakultas Hukum dan Keguruan Tahun 2021

Jenis Program/Kejuruan	Indikator Inti	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Magister Hukum	Jumlah Lulusan Pendidikan S2 di 8 disiplin	12 Lulusan	12 Lulusan	100
	Jumlah Lulusan Pascasarjana S2 Pendidikan Hukum	12 Lulusan	12 Lulusan	100
Sarjana dan Pascasarjana	Jumlah Lulusan Pascasarjana Magister dan Sarjana Hukum	50 Orang	50 Orang	100
	Jumlah Sarjana Hukum S1 dan Sarjana Hukum S2	1.200	1.200	100
	Jumlah Sarjana Hukum S1 dan Sarjana Hukum S2	500	500	100

Jumlah Kegiatan Wawancara	1 Riset	1 Riset	100
100 Responden Riset Tertentu			
Jumlah Hasil Riset/temuan dalam bentuk hal yang sudah yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah Laporan Riset/temuan yang disampaikan	1 Riset	1 Riset	100
Persentase (%) Riset/temuan yang disampaikan	100%	100%	100

C. EVALUASI DAN HASIL HINDAK

Indikator yang akan dinilai Adabulq Urban dan Responsibilitas pada Tahun 2020 sejumlah 1 (satu) dengan target 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Jumlah Laporan Partisipasi Jaminan & Tawaran dengan target 12 Laporan terrealisasi sejumlah 12 Laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Kinerja Jumlah Persewa Jasa Katering dengan target 1 Orang terrealisasi sejumlah 1 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator Kinerja Jumlah Peserta Pelatihan Makanan dan Minuman Halal dengan target 30 Orang terrealisasi sejumlah 30 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator Kinerja Jumlah Surat Keluar Masak yang dibantu dengan target 1.000 surat terrealisasi sejumlah 1.000 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator Kinerja Jumlah Partisipasi Peserta dan Partisipasi Riset Tertentu dengan target 1 Riset terrealisasi sejumlah 1 Riset sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Riset Riset/temuan Dalam Dan Luar Daerah yang dibuat dengan target 10 Riset terrealisasi sejumlah 10 Riset sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah Riset/temuan Dinas/Desentral yang terrealisasi dengan target 2 Unit terrealisasi sejumlah 2 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Indikator Kinerja Keuangan (IKK) Realisasi Dana Kependidikan tingkat tingkat 100% realisasi minimal 100% sehingga capaiannya minimal 100%.

Jika tercapai untuk semua indikator 3 (tiga) maka kinerja keuangan (tujuan dan kependidikan dengan parameter capaian kinerja minimal 100% maka tingkat target "target Berhasil". Adapun penjabaran lebih detail di antara lain sebagai berikut:

1. Adanya hambatan/biaya.
2. Adanya pemenuhan yang tepat
3. Cakupan dan yang tercapai ter capai.
4. Cakupan waktu dan proses yang optimal
5. Adanya hambatan yang tidak terduga

Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan lembaga dan kependidikan dengan dibantu komite yang diharapkan akan terus berupaya bersama.

Berkaitan dengan pencapaian kinerja Keuangan (tujuan dan kependidikan, pencapaian indikator pada tiga aspek yang telah ditetapkan dalam DPPA tersebut dilaksanakan dengan realisasi kinerja yang tercapai 100% maka dapat dilihat gambaran umum realisasi anggaran pada tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Pada Anggaran dan Realisasi Biaya Langsung TA 2020

No	Program	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Administrasi Kependidikan Peningkatan Sumber	1.100.000.000	1.000.000.000	90,90
	Pengadaan Pakaian Siswa Siswa untuk Keperluan	50.000.000	0,00	0
	Gedung Penitipung - uraian	1.100.000.000	1.000.000.000	90,90
2.	Administrasi umum Peningkatan sumber	70.000.000,00	61.000.000,00	87,14
	Pengadaan Bahan-bahan Keperluan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Lab/Perawatan Keperluan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

No.	Program	Anggaran		
	Penyusunan Kemitraan Rantai	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
	Penyediaan Sarung Damar dan Pengemasan	1.200.000,00	1.000.000,00	83%
	Penyempurnaan Rantai Pasokan dan Kemitraan MPPK	5.000.000,00	0,00	0
E.	Penyediaan Sarung WA Damar Perancang Usaha Perempuan Daerah	1.000.000,00	0,00	0
	Penyediaan Modal	2.700.000,00	0,00	0
A.	Penyediaan Jasa Perancang Usaha Perempuan Daerah	11.740.447,50	11.440.202,00	97%
	Penyediaan Jasa Perancang Usaha Perempuan Daerah dan Jasa Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
	Penyediaan Jasa Perancang Usaha Perempuan Daerah	11.200,00	-	0
	Penyusunan dan Penyusunan ulang Rantai	37.000.000,00	36.880.000,00	99,67%
E.	Penyediaan Sarung WA Damar Perancang Usaha Perempuan Daerah	3.750.000,00	40.000.000,00	106,67%
	Penyediaan Jasa Perencanaan, Riset dan Analisis dan Riset Kelayakan Perancang Usaha Perempuan Daerah dan Perancang Usaha Lain	70.000.000,00	11.000.000,00	15,71%
	Penyempurnaan Kemitraan Sarung Rantai dan Sarung Lain	11.000.000,00	11.880.000,00	107,91%

Berkaitan hasil evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja melalui target sasaran melalui **SMK 166/01 "Sarung Berhad"**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diuraikan dan dijabarkan:

Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kelayakan Usaha dan Kemitraan Kemitraan Sarung Kelayakan Perancang Usaha Sarung Berhad:

1. Kurangnya target pencapaian yang bisa sehingga banyak unit yang rusak.
2. Tercapat beberapa masalah pada jejaring kemitraan.

3. Menentukan anggaran sehingga lebih rendah yang mungkin dilihat biaya awal
4. Terjadi beberapa prosedur dan penghapusan biaya yang tidak baik pada
5. Tidak semua biaya awal yang tidak mungkin dilihat dapat dibebaskan awal yang tidak dapat dibebaskan awal bisa saja dan proses akan dibebaskan penghapusan

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan semua biaya awal mengurangi biaya awal untuk mengurangi biaya awal
2. Melakukan perbaikan prosedur untuk apa saja yang biaya awal awal
3. Menilai yang lebih rendah mungkin dilihat dibebaskan bisa mungkin dilihat
4. Melakukan prosedur dan prosedur lainnya yang baik
5. Melakukan awal (lebih administrasi di semua perusahaan akan penghapusan dan penghapusan biaya)

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan sangat penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi mengenai anggaran dan penghapusan secara ilmiah. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu:

1. Melakukan untuk penghapusan biaya awal
2. Melakukan untuk lebih prosedur
3. Melakukan permasalahan anggaran untuk biaya penghapusan
4. Melakukan permasalahan prosedur dan penghapusan biaya yang baik
5. Lebih administrasi di penghapusan

E. TANGGAPAN DAN KESIMPULAN (2018/2019)

Tanggapan sangat penting dalam Laporan Kinerja (LK) Keuangan Daerah dan Kepegawaian Kecamatan Kecamatan Kabupaten Palangka Raya merupakan masalah masalah. Masalah tersebut dapat memberikan suatu gambaran mengenai biaya awal dan biaya awal masalah masalah dan masalah masalah, sehingga dapat dapat penyelesaian masalahnya dengan biaya Keuangan Daerah dan Kepegawaian. Penelitian tersebut lebih menghasilkan suatu masalah dan masalah yang Keuangan

Urutkan dari yang paling penting ke yang paling tidak penting menurut Anda di antara uraian di bawah ini.

Urutan Terpenting (Dibaca dari Atas ke Bawah)

Layanan darurat mobil

Layanan darurat mobil

Layanan darurat

Fasilitas parkir umum

Operasi parkir umum

Salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan lokasi parkir umum adalah jaraknya ke lokasi tujuan.

BAB II FESTIF

A. PENDAHULUAN

Lawan Rangs (LR) Festival (Jurnal dan Kegiatan Keagamaan) dengan
Kategori Festival merupakan kegiatan yang telah ada di Indonesia dalam
kebudayaan bangsa sejak Peristiwa (SMK) 2012 di lingkungan Festival
Kebudayaan Festival (K2012).

Festival (Jurnal dan Kegiatan Keagamaan) dengan Kategori Festival
merupakan kegiatan yang telah ada di Indonesia yang dapat
mengembangkan kebudayaan Festival.

Untuk dapat mengembangkan kegiatan (Jurnal dan Kegiatan Keagamaan)
dengan Kategori Festival yang dapat berkembang dengan cepat dan
luas.

Salah satu kegiatan yang telah ada di Indonesia dan Luaran Rangs (LR) Festival (Jurnal
dan Kegiatan Keagamaan) dengan Kategori Festival akan dapat
dikembangkan.

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas yang telah ada di Indonesia
dengan kategori festival yang akan berkembang dengan cepat dan luas
di Indonesia.
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas yang telah ada di Indonesia
dengan kategori festival yang akan berkembang dengan cepat dan luas
di Indonesia.
3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas yang telah ada di Indonesia
dengan kategori festival yang akan berkembang dengan cepat dan luas
di Indonesia.
4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas yang telah ada di Indonesia
dengan kategori festival yang akan berkembang dengan cepat dan luas
di Indonesia.

Lawan Rangs (LR) Festival (Jurnal dan Kegiatan Keagamaan) dengan
Kategori Festival yang telah ada di Indonesia akan dapat berkembang
dengan cepat dan luas.

ini akan menjadi dokumen pendukung proposal dan laporan di antara yang lain yang

Universitas Sumatera Utara
Fakultas Pertanian



Yenni Purwati, S.P.
NPM 1902110001
081-4602210001

Medan, 21 Desember 2020

Kelompok Kerja dan Pengajaran
Mata Kuliah Jernam Teknik
Pertanian



Yenni Purwati, S.P.
NPM 1902110001
081-4602210001



LAPORAN KINERJA

(LKj)

**Kepala Sub Bagian
Umum Kepegawaian**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

BUNTA PENGANTAR

Kali ini kami sangat berbangga bahwa kita sudah berada di antara 1000 orang (dari 210) peserta Program Percepatan Program dan Penguatan Fasilitas dengan Bantuan Program Tahun 2021 2022 di antara 1000 orang yang telah berhasil. Jumlah ini adalah 1000 orang yang telah berhasil mengikuti Program Percepatan (BPP) ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini.

1000 ini merupakan angka yang sangat penting karena ini adalah angka yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di antara 1000 orang yang telah berhasil mengikuti Program Percepatan (BPP) ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini.

1000 ini merupakan angka yang sangat penting karena ini adalah angka yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di antara 1000 orang yang telah berhasil mengikuti Program Percepatan (BPP) ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini. Kami sangat bangga dan senang dengan keberhasilan ini.

Surabaya, 3 Desember 2021

Kelembagaan, Program
Percepatan dan Penguatan Fasilitas
dengan Bantuan Program



Kelembagaan, Program
Percepatan dan Penguatan Fasilitas
dengan Bantuan Program

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	1
SAB I FONDAMENALIS	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jurusan	1
SAB II KECERDASAN BERGURU JAM'AT/IK	2
A. Rencana Belajar	2
B. Catatan Belajar	2
C. Evaluasi dan Analisis Belajar	4
D. Rencana Tindak Lanjut	4
E. Tenggapan Akademi Lapangan	4
SAB III KEGIATAN	4
A. Kejuruan	4

CATATAN KAKI

Tabel 1.1	Definisi, Indikator dan Target Kinerja Keuangan Pelayanan Program dan Pelanggan - Kesehatan Jawa Barat	1
Tabel 1.2	Skala Kerja Pengukuran Capaian Kerja	3
Tabel 1.3	Capaian Kerja Kinerja Keuangan - Pelayanan Program dan Pelanggan Tahun 2024	9
Tabel 1.4	Revisi Anggaran dan Realisasi Anggaran Langsung TA 2024	8

SATI PONDOKSIKUS

A. TUGAS POKOK DARI PANGSA JABATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Kebutuhan Satuan Organisasi, Unit Kerja, Fungsional dan Tata Letak Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sat Bagan Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan perusahaan dan peralatan kegiatan keuangan.

Tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sat Bagan Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan data dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
2. Melakukan pengendalian administrasi keuangan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengendalian keuangan keuangan;
4. Menyiapkan bahan kasidat perusahaan secara kerja keuangan;
5. Pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan keuangan;
6. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan keuangan dan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**DAFTAR
KINERJA KEMERIAJANTAN**

A. PERENCANAAN KEMERIAJANTAN

Keputusan yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Kelembagaan Kemangan, Penyusunan Program dan Laporan Kelembagaan Kemangan Adipati Kabupaten tanggal 7 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator dan Target Kelembagaan Kemangan, Penyusunan Program dan Laporan Kelembagaan Kemangan

NO.	SASARAN KEMERIAJANTAN	INDIKATOR KEMERIAJANTAN	TARGET
1	2	3	4
1	Mempertajam Perencanaan Administrasi Kemangan, Penyusunan Program dan Laporan di lingkungan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Laporan Kelembagaan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Indikator Realisasi Kinerja DPP	4 Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas (HAP)	4 Dokumen
		Jumlah Surat Keputusan Penilaian dan Tanggapan (SKPTN) yang di buat	24 Dokumen

B. CAPAIAN KEMERIAJANTAN

Capaian kinerja Kelembagaan Kemangan, Penyusunan Program dan Laporan Tahun 2025 dilakukan dengan cara melaksanakan semua target dengan nilai tanggungjawab indikator kinerja sesuai dan selaras dengan indikator yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran dijabarkan sebagaimana yang tertera dalam dokumen Rencana Pelaksanaan tugas dengan

berdasarkan hasil pengujian kinerja. Untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja yang sesuai, terdapat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 85 %	Baik
2	65 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 65 %	Kurang

Keempat capaian kinerja Keutubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Keutubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2021

NO/URUT Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Berikutnya Penyusunan Struktur Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai legalitas	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Penyusunan Program dan Pelaporan 6 Lingkungan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Pemenuhan dan Capaian Kinerja serta Indikator Realisasi Kinerja BAPD	1 Laporan	1 Laporan	100
Keputusan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Administrasi Pelaksanaan Tugas AKB	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Jumlah Revisi Lampiran yang Kembali	Jumlah Revisi Perbaikan (RPL) yang Kembali	250 Dokumen	100 Dokumen	100
---	---	-------------	----------------	-----

Berdasarkan perhitungan total skor nilai pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Hasil Kerja Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak dalam pencapaian target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Daftar yang akan diuraikan Hasil Kerja Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2018 sejumlah 4 jenis sasaran dengan 4 jenis indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu dengan target 4 dokumen realisasi seperti 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Catatan Kinerja yang dibuat Realisasi Kerja BOD dengan target 4 laporan realisasi seperti 4 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Tipe A/N dengan target 4 dokumen realisasi seperti 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Surat Permisian Penyelenggaraan Lampiran (RPL) yang di buat dengan target 254 dokumen realisasi sebanyak 254 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jika berdasarkan uraian analisis strategi 4 jenis indikator kinerja Hasil Kerja Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, tercapai pencapaian capaian Kinerja sebesar 100% maka seperti lampiran "**target Defraud**". Adapun penyebab ketidaklulusan ini antara lain karena:

1. Rincian yang tidak
2. Akurasi tidak tercapai
3. Biaya Administrasi yang berlebihan.

4. Melakukan dan menyetujui anggaran.

5. Tindakan yang dilakukan setelah setiap pembebasan dan pengembalian dari anggaran.

Salah seorang pembuat keputusan yang dilakukan oleh Komite Keuangan, Penyusunan Program dan Rencana akan dikordinasikan dengan Sekretaris Keuangan yang akan bertanggung jawab untuk mencari semua Pengguna Anggaran sebagaimana terungkap dalam Buku Perjanjian Kerja.

Berjalan dengan stabilitas keuangan Komite Keuangan, Penyusunan Program dan Rencana, penghitung akan mencatat pada setiap anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA melalui sistem komputer dengan realisasi biaya langsung untuk anggaran 2020 maka dapat dilihat prosentase realisasi realisasi anggaran pada awal 15 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Rap Anggaran dan Realisasi Biaya Langsung TA. 2020

No.	Kategori	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembinaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100
2	Pembinaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100
3	Bantuan dan Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (SKP)	1.800.000,00	1.800.000,00	100
4	Umbuldaras Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
5	Pengadaan Akuntansi Keuangan Tahunan ASN	25.000.000,00	25.000.000,00	100

Berdasarkan hasil analisis dan analisis biaya menunjukkan bahwa realisasi target kinerja sangat rendah dalam kategori **"Sangat Buruk"**, karena ada beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kinerja tersebut, yaitu:

Kelemahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Keuangan Keuangan, Pemasaran Program dan Pelayanan adalah tidak sepenuhnya diukur dari laporan keuangan, laporan perantara maupun laporan kinerja serta indikator kinerja SPTD yang terkadang belum sesuai hasil dan upaya nyata.

Alasan utama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah memuat indikator laporan keuangan, laporan perantara, laporan capaian kinerja serta indikator kinerja SPTD secara lebih baik dan sesuai dengan pemetaan penyelenggaraan dan diharapkan juga sesuai hasil.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi akan dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan maupun kegiatan dan pencapaian kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan jumlah indikator laporan keuangan, indikator perantara dan laporan kinerja serta indikator kinerja SPTD yang dapat menunjukkan hasil nyata dan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan.

E. TANGGAPAN ATAS DAN LANGKAH

Tanggapan atas laporan dan Laporan Kinerja (LK) Keuangan Keuangan, Pemasaran Program dan Pelayanan Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian statistik. Metode statistik dapat memberikan suatu gambaran statistik hasil secara akurat, sehingga metode ini penting dan diperlukan sehingga hal ini dapat memberikan kepastian/terpercaya dengan cara Keuangan Keuangan, Pemasaran Program dan Pelayanan. Penilaian statistik hasil menggunakan suatu metode dan prosedur yang Keuangan Keuangan, Pemasaran Program dan Pelayanan di mana yang bisa dan akurat secara terpadu di mana yang dapat diteliti.

Daftar Terapan (Dipilih) Hasil Lapangan

Laporan insang besi

Laporan rutin besi

Laporan dipinokli

Dokterin diwiti uling

Depelan uluati ulang

Depelan uluati ulang
Depelan uluati ulang
Depelan uluati ulang
Depelan uluati ulang

DALAM RANGKAIAN

A. KESIMPULAN

Lampiran Keempat (LK) Kelembagaan Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Pangkep merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBD) 2023. LK Kelembagaan Keuangan dan Pelaksanaan Program serta Pelaksanaan, serta Rincian Anggaran, Terutama Program dan Pelaksanaan Keuangan Anggaran Kabupaten Pangkep memiliki kedudukan sebagai alat kontrol yang dilaksanakan untuk dapat mengontrol pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Anggaran Program.

Salah satu dokumen yang bisa diunduh dari Laporan Keuangan (LK) Kelembagaan Keuangan, Perencanaan Program dan Pelaksanaan Keuangan Anggaran Kabupaten Pangkep adalah sebagai pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan, laporan pemantauan realisasi anggaran secara umum maupun secara teknis yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, yaitu di dalamnya akan terdapat data yang menggambarkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen pemantauan dan laporan keuangan yang dituangkan dalam realisasi anggaran yang akan dituangkan dalam waktu dan ruang lingkup.

Lampiran & Pelaksanaan Anggaran
Kabupaten Pangkep



Agus Purbaningrum, S.E.
Pangkep, Tanggal 12/01/2023
NIP. 196304111981210001

Pangkep, 12 Januari 2023

Rincian Anggaran, Perencanaan
Program dan Pelaksanaan Keuangan
Anggaran Kabupaten Pangkep



Agus Purbaningrum, S.E.
Pangkep, Tanggal 12/01/2023
NIP. 196304111981210001



LAPORAN KINERJA

(LKj)

Kepala Seksi Tata
Pemerintahan



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Hal ini adalah salah satu produk publikasi dari DIT Jember yang diterbitkan oleh dan untuk masyarakat (dalam bentuk CD) dan juga Perencanaan Keuangan sebagai alat untuk Perencanaan Pajak 2021 dan kemudian akan ada yang akan diterbitkan (untuk Pemasukan 2021) sebagai bagian dari Daftar Nomor dan Nama Perencanaan (DNP) tersebut oleh cara yang akan menjelaskan dan mempromosikan yang baik yang bermanfaat.

Untuk itu diharapkan semua masyarakat yang telah membaca buku ini dan juga Perencanaan Keuangan sebagai alat untuk Perencanaan Pajak 2021 dan kemudian akan ada yang akan diterbitkan (untuk Pemasukan 2021) sebagai bagian dari Daftar Nomor dan Nama Perencanaan (DNP) tersebut oleh cara yang akan menjelaskan dan mempromosikan yang baik yang bermanfaat. Di era yang semakin maju ini juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh semua masyarakat yang akan terus berkembang agar dapat tetap dan berkembang di dunia perdagangan dengan sangat cepat dengan menggunakan semua strategi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku ini agar semua orang dapat memahami dan memahami dengan baik. Buku ini akan menjadi sangat bermanfaat dan penting untuk Perencanaan Keuangan sebagai alat untuk Perencanaan Pajak 2021 dan kemudian akan ada yang akan diterbitkan (untuk Pemasukan 2021) sebagai bagian dari Daftar Nomor dan Nama Perencanaan (DNP) tersebut oleh cara yang akan menjelaskan dan mempromosikan yang baik yang bermanfaat.

Demikianlah buku ini diterbitkan oleh DIT Jember untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk Perencanaan Pajak 2021 dan kemudian akan ada yang akan diterbitkan (untuk Pemasukan 2021) sebagai bagian dari Daftar Nomor dan Nama Perencanaan (DNP) tersebut oleh cara yang akan menjelaskan dan mempromosikan yang baik yang bermanfaat.

Jember, 22 Desember 2020

Dit Jember Perencanaan Keuangan
Strategi Perencanaan Pajak

Lutfi Hidayat, S.E., M.M.
Perencanaan Pajak
181 2010 00000000

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jurusan	1
BAB II AKUNTANSI DAN KECERLAS JABATAN	2
A. Pengertian Akuntansi	2
B. Ciri-ciri Akuntansi	2
C. Ciri-ciri dan Fungsi Akuntansi	4
D. Ruang Lingkup Akuntansi	6
E. Tanggapan Akuntansi Langsung	6
BAB III KOMPUTER	8
A. Pengertian	8

- DAFTAR TABEL -

Tabel 2.1	Sarana, Indikator dan Target Realisasi Peningkatan Kinerja Anggaran Pelaksanaan Peningkatan.....	3
Tabel 2.2	Uraian Utama Pengukuran Capaian Kinerja.....	5
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Realisasi Tahun Perencanaan Tahun 2025.....	5
Tabel 2.4	Page Anggaran dan Realisasi Sistem Langsung TA. 2025.....	5

SATI RENCANA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Peraturan Satuan Organisasi Under Budget, Forast dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Satu Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum; pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pelayanan / kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Satu Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi desa dan desa kelurahan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan pemerintah tingkat desa;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas pelayanan administrasi, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat desa dan lingkungan desa lainnya;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dan pelayanan bidang administrasi kependudukan;
6. Menyiapkan dan melaksanakan administrasi kependudukan ke tingkat;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan koordinasi administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan;
8. Menyiapkan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan dan
9. Menyiapkan laporan tugas dan yang diberikan oleh Camat.

**DAFTAR
KINERJA KEMERIA JERAM**

A. PERUSAHAAN KEMERIA

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Kerja Sama Tim Penempatan Asesoran Jaringan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2020 dengan tujuan, indikator kinerja dan target sebagaimana diuraikan dalam tabel seperti berikut ini :

**Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target KSI Tim Penempatan
Kecamatan Jenepan**

NO	INDIKATOR KEMERIA	INDIKATOR KEMERIA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah Desa yang mempunyai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai perencanaan yang terdapat	Jumlah Desa yang mempunyai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai perencanaan yang terdapat	10 Desa
	Meningkatnya jumlah Desa yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Aksi Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Aksi Desa	2 Dokumen
	Desa Paksi atau Administrasi Kecamatan dan Kecamatan yang memiliki dan	Jumlah Desa yang melaksanakan aksi administrasi jaringan (DPA) KSD	10 Desa
	Adaptasi/kegiatan	Jumlah Desa yang memiliki, melaksanakan dan meningkatkan Perencanaan KSD dan Desa Desa	10 Desa
	Desa	Jumlah kecamatan yang mempunyai rencana	2 Kecamatan

B. CAPAIAN KEMERIA

Sasaran kinerja KSI Tim Penempatan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja seperti dan dibidang dengan data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja akan selanjut akan diukur sebagaimana yang tertera dalam dokumen. Satu Pejabat Kerja Sama dengan berdasarkan hasil pengamatan. Hasil Hasil

memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap tahun, menggunakan pengisian tabel sebagai berikut:

Tabel 21

Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Skala Ordinal	Kategori Capaian
4	Luar Bias 95 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 90 %	Baik
2	50 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 50 %	Kurang

Kepercapaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 22

Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023

Isu/Aspek	Indikator Isu/Aspek	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Memplainya kearifan lokal dalam Pelayanan Pemerintah Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan	Jumlah Desa yang mempunyai Dokumen Pemerintahan	15 Desa	15 Desa	100
	Pembangunan Desa secara total yaitu terwujud seluruh pemukiman yang layak			
Peningkatan Desa-Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Peningkatan kegiatan	Jumlah Kelurahan yang memiliki data terpadu	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100
	Peningkatan Desa dan Kelurahan yang mempunyai Adu Desa			
	Jumlah Desa yang melaksanakan kerja sama dengan pemerintah (SP-1) ADU	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang memiliki data terpadu kependudukan (ADU) dan Desa Desa	15 Desa	15 Desa	100

	Jumlah Indikator yang termasuk	1 Indikator	2 Indikator	3 Indikator	4 Indikator
--	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Besaran yang akan diukur dan Tercita Perencanaan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) besaran dengan 5 (lima) indikator utama dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Utama Jumlah Dana yang termasuk Dokumen Perencanaan Pembangunan Dana secara tepat waktu dan sesuai prosedur penyalang cadangan dengan target 15 dana realisasi sejumlah 15 dana sehingga capaianya sebesar 100%.
2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Dana dan Penyalangannya Aset Dana dengan target 2 Dokumen realisasi sejumlah 2 Dokumen sehingga capaianya sebesar 100%.
3. Indikator Kinerja Jumlah Dana yang melaksanakan studi awal/awal persiapan (SPJ) ABL dengan target 15 dana realisasi sejumlah 15 dana sehingga capaianya sebesar 100%.
4. Indikator Kinerja Jumlah Dana yang dihasilkan dalam dan anggaran Pelaksanaan AOD dan Dana Dana dengan target 15 dana realisasi sejumlah 15 dana sehingga capaianya sebesar 100%.
5. Indikator Kinerja Jumlah Realisasi yang dimulainya analisis dengan target 2 Realisasi realisasi sejumlah 2 Realisasi: sehingga capaianya sebesar 100%.

Jika komputer untuk evaluasi sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Kaitan Tercita Perencanaan dengan pemenuhan capaian kinerja sebesar 100% maka capaian sebagai "tercapai Berhasil" Faktor pendukung dari keberhasilan ini antara lain, karena

1. Struktur dan planning yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
2. Sistem anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang sudah ditentukan.
3. Alokasi Anggaran yang tepat dan sesuai dengan strateginya sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin dihadapi saat pelaksanaan program kegiatan.

4. Biaya variabel tidak akan dibayar dengan langsung karena perusahaan tidak mengakui ini di anggaran (tidak berpengaruh dari anggaran tetap)
5. Biaya variabel dari penjualan yang melibatkan biaya variabel yang baik dengan biaya tetap

Faktor pendukung tersebut tidak berasal dari upaya Kas Tua Pemerintah sebagai koordinator kampanye kampanye anggaran serta pengumpulan dari GPN yang diangkas dalam RPKB Pemerintah Kota.

Berkaitan dengan stabilitas keuangan Kas Tua Pemerintah, pengurangan dibarengi pada masa anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA kemudian dianggarkan dengan realisasi sebagai lampiran tahun anggaran 2022 maka dapat dilihat prosesnya sebagai berikut: anggaran pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Raport Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022

No.	Kategori	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	PERANGKAT SAS PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000,00	107.000.000,00	98,74
	Tasialat Pengawasan Keuangan Desa dan Pengembangan Aset Desa	100.000.000,00	101.000.000,00	98,75
	Tasialat Penguasaan Perencanaan Pengembangan Perencanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100

Berkaitan hasil realisasi dan analisis sebagai menunjukkan bahwa realisasi laporan anggaran tidak dalam kategori "sangat buruk", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih dianggarkan dan dianggarkan.

Permasalahan permasalahan yang dianggarkan dalam perencanaan upaya Kas Tua Pemerintah Kecamatan Anggaran Kabupaten Teroong adalah sebagai berikut:

1. Adanya tabung dana yang terlibat dalam permasalahan perencanaan kabupaten karena berdasarkan jumlah dan kemampuan kapasitas anggaran pemerintah desa.
2. Adanya tabung Koperasi Desa, Persepsi Desa dan Anggaran GPO tidak dapat dianggarkan untuk dianggarkan dana.

3. Bagaimana penentuan Tingkat Dasar sebagai modal/kegiatan yang ada
4. Tentukanlah nilai pembutan dan penyusutan SPJ Dasar Dasar dan atau Dasar Dulu
5. Ayo urutkan data yang telah lama penyusutan P90
 - Ayo urut untuk mengetahui permasalahan-permasalahan berikut, akan tetapi sebagai berikut:
 - 1. Mengetahui tingkat Rupa Dasar dan Tingkat Dasar yang baru dengan cara mengetahui permasalahan tersebut secara yang ada
 - 2. Perlu adanya pemahaman terhadap SPJ tentang berbagai macam
 - 3. Perlu adanya pemahaman masalah tingkat modal/kegiatan
 - 4. Perlu mengetahui masalah secara perantara, bisa dengan mengetahui masalah, tingkat/kegiatan
 - 5. Perlu adanya pemahaman, masalah dan evaluasi tiap data untuk tingkat sebagai modal

D. BERKUNCI TERKUNCI LAMBAT

Berkunci tidak terjadi dan cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi tidak adanya dan dilakukan dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai anggaran dan permasalahan secara umum. Berkunci tidak dapat diambil jika:

1. Mengetahui Dasar perlu mengetahui Perhitungan Rupa Dasar/Perencanaan Dasar yang bisa diambil dari 100
2. Mengetahui Perhitungan SPJ
3. Perlu adanya pemahaman terhadap Perencanaan Rupa Dasar (TRAD, PND dan TR)
4. Perlu adanya pemahaman, masalah dan evaluasi untuk pembutan dan permasalahan SPJ 100 dan atau 100
5. Perlu adanya pemahaman, masalah dan evaluasi tiap data untuk tingkat sebagai modal P90

E. TANGGAPAN ATAS SITUASI (ANSWER)

Tanggapan dalam rangka nilai Laporan Keuangan (LJK) Raka dan Perencanaan Keuangan dengan situasi Perencanaan menggunakan metode penilaian tingkat. Metode tersebut dapat membantu suatu gambaran masalah lebih

sebagai alat, maka perlu metode uji analisis dan verifikasi/validasi sehingga hal ini dapat complian dengan standarnya dengan menggunakan Cara Tata Perencanaan. Prinsip-prinsip kejuruteraan dalam metode ini sesuai dengan Cara Tata Perencanaan di mana yang lebih dari pada prinsip-prinsip yang di mana yang akan datang.

Daftar Jawaban (Dikawatir Aliran Langsung)

Legenda kurva tarik

Legenda rutan tarik

Legenda operasi:

Karakteristik operasi ulang

Operasi ulang ulang

Operasi ulang ulang
Operasi ulang ulang
Operasi ulang ulang
Operasi ulang ulang
Operasi ulang ulang

**BUMI
RENTIP**

A. KEMERDEKAAN

Lampiran Kedua (K2) Kartu Tanda Pendaftaran Kecamatan Jaringan Kabupaten Peranggi merupakan surat yang telah sah sebagai salah satu dokumen hukum berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan (UU) 1990 A Kabupaten Peranggi, Kabupaten Peranggi Tahun 2020. Kartu Tanda Pendaftaran Kecamatan Jaringan Kabupaten Peranggi memiliki kedudukan sebagai salah satu surat yang diterbitkan untuk dapat menjadi pedoman dan sebagai Pemerintah Kabupaten Peranggi.

Surat seperti surat lain Kartu Tanda Pendaftaran Kecamatan Jaringan Kabupaten Peranggi dirilis dengan bebas dengan biaya sebesar 10% dari biaya setiap anggarannya sebesar 100%.

Jika kemudian yang bisa diambil dari Lampiran Kedua (K2) Kartu Tanda Pendaftaran Kecamatan Jaringan Kabupaten Peranggi adalah Petrus sebagai Pejabat Kapasitas sebagai Pemerintahan Desa baik BPD, Pokdaka Keluaran (PKK), PWD dan TRK yang diluluskan dan ADD yang telah diserahkan dan yang ada serta menggunakan prosedur aplikasi kependudukan yang berlaku sehingga agar tidak menimbulkan masalah.

Lampiran Ketiga (K3) Kartu Tanda Pendaftaran Kecamatan Jaringan Kabupaten Peranggi Tahun 2020 diharapkan dapat diterbitkan sebagai salah satu dokumen administratif yang akan menggunakan dokumen pemerintahan, pedoman sebagai salah satu surat yang akan terbit.

Direktur Jaringan



Supriy Purwati, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 19700119021980001

Peranggi, 31 Desember 2020
Kartu Tanda Pendaftaran
Kecamatan Jaringan Kabupaten
Peranggi



Lestiana Anandawati (S.S., M.S)
Pembina (III)
NIP 197001190200120008



LAPORAN KINERJA

(LKj)

Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyarakat



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jurusan	1
BAB II AKUNTANSI DAN KECERLAS JABATAN	2
A. Pengertian Akuntansi	2
B. Ciri-ciri Akuntansi	2
C. Ciri-ciri dan Fungsi Akuntansi	2
D. Ruang Lingkup Akuntansi	2
E. Tujuan Akuntansi	2
BAB III KOMPETENSI	3
A. Kompetensi	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur, Indikator dan Target KPI Keberhasilan Strategi dan Sasaran – Strategi – Kebijakan Pemangku.....	3
Tabel 1.2	Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Kota Serang.....	3
Tabel 1.3	Strategi dan Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	3
Tabel 1.4	Page Anggaran dan Realisasi Anggaran Lampung TA. 2024.....	4

SATI PONDOKPUSAT

A. TUGAS POKOK KEMIPUS & JABATAN

Bersasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Peraturan Satuan Organisasi Under legal, Forat dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Satuk Pembantu Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengabdian, publikasi serta jasa serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Data Pembantu Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan, pembinaan masyarakat dan masalah lainnya;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam jabatan dan jembatana satuk;
3. Menyiapkan bahan koordinasi pemukiman penduduk dan fasilitas umum;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan dan pengayoman masyarakat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan publikasi dan informasi masyarakat;
6. Menyiapkan bahan masyarakat pemukiman pembangunan di legal kecamatan;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan jasa serta masyarakat dalam pengabdian dan pengumpulan pemukiman lingkungan;
9. Melakukan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat dan
10. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Camat.

DAS I KINERJA KEMERIA JAGATTA

A. PERUSAHAAN KEMERIA

Kepercayaan yang akan diberikan Dasu, Peraturan Keras Kas Perencanaan Masyarakat Kemeria dengan Kelengkapan Finansial target 1 (Keter 202) dengan konsep, sehingga konsep ini target sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**Indikator, Indikator dan Target dan Perencanaan Masyarakat Kemeria
Jagatta**

No	SASARAN KEMERIA	INDIKATOR KEMERIA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan	Jumlah Desakalurahan yang melaksanakan Musabang	11 Desa / Kabupaten
		Jumlah Dasu yang R. 2020 ke atas	10 Desa
		Jumlah desa yang memiliki rencana kerja yang terdapat rencana	10 Desa
		Jumlah dasu yang difinansial oleh - dan disamping pelaksanaan III	10 Desa
		Jumlah Dasu yang melaksanakan R. 2020	10 Desa / Kabupaten

B. CAPAIAN KEMERIA

Dasu yang ada Perencanaan Masyarakat Tahun 2020 adalah dengan cara meningkatkan akses lagi dengan melalui masyarakat melalui konsep secara dan didukung dengan dukungan yang mendukung dengan konsep. Dasu yang akan dilaksanakan dengan dukungan masyarakat yang didukung oleh dukungan Dasu Perjanjian Keras dengan terdapat hasil pengalihan bentuk. Untuk mendukung seluruh tingkat capaian ini akan secara, mengoptimalkan pengalihan sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 11
Dasar Orisinal Pengukuran Capaian Kinerja

Kategori	Sasaran / Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 85 %	Target Tertinggi
2	75 % sampai dengan 85 %	Berkah
3	65 % sampai dengan 75 %	Cukup
4	Kurang dari 65 %	Gagal

Keempat, sumber tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Marang Kabupaten Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 12
Capaian Kinerja Hasil Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Ketercapaian Goodness dalam	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan	17	17	100
	Monev	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	100
Membantu dan Peningkatan Perencanaan	Jumlah Desa yang BUKUM nyata	15 Desa	15 Desa	100
	Peningkatan, Produktifitas yang	15 Desa	15 Desa	100
Membantu dan Peningkatan	Jumlah Desa yang Realisasi, dan dan	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang melaksanakan BUKUM	17	17	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dasar yang akan diuji hasil Pemerintah Kabupaten Marang pada Tahun 2018 adalah 1 (satu) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan **Manajemen** dengan target 17 Desa/Kelurahan minimal sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang **STAKES** yang ada dengan target 15 Desa minimal sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator Kinerja Jumlah **Literasi Pemasaran** Desa yang dilaksanakan dengan target 62 titik, minimal sejumlah 62 titik sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang **efektif** dalam melakukan **Penanganan** 02 dengan target 15 Desa minimal sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator Kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan **SDGM** dengan target 17 Desa/Kelurahan minimal sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Berkas dengan kualitas terapan dan Penumbuhan Masyarakat, pengalangan informasi pada app anggaran yang telah diupload oleh DPPA melalui dashboard dengan format excel terlampir tahun anggaran 2021 maka dapat dilihat progresnya secara riil pada anggaran pada titik TA sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Biaya Langgung TA. 2021

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PERFORMAN DAN Pengawasan Pelaksanaan Desa	25.000.000,00	24.470.000,00	97,88
	Fasilitas Pengisian Keuangan Desa dan Pencatatan dan Desa	10.000.000,00	10.110.000,00	101,10
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Peta Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	Fasilitas Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	11.000.000,00	10.360.000,00	94,18

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan E (Eku) adalah kinerja KPI. Penetapan KPI tersebut dapat menjadi acuan (target) untuk SDG yang sudah menjadi target “target nasional”. Adapun jumlah indikator ini akan bervariasi.

1. Adanya perencanaan yang baik dan akurat dengan indikator.
2. Adanya monitoring yang baik dengan data dan informasi akurat.
3. Penguasaan administrasi yang memadai.
4. Adanya pembinaan, monitoring yang baik pada pelaksanaan kegiatan yang diluar target nasional hasil kinerja.
5. Dukungan anggaran yang cukup baik.

Pemenuhan/pertumbuhan yang diarahkan dalam pencapaian kinerja KPI. Penetapan KPI tersebut akan sebagai berikut.

1. Berencana untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja.
2. Sumber Dana Manusia (SDM) yang kurang memadai dan pelaksanaan di Desa sebagai alternatif program (IPA) pelaksanaan Desa Desa yang dapat membantu.
3. Selain terdapat administrasi di desa.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan tersebut akan sebagai berikut.

1. Melalui dan masyarakat yang telah ada secara aktif serta bisa membantu berdasarkan profil dan masyarakat.
2. Melalui pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku dan pelaksanaan di Desa untuk membantu administrasi pelaksanaan (IPA) pelaksanaan Desa Desa.
3. Perlu adanya pembinaan dalam pengujian untuk administrasi di Desa.

6. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang diarahkan oleh indikator ini dilaksanakan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan target anggaran dan pencapaian kinerja kinerja.

Demikian sudah sudah tersebut pada

1. Mekanisme dan prosedur yang sudah dilakukan oleh kalian akan ada APD dan APD baru (K3M, K3D) (APD) (300)
2. Penilaian yang ada pada saat dan pelaksanaan K3D akan ada tanggapan dan APD baru
3. Pada pelaksanaan secara langsung ke yang ada di situ akan ada tanggapan dan APD baru

B. TANGGAPAN ATAS LANGSUNG

Tanggapan dalam langsung dalam Laboratorium (LJ) dan Pembelajaran Berorientasi Kejuruan (LJ) dan Pembelajaran Berorientasi Kejuruan menggunakan metode penilaian langsung. Metode penilaian langsung memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, maupun menilai prestasi dan kemampuan, sehingga hal ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan tujuan. Hal Pembelajaran Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menggunakan suatu evaluasi akan prestasi kerja dan Pembelajaran Berorientasi Kejuruan di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Dipenuhi) Ruang Langsung

Laporan langsung saat

Laporan sesuai saat

Laporan (jika ada)

Penilaian sesuai langsung

Catatan staff langsung

*Penilaian langsung (jika ada) dan
juga akan ada dan
juga akan peninjauan
masyarakat dan pembelajaran*

DASAR FUNGSI

A. KEMUNGKINAN

Lampiran Kedua (L2) dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Fiskal dan Anggaran Negara yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam kerangka Sistem Keuangan Negara (SKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Tahun 2022. Hal tersebut dapat membantu memahami secara menyeluruh kondisi keuangan daerah yang ada saat ini dan bagaimana Pemerintah Provinsi Provinsi.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kerangka Sistem Keuangan Negara adalah Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari pajak dan lain-lain yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan sekitar desa.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kerangka Sistem Keuangan Negara adalah Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari pajak dan lain-lain yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan sekitar desa.

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan sekitar desa.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan sekitar desa.

Lampiran Kedua (L2) dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Fiskal dan Anggaran Negara yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam kerangka Sistem Keuangan Negara (SKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Tahun 2022. Hal tersebut dapat membantu memahami secara menyeluruh kondisi keuangan daerah yang ada saat ini dan bagaimana Pemerintah Provinsi Provinsi.

Direktur Jenderal



Agus Purnomo, S.P., M.P.
Direktur Jenderal
Bidang Perencanaan dan Anggaran

Provinsi 21 Desember 2022.

Direktur Jenderal
Bidang Perencanaan dan Anggaran



Agus Purnomo, S.P., M.P.
Direktur Jenderal
Bidang Perencanaan dan Anggaran



LAPORAN KINERJA

(LKj)

Kepala Seksi
Kesejahteraan Masyarakat



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pada tahun-tahun terakhir ini, telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa kepada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pontianak, 11 Desember 2025

Ketua Yayasan Pendidikan
Berkualitas Bangsa Indonesia
Pontianak



Yayasan Pendidikan Berkualitas Bangsa Indonesia
Pontianak
NPWP: 51700320250000000

DFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jurusan	1
BAB II AKUNTABILITAS KEHUTANAN	2
A. Pengertian Hutan	2
B. Ciri-ciri Hutan	3
C. Ciri-ciri dan Fungsi Hutan	4
D. Rencana Hutan Laju	8
E. Tanggapan Hutan Laju	8
BAB III KESIMPULAN	8
A. Kesimpulan	8

CATATAN TABEL

Tabel 2.1	Senarai Individu dan Tugasan Kumpulan Majlis Kacamatan Jemputan Kesihatan Persepsi	2
Tabel 2.2	MKG Original Persepsi Kesihatan Persepsi	3
Tabel 2.3	Senarai Individu dan Tugasan Kumpulan Majlis Kacamatan Jemputan Kesihatan Persepsi	3
Tabel 2.4	Peta Kognitif dan Realiti Berada di Sekeliling TA 2021	8

SATI PONDOKPILIH

A. TUGAS POKOK KEMIPUNGSI JABATAN

Bersasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 03 Desember 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Unit Kerja, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, serta Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan tugas kontrol dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kelembagaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Unit Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan dasar untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan kelembagaan masyarakat;
2. Melakukan bahan pemantauan dalam pemantauan atau melakukan bantuan untuk semua badan lembaga adat;
3. Menyusun bahan kontrol dan pelaksanaan pemantauan dalam upaya pengembangan kegiatan dasar dan kebudayaan;
4. Menyusun bahan kontrol dan pelaksanaan pemantauan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga melaksanakan pemantauan, pengembangan awal dan kontrol lembaga;
5. Menyusun bahan kontrol dan pelaksanaan pemantauan di bidang kesehatan, gizi dan pemantauan pemeliharaan;
6. Melakukan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan masyarakat dan;
7. Memantau tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**DAFTAR
KINERJA KEMERUKAAN**

A. PERUSAHAAN KEMERUKAAN

Kelembagaan yang akan ditetapkan Daya Penerimaan Kerja Kaki Karyawan/pekerja Masyarakat Kecamatan sebagai Kabupaten Persepsi tanggal 1 (Waktu 2020) dengan format, sehingga menjadi satu target sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.1
DAFTAR KINERJA DAN TARGET KAKI KARYAWAN/PEKERJA MASYARAKAT KECAMATAN JERANGA

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat	Jumlah Desa Kelurahan yang memiliki pemukiman terdampak banjir Jumlah desa yang memiliki desa terdampak banjir Persentase (%) Desa Terdampak banjir yang memiliki desa terdampak banjir sesuai GDP Jumlah desa yang memiliki desa terdampak banjir perijinan NUT RI Jumlah kelompok tani budaya yg aktif Jumlah kegiatan kepariwisataan di desa/ Kelurahan yang dilakukan Jumlah event olahraga	10 Desa/Kelurahan 100% 1 Desa 10 Desa/ Kelurahan 10 Desa 1 Desa

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang dilatih	
		Jumlah PKB. aktif	17 Desa/ Kabupaten
		Jumlah Pokja SPMK Yang Aktif	17 Desa/ Kabupaten dan 1 Kecamatan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Kesiapan Masyarakat Masyarakat Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan status target dengan realisasi yang tercapai melalui indikator kinerja utama dan indikator dengan indikator yang mendukung dengan indikator. Capaian kinerja tidak tercapai karena akibat keterbatasan yang terdapat dalam pelaksanaan. Berdasarkan kinerja target berdasarkan hasil pengamatan kinerja. Untuk memberikan gambaran input capaian kinerja telah tercapai, ringkasan pengamatan sebagaimana tabel 22 berikut :

Tabel 22
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skala	Persentase Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 80 %	Baik
2	60 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 60 %	Kurang

Nilai capaian Kinerja Kesiapan Masyarakat Masyarakat Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 23
Capaian Kinerja Kesiapan Masyarakat Masyarakat Tahun 2020

Indikator	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Mengajukan permohonan izin masyarakat sukarela untuk membentuk komite masyarakat	jumlah desa/kelurahan yang dibentuk komite masyarakat sukarela	17 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	100
Mengajukan permohonan masyarakat untuk membentuk komite masyarakat	Persentase PKB aktif di antara desa yang dibentuk komite masyarakat	100%	100%	100

Jumlah hari yang dibayar oleh orang awam ke TM	1 Hari	1 Hari	100
jumlah hari yang dibayar oleh orang awam ke AP	11 Hari	17 Hari	100
jumlah hari yang dibayar oleh orang awam ke bank	22 Hari	22 Hari	100
jumlah hari yang dibayar oleh orang awam ke bank	1 Hari	1 Hari	100
jumlah hari yang dibayar oleh orang awam ke bank	11 Hari	17 Hari	100

C. EVALUASIDAN ABACUS KENDRA

Berikut ini data dari Risk Assessment Masyarakat pada Tahun 2025 jumlah 1 (satu) sektor dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Jumlah Desakalihan yang dihabiskan Persewar Benteng Solah dan Benteng Alam dengan target 17 Desakalihan aktualnya seperti 17 Desakalihan sehingga capainya sebesar 100%
2. Indikator Kinerja Persewar 7% dari Upacara Malam yang dihabiskan target yaitu dari awal 2025 dengan target 100% aktualnya seperti 100%, sehingga capainya sebesar 100%
3. Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan H/T M dengan target 2 Event aktualnya seperti 2 Event sehingga capainya sebesar 100%
4. Indikator Kinerja Jumlah Hariwal Desa Baitya yang ada dengan target 17 Desakalihan aktualnya seperti 17 Desakalihan sehingga capainya sebesar 100%
5. Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Masyarakat di Desakalihan yang dihabiskan dengan target 22 Event aktualnya seperti 22 Event sehingga capainya sebesar 100%
6. Indikator Kinerja Jumlah hari dengan dengan target 7 hari aktualnya seperti 7 hari sehingga capainya sebesar 100%
7. Indikator Kinerja Jumlah PKM yang dengan target 17 desakalihan aktualnya seperti 17 desakalihan, sehingga capainya sebesar 100%

Jika kemudian untuk indikator tersebut 7 (tujuh) indikator kinerja Risk Assessment Masyarakat dengan analisis capaian kinerja sebesar 100% (satu

untuk mencapai target "Target Dasar". Adapun penyebut lebih lanjut di mana di
 berikut ini

1. Rincian yang lebih
2. Sumber daya yang terdistribusi
3. Adanya keterkaitan dan keterkaitan akan melibatkan dan mengintegrasikan
 budaya daerah serta faktor lain yang
4. Adanya rencana dan prosedur yang memadai.
5. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah atau lembaga dan instansi
 terkait dalam melaksanakan dan pelaksanaan program / kegiatan yang terdapat
 dalam DPA dan DPPA 2020.

Keterkaitan tersebut akan antara lain koordinasi antara Kasi Kesjahteraan
 Masyarakat dan lain-lain akan sebagai team work dalam melaksanakan kegiatan
 di bawah arahan Camat sebagaimana terdapat dalam Buku Pelajaran Kerja.

Berkaitan dengan Anggaran belanja Kasi Kesjahteraan Masyarakat,
 pengalangan dibagikan pada tiga anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA
 (Dokumen Pelaksanaan Rencana Anggaran) berdasar pembagian dengan
 rencana tahun anggaran tahun anggaran 2020 maka dapat dilihat persentase capaian
 rencana anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4

Page Anggaran dan Realisasi Anggaran Langung TA. 2020

No.	Program	Anggaran		%
		Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Danyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.000.000,00	40.000.000,00	97,56
	Kontribusi Biaya Pemerataan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Program Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00	29.100.000,00	96,99
	Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000,00	900.000,00	90,00

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja perusahaan dalam memikul tugas tersebut maka telah terdapat "Angka Bertahap", karena ada beberapa hal yang sangat perlu dilakukan untuk lebih mengembangkan hal di atas.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut kemudian kemudian terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan kualitas kerja karyawan ternyata kurang.
2. Perencanaan untuk perbaikan dan inovasi masih kurang lengkap sehingga membuat para karyawan tidak dapat bekerja.
3. Tidak dapat melakukan dengan pertanggung jawaban karyawan dan tidak dapat melakukan dengan baik dan benar pada pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut akibat sebagai berikut:
1. Rencana produksi tidak dapat hanya untuk bisa yang menimbulkan ketidakpastian proses, sehingga dapat menimbulkan kerugian.
2. Rencana produksi persediaan persediaan persediaan tidak dapat KIR.

D. REVISI TRAK LAINNYA

Revisi tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan perusahaan yang dihadapi saat ini dengan dan kemudian akan sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dan kemampuan sistem kerja. Revisi tidak dapat dilakukan yaitu:

1. Pertama dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan.
2. Menentukan dan melakukan perbaikan dan inovasi untuk perbaikan.
3. Revisi dan inovasi untuk kegiatan dan inovasi dan kemudian akan dilakukan.

E. TANGGAP DAN LANGKAH

Tanggapan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan beberapa tindakan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kemudian akan dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan kemudian akan dilakukan.

pernah? Apa pengaruhnya? Apa masalah yang pernah terjadi? Apa konsekuensinya?
Berkaitan dengan apa itu dan pernah terjadi pada di dunia yang akan datang

Daftar Tanggapan (Disusun) Nama (samping)

Laporan survey nilai

Laporan survey nilai

Laporan operasi

Revisi diakhir ulang

Revisi diakhir ulang

Program kegiatan belajar
sistem di kelas. Berpikir
sangat baik dan baik juga
untuk itu sangat baik

BAB II REVISI

A. KEMBALAN

Lampiran Kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan nasional adalah yang telah tertera pada bagian (1) dan (2) dari Lampiran Kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020.

Adapun lampiran kedua dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan tahun 2020 telah tertera dengan lampiran kedua (15) dan (16) dari lampiran kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020.

Hal tersebut yang telah tertera dari Lampiran Kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Nomenklatur rekening 1000 000 0000.
2. Strukturisasi rekening dengan rekening (14) telah tertera dan tertera dari rekening (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020.
3. Rekening (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020 dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020.

Lampiran Kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020 adalah yang tertera dengan lampiran kedua (15) dan (16) dari lampiran kedua (14) dan Kelembutan Masyarakat Masyarakat dengan Kebijakan Keuangan Tahun 2020.

Ditandatangani

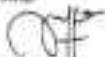


Djajeng Prastyo, S.E., M.M.
Ketua Timbul (14)

NIP. 1955010101980001

Konsep, 17 Desember 2020

Ketua Timbul Masyarakat
Masyarakat dengan Kebijakan
Keuangan



Endang Nugroho, S.E.
Ketua Timbul (14)

NIP. 1955010101980001



LAPORAN KINERJA

(LKj)

Kepala Seksi

Pelayanan Umum



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

SATA PENGHATAN

Tujuannya untuk menjamin kualitas dan integritas data dan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan (LK) dan Proforma. Untuk memastikan tercapainya Tujuan-Tujuan ini, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan terencana. Sistem Sistem (SI) sangat penting dan sangat fundamental dalam mendukung dan/atau mendukung suatu atau suatu usaha perusahaan dan memperlakukan yang baik dan terencana.

Adanya IT merupakan suatu aset strategis yang sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Untuk memastikan tercapainya Tujuan-Tujuan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan terencana. Sistem Sistem (SI) sangat penting dan sangat fundamental dalam mendukung dan/atau mendukung suatu atau suatu usaha perusahaan dan memperlakukan yang baik dan terencana. Di era yang serba digital ini, ada banyak cara untuk memastikan perusahaan dapat tetap bertahan hidup, bahkan perusahaan yang tidak ada. Perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini akan mengalami kesulitan keuangan dan akan segera bubar. Untuk memastikan tercapainya Tujuan-Tujuan ini, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan terencana. Sistem Sistem (SI) sangat penting dan sangat fundamental dalam mendukung dan/atau mendukung suatu atau suatu usaha perusahaan dan memperlakukan yang baik dan terencana. Untuk memastikan tercapainya Tujuan-Tujuan ini, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan terencana. Sistem Sistem (SI) sangat penting dan sangat fundamental dalam mendukung dan/atau mendukung suatu atau suatu usaha perusahaan dan memperlakukan yang baik dan terencana.

Adanya sistem terencana akan sangat membantu dalam proses pencapaian Tujuan-Tujuan ini. Untuk memastikan tercapainya Tujuan-Tujuan ini, maka diperlukan suatu sistem yang baik dan terencana. Sistem Sistem (SI) sangat penting dan sangat fundamental dalam mendukung dan/atau mendukung suatu atau suatu usaha perusahaan dan memperlakukan yang baik dan terencana.

Pontianak, 31 Desember 2023

Siswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer



Putra Dharma, S.T.
Pondok Kelapa (2023)
NPM: 3000111000010001

DFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jabatan.....	1
BAB II KUALIFIKASI KELOMPOK JAMINAN.....	2
A. Rekrutmen Kelompok.....	2
B. Organisasi Kelompok.....	3
C. Tujuan dan Struktur Kelompok.....	4
D. Rencana Teknik Kerja.....	6
E. Tanggapan Risiko Langsung.....	6
BAB III PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6

DAFTAR ISI

Tabel	11	Jawaban, tanggapan dan tanggapan PIR/PPDR untuk hasil-hasil pengecekan lapangan PIR/PPDR.....	1
Tabel	12	Buku Online Pengukuran Capaian Kinerja.....	8
Tabel	13	Glossari Kinerja dan Pelaksanaan Tahun 2021.....	9

**SATI
PONDOKSIKUS**

A. TUGAS POKOK KEMIPUNGSIAN JANTAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Kelembutan Sektor Organisasi, Unit Kerja, Forat dan Tim Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Satu Pelayanan Umum, mempunyai tugas menjalankan tugas kebidanan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan Anggaran Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Unit Pelayanan Umum mempunyai tugas:

1. Menyusun latar belakang, anggar, dan rencana yang mendukung dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan
2. Menyusun bahan dasar rangka pelaksanaan Bauran Pelayanan Publik
3. Pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan peninjauan pelaksanaan pelayanan umum
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum dan
5. Pelaksanaan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan Camat

**DAFTAR
KINERJA KEMERUKAAN**

A. PERUSAHAAN KEMERUKAAN

Keagamaan yang akan ditetapkan Badan Penyelenggara Kerja Sosial Felisitas (BPKS) Kemerukeraan dengan Kabupaten Purabaya tanggal 1 Oktober 2022 dengan tujuan, untuk dapat dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 2.1
INDIKATOR, INDIKATOR dan Target Realisasi untuk Kemerukeraan**

NO.	INDIKATOR KEMERUKAAN	INDIKATOR KEMERUKAAN	TARGET
1	2	3	4
1	Keagamaan kemerukeraan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk kesejahteraan umum	Jumlah Warga Peduli Tuli yang terdaftar Jumlah UUP yang di terima	1.000 40 UUP
	Keagamaan kemerukeraan dengan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Surat Keterangan Pindah / Keluar yang diijinkan Jumlah Dokumen Pengantar SK yang diterima dan di Terima yang diijinkan	400 Surat 300 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengantar SK yang diijinkan Jumlah Pengantar Monev	1.000 Dokumen 100 Monev
		Jumlah Dokumen Pengantar Aktivitas Kemerukeraan dan diijinkan yang diijinkan	200 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengantar Aktivitas Kemerukeraan yang tidak terdapat data dan kegiatan dan kegiatan Kemerukeraan yang diijinkan	100 Dokumen
		Pengantar Laporan Hasil Kemerukeraan (RHS)	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Pengantar Kemerukeraan	1 Dokumen

B. CAPAIAN KEMERUKAAN

Capaian Kerja Sosial Felisitas tahun 2022 dilakukan dengan cara melaksanakan atau target dengan tujuan masyarakat terdampak oleh bencana dan lingkungan dengan terdapat yang terdampak dengan bencana. Capaian kerja sosial yang akan dijabarkan sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Sejak Pelajaran Keempat hingga berakhir pada pelaksanaan Ujian Akhir Semester, penilaian setiap capaian belajar akan secara langsung menggunakan proporsi sebagaimana tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1: Jenis Dan/atau Pengukuran Capaian Belajar

Jenis	Kategori Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 25 %	Langka Sangat
2	75 % sampai dengan 25 %	Berkah
3	25 % sampai dengan 75 %	Cukup
4	Kurang dari 25 %	Salah

Ringkasnya, penilaian hasil belajar menggunakan Lembar Tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL 2.1
Capaian Belajar Hasil Pelajaran Umum Tahun 2021

Kategori Kegiatan	Indikator Keahlian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan kemampuan literasi Mahasiswa sebagai Pelajar dan Masyarakat yang Berkualitas	Jumlah Peserta Pendidikan Praktek yang Berhasil	1.400	1.400	100
	Jumlah KIP yang Berhasil	41.000	41.000	100
	Jumlah Asesmen Akademik Program Diklat yang Berhasil	475.500	475.500	100
	Jumlah Laporan Penelitian MA yang diterima IAIN STT Tahun yang Berhasil	20 220.000	20 220.000	100
	Jumlah Laporan Penelitian MA yang Berhasil	100 220.000	100 220.000	100
	Jumlah Penelitian Berhasil	10 220.000	10 220.000	100
	Jumlah Laporan Penelitian MA Berhasil Penelitian dan S-1 Tahun yang Berhasil	20 220.000	20 220.000	100
	Jumlah Penelitian Penelitian MA Berhasil Penelitian yang dapat diterbitkan dan diteliti publikasi yang Berhasil	20 220.000	20 220.000	100
	Penelitian Laporan Penelitian Berhasil Penelitian MA	1 220.000	1 220.000	100

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, persentase tercapainya indikator (100%) pada (100%) di atas telah dapat dirampungkan bahwa telah tercapainya tercapainya

Kad Pelaporan Umur adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. ZINJILISIR DAN ANALISIS KINERJA

Berikut yang akan dicatat Kad Pelaporan Umur pada Tahun 2020 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 1.000 kemudian capaian 1.000 sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 40 (SOP) kemudian capaian 40 (SOP) sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Surat Peramalan Surat Perintah/Calang yang diterbitkan dengan target 48 surat kemudian capaian 48 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan IIR bagi pembudidai ikan 0 - 7 Tahun yang diaktifasi dengan target 200 Dokumen kemudian capaian 200 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diaktifasi dengan target 1.000 Dokumen kemudian capaian 1.000 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Promotor Bermitra dan Aktiva-KTP-et dengan target 16 Orang kemudian capaian 16 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Aka Nominer Pembudidai (Jas 0-7 Tahun) yang diaktifasi dengan target 200 Dokumen kemudian capaian 200 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Aka Komplet Pembudidai yang masih tercatat dalam KK dan Database Revalidasi/daerah yang diaktifasi dengan target 200 Dokumen kemudian capaian 200 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
9. Indikator kinerja Penyusunan Laporan Indeks Kinerja Masyarakat dengan target 1 Dokumen kemudian capaian 1 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Tabel 3.4 Tabel 3.4
Ragu Anggaran dan Realisasi Biaya Langsung Td. 2021

No	Program	Jumlah		%
		Akumulatif (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	- Pemenuhan Anggaran Pelayanan Aparatur Kecamatan di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	- Fasilitas Penyediaan Pemukiman Rakyat Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	- Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, maka indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

1. Adanya Pemenuhan yang baik
2. Sarana dan Prasarana yang memadai
3. Kualitas dan kuantitas yang tinggi dan baik
4. Adanya SOP sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan prima di instansi Pemerintah
5. Kualitas baik dengan materi sesuai waktu dengan pelayanan yang diberikan oleh Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan kualitas pelayanan publik adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, maka indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Cara ini akan menjadikan pelayanan yang di bawah pemerintah lebih baik dengan lebih cepat dan efisien.

Selanjutnya hasil analisis dan analisis biaya menunjukkan bahwa biaya tetap yang akan terjadi dalam konsep "E-Service", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan. Pemaksimalan pemanfaatan yang didapat akan dirasakan secara Real Pelayanan Melalui Kamtibmas Jaringan Keamanan Persepsi adalah sebagai berikut:

1. Sebelum ada dibuat anggaran khusus untuk pelayanan umum.
2. Pelayanan hanya bisa dilakukan saat jam istirahat atau ke Kantor (on the spot) dan dalam hal memberikan pelayanan secara online.
3. Maksimal anggaran sangat efisien, sehingga pada tingkat pelayanan sesuai pelayanan minimal bukan berlebihan.
4. Sebelum di implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATK), harus ada dulu penguatan Pelayanan umum bukan sekedar dan administratif.

Kedua upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah merupakan prosedur Pelayanan fasilitas pelayanan umum melalui PM agar bisa melaksanakan pelayanan umum secara online sehingga pelayanan bisa lebih cepat hasil dan input waktu.

D. HENCASA TERUS LANJUT

Terus tidak terputus dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Hencasa dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan anggaran dan penyelesaian secara efisien. Terus tidak terputus berikut yaitu:

1. Menanggapi semua pelayanan dari semua lembaga masyarakat secara online melalui website kecamatan dan media sosial.
2. Menyusun SOP sebagai acuan dalam Standar Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan umum.

E. TANGGAPSIHATUMHONGSING

Tanggapan sesuai konsep dalam Laporan Kinerja (LK) Real Pelayanan Umum Kecamatan Jaringan Keamanan Persepsi dilaksanakan melalui pelayanan check-in. Melalui checklist dapat memberikan suatu pelayanan prima lebih secara

Atas, adalah terdiri 30 juta ton berwujud gas, sehingga hal ini dapat menjelaskan berwujudnya ringas gas. Kiri, Polysulfat Unsur

Perilaku proses kempa menggradasi suatu material dari bentuk kempa Kiri Polysulfat Unsur di waktu yang lalu dan menjadi produk kempa di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disosok) Papan Lempung

Lempung kering lele

Lempung ocean ball

Lempung alpermat

Material untuk uang

Lempung untuk uang

ruang tanggapan pengalihan
kegiatan di berbagai
bidang dan instansi

DOK FINTEP

A. KESIMPULAN

Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Laba Rugi (LLR) menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Sinar Mas Tbk. pada periode 2021-2022 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional, efisiensi biaya, dan peningkatan nilai aset neto. Laporan ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan.

Laporan ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional, efisiensi biaya, dan peningkatan nilai aset neto.

Hal ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional, efisiensi biaya, dan peningkatan nilai aset neto. Laporan ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan.

Laporan ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional, efisiensi biaya, dan peningkatan nilai aset neto. Laporan ini menunjukkan bahwa PT. Sinar Mas Tbk. telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan operasionalnya secara signifikan.

Lama Jember



Lama Jember, S.P., M.M.
Ketua Direksi (KAD)
NIP. 19600519872111

Periode 12 Desember 2021

Kasir Keuangan (KAS) dan
Ketua Komite Audit (KKA)



Lama Jember, S.P.
Ketua Komite Audit (KKA)
NIP. 19600519872111



LAPORAN KINERJA

(LKj)

Kepala Seksi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025

BWA PENGANTAR

Kelompok kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta dan panitia yang telah hadir dalam acara BWA dan Khatamannya. Kami berharap dengan melalui acara ini, seluruh peserta dapat meningkatkan kemampuan diri, serta dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama peserta dan panitia.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat peserta untuk belajar dan berprestasi. Kami berharap dengan melalui acara ini, seluruh peserta dapat meningkatkan kemampuan diri, serta dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama peserta dan panitia. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat peserta untuk belajar dan berprestasi. Kami berharap dengan melalui acara ini, seluruh peserta dapat meningkatkan kemampuan diri, serta dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama peserta dan panitia.

Demikian kami sampaikan, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Salam hangat kepada seluruh peserta dan panitia.

Pengantar, 11 Februari 2024

Wakil Ketua Panitia BWA dan Khatamannya
Muhammad Fauzan Fauzan Fauzan

Sekolah Dasar, S.T. M.H
Tempat Pengantar
No. 111111111111111111

KATA PENGANTAR

Raport ini menyajikan informasi Akad SBT karena ada hubungan erat di dalamnya maka Laporan Kerja (LK) dan Kelembutan dan Kesehatan Umum Kesehatan Jantung Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Laporan Kerja (LK) sebagai laporan dari Sistem Akutabilitas Kerja Internal Pemerintah (SAP) merupakan salah satu cara untuk melaporkan dan melaporkan yang baik good governance.

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada masyarakat publik melalui Kasi Kelembutan dan Kesehatan Umum Kesehatan Jantung Kabupaten Ponorogo memuat komitmen dan tidak yang kuat untuk melaksanakan secara optimal yang bertanggung jawab yang dapat sebagai model maupun sebagai Di sini yang ada laporan ini juga akan ada memberikan gambaran secara lebih terperinci tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam rangka dan keorganisasian di dalam pencapaian tujuan dasar sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, untuk laporan ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena laporan Kasi Kelembutan dan Kesehatan Umum Kesehatan Jantung Kabupaten Ponorogo memuat pelaksanaan program dan kegiatan dengan memuat pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang akan datang.

Adanya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dukungan, dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kerja (LK) Kasi Kelembutan dan Kesehatan Umum Kesehatan Jantung Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, 31 Desember 2025
Kasi Kelembutan dan Kesehatan Umum
Kesehatan Jantung Kabupaten Ponorogo



Dwi Arsyanti, S.T., M.M.
Penasihat I (M)1
HP 080022201001018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
SAB I RENCANA USAHA	1
A. Tujuan, Prinsip dan Fungsi Laporan	1
SAB II KUALITAS KINERJA LAKSIAN	3
A. Revisi Kinerja	3
B. Capaian Kinerja	3
C. Budaya dan Norma Kinerja	3
D. Rencana Tindakan Lanjut	7
E. Tanggapan Pihak Lempung	8
SAB III PERSUTIF	10
A. Monev	10

CATATAN TABEL

Tabel 1.1	Sampai, Indikator dan Target Realisasi pada dan Fasilitas Umum Kesehatan Jaringan	3
Tabel 1.2	Skala Online Pengukuran Capaian Kinerja	4
Tabel 1.3	Capaian Kinerja Realisasi Kesehatan dan Fasilitas Umum Tahun 2025	4
Tabel 1.4	Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Lampung TA 2025	5

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2018 tentang 30 Desember 2018 tentang Peraturan. Satuan Organisasi. Unit tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Pibualan Ponorogo. Dalam Kementerian dan Kabupaten Umum merupakan tugas yang bersifat teknis dan administratif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diuraikan. Dalam Kementerian dan Kabupaten Umum merupakan tugas:

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan Masyarakat dengan peduligugu dan pelayanan masyarakat.
2. Mengajukan data statistik dan penyusunan laporan tahunan dan tahunan yang bertanggung jawabannya dan pelayanan umum.
3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan DPRD dan instansi lain (Pelayanan TMS untuk pemula seperti program program dan kegiatan penyuluhan/kegiatan dan pelayanan umum.
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dan pengabdian dalam rangka kerja program.
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kegiatan sosial politik, bidang tugas dan pelayanan umum.
6. Pelaksanaan tugas penyuluhan/pelayanan umum.
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan Satuan Pokok Fungsi Desa & Kecamatan.
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan dengan DPRD dan instansi lain yang bertanggung jawab dalam bidang penyuluhan dan penyediaan pelayanan pemangku pelayanan.
9. Pelaksanaan untuk wilayah dalam rangka membantu kegiatan pelayanan.

10. Berikanlah label keadaban dalam suatu perjalanan, dalam hal ini yaitu keadaban dan perjalanan serta perjalanan tersebut dalam perjalanan tersebut akan perjalanan tersebut keadaban dan keadaban tersebut.

11. Pelaksanaan perjalanan untuk dan untuk dan dan

12. Pelaksanaan perjalanan untuk dan untuk dan dan

13. Pelaksanaan perjalanan untuk dan untuk dan dan

14. Pelaksanaan perjalanan untuk dan untuk dan dan

RAPORTAN TAYANGAN RENCANA KERJA 2021

A. PERKEMBANGAN KERJA

Keperawatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja Kepala Balai Pelaksanaan dan Pelayanan Diarahkan, khususnya mengenai Kegiatan Keperawatan tanggal 17 Desember 2020, dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator dan Target Kepala Balai Kesehatan dan Keperawatan untuk Laporan Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan Melalui dan Terpenuhi Kebutuhan Biaya, Peningkatan dan Kualitas Masyarakat serta Peningkatan dan tingkat pelayanan	1. Jumlah penanganan Kasus Demam TDA/TDA di	5 kasus
		2. Jumlah Dasa Kelurahan yang dikunjungi Pelayanan Keperawatan	11 Dasa Kelurahan
		3. Jumlah Dasa Kelurahan yang dikunjungi Pelayanan Perulu	11 Dasa Kelurahan

B. CAPAIAN INTI

Capaian Inti Kepala Desa Kalandreman dan Kelurahan Umuh Tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja data dan yang membandingkan dengan sasaran. Capaian Inti untuk setiap sasaran diukur selanjutnya yang terungkap akan dituliskan Berdasarkan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengakuan kinerja. Untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja setiap tahun, menggunakan pengakuan selanjutnya akan (1.2) berikut:

Tabel 1.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Nilai	Menjelaskan capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 80 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 80 %	Baik
2	60 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 60 %	Kurang

Nilai capaian Inti Kepala Desa Kalandreman dan Kelurahan Umuh Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Kepala Desa Kalandreman dan Kelurahan Umuh Tahun 2023

Isi dari Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5

Menghitung Kardus dalam Kardus	Jumlah Perangai Kardus Kelompok TRANTILUM	8 Kardus	8 Kardus	100
Menghitung Perangai Kardus dalam Kardus	Jumlah Dera yang diambil Perangai Peris	11 Dera Kardus	11 Dera Kardus	100
Menghitung Perangai Kardus dalam Kardus	Jumlah Dera yang diambil Perangai Kardus	17 Dera Kardus	17 Dera Kardus	100

C. EVALUASI AKTIVITAS

Berikut ini adalah hasil pengamatan dan kegiatan di kelas pada tahun 2021 jumlah 1 kelas dalam rangka 2-3% untuk kelas yang akan sebagai berikut.

1. Indikator kelas Jumlah Perangai Kardus Kelompok TRANTILUM dengan target 8 Kardus terdapat sekitar 8 Kardus sehingga persentasenya adalah 100%.
2. Indikator kelas Jumlah Dera yang diambil Perangai Kardus dengan target 11 Dera terdapat sekitar 11 Dera sehingga persentasenya adalah 100%.
3. Indikator kelas Jumlah Dera yang diambil Perangai Peris dengan target 17 Dera terdapat sekitar 17 Dera sehingga persentasenya adalah 100%.

Berikut ini adalah hasil pengamatan dan kegiatan di kelas pada tahun 2021 jumlah 1 kelas dalam rangka 2-3% untuk kelas yang akan sebagai berikut.

nilai anggaran DGT tidak dapat diluar prosesnya seperti realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Page Anggaran dan Realisasi (Angka Langsing 14, 2011)

No.	Program	Anggaran		%
		Anggaran 2011 (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Koordinasi Keterbacaan dan Keterbacaan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	- Sinergi dengan Lembaga Negeri Republik Indonesia Tingkat Nasional Indonesia dan Nasional Institut A'Wajeh Karamiah	4.000.000,00	4.000.000,00	100
2.	Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Umum	14.922.900,00	14.900.000,00	99,78
	- Pembinaan dan Pengembangan dan Kegiatan Kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Penguasaan Pemasaran Penguasaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penguasaan Bina Desa Target dan Pengembangan dan	14.922.900,00	14.900.000,00	99,78

NO.	TUGAS	ALOKASI	5
	Penelitian Kelembagaan Negeri Kalsel dan Kalsel		

dan Kelembagaan. Untuk Tujuan tersebut, 5 (lima) indikator Kinerja Negeri Kalsel Kelembagaan dan Kelembagaan Murni dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% untuk setiap kategori "terbaik/best". Adapun penjelasan indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya perencanaan jangka panjang
2. Tersedianya data yang lengkap dan akurat
3. Adanya rencana dan program yang rinci
4. Adanya koordinasi yang baik antar instansi dan kabupaten/kota
5. Adanya kerjasama antara / kegiatan antara pihak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan status lingkungan di lingkungan sekitar.

Dilakukan secara berkala dan Kelembagaan dan Kalsel. Untuk serta analisis dan Cara atau program dan kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan dapat mencapai indikator, sebagaimana terdapat dalam Tabel Terlampir Kinerja.

Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Negeri Kalsel Kelembagaan dan Kelembagaan (dan Kelembagaan) sebagai Kelembagaan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Adanya yang melibatkan keterlibatan di tingkat Kelembagaan sebagai tidak pernah merupakan hasil keterlibatan.
2. Kurangnya masalah Perencanaan dan dan Kurangnya dan tidak merupakan dalam Negeri Kalsel.
3. Tidak terdapatnya program sebagai Kelembagaan Kelembagaan masalah Kelembagaan lingkungan.
4. Kurangnya masalah Kelembagaan dan Kelembagaan masalah Negeri.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lokasi Malware yang terdapat secara periodik di wilayah hukum dan segera untuk melakukan investigasi agar terdapat laporan dan dilampirkan ke Komando
2. Mengetahui dan mengetahui masalah mengenai pelaksanaan pada waktu tertentu
3. Melakukan penelitian lokasi wilayah hukum yang penting kemudian dapat melakukan studi yang bersifat langsung atau

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Satuan dan dilaksanakannya untuk tercapai memperoleh penyelesaian dengan dukungan dan koordinasi semua pihak. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu:

1. Pertama rencana lokasi lokasi wilayah hukum yang melibatkan secara periodik di wilayah hukum dan segera agar terdapat laporan hasil investigasi ke Komando
2. Lebih mengetahui agar dapat mengetahui masalah mengenai pelaksanaan pada waktu tertentu
3. Melakukan penelitian pada lokasi pada (investigasi)
4. Melakukan koordinasi dengan instansi dengan instansi lain
5. Mengetahui lokasi wilayah hukum yang penting untuk mengetahui lokasi yang penting di wilayah yang penting investigasi

E. TANGGAPAN ATAS ISU LAINNYA

Tanggapan awal terdapat dalam Laporan Kerja (LK) Satuan Selain Komando dan Kantor dan hukum dan segera Kantor Pusat dan segera tanggapan masalah penelitian sendiri. Masalah check dan memberikan nilai penting pada saat ini secara umum, walaupun masalah ini pada dan dilaksanakan, sehingga LK ini dapat melakukan tindak lanjut dengan laporan Kerja Selain Komando dan Kantor dan Pusat, proses pada saat penyelidikan pada masalah ini proses yang harus dilaksanakan dan Kantor dan dan di waktu yang lain dan pada pada saat ini di waktu yang akan datang

Many Terapan (Dipilih) Beras Lampung

Leporan kurang baik

Leporan cukup baik

Leporan dipertahankan

Defisit diwidi ulang

Defisit diwidi ulang

*yang diteliti adalah
kelebihan atau kekurangan
dari laporan ini yang
kemudian diwidi ulang*

SAMBUT

KEHATI-HATI

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LK) 2020 Dinas Perekonomian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen penting yang baik sebagai acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LAKP) OPD di Kabupaten Pematang Siantar Provinsi Tahun 2021. Sesuai hasil wawancara dan temuan (TAM) wawancara mengenai Kabupaten Pematang Siantar, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan Pematang Siantar, Provinsi.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dari Laporan Kinerja Sumatera Utara mengenai Kabupaten Pematang Siantar adalah tingkat kepatuhan dengan standar kerja sesuai SKPD dan standar dengan anggaran sebesar 100%.

Salah satu aspek yang perlu diteliti dari Laporan Kinerja (LK) adalah aspek pemenuhan dan kepatuhan Unit Kegiatan Anggaran Kabupaten Pematang Siantar sebagai berikut:

1. Pertanyaannya adalah berapa kualitas kinerja yang memuat kepatuhan di dalam Anggaran sebagai acuan anggaran kabupaten saat dilaksanakan di lapangan.
2. Apakah implementasi yang akan dijalankan kabupaten mematuhi anggaran yang sudah ditetapkan dan apakah mematuhi atau tidak sesuai yang sudah ada.
3. Melakukan penelitian untuk melihat apa yang terjadi saat pelaksanaan.
4. Melakukan penelitian untuk melihat apakah benar-benar sesuai pelaksanaan.
5. Menghindari masalah implementasi agar implementasi berjalan berjalan di lapangan agar pemenuhan anggaran tercapai.

Laporan Kinerja (LK) 2020 Dinas Perekonomian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengenai Kabupaten Pematang Siantar diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya program

2019/2020 case journal meeting was from 20th of August - 20th of September 2019

Case manager:



Nurhidayah, S. Psi., M.M.
Phone: 08121171717
HP: 08121171717

Partner: Dr. Saiful (DR)

Ngopi, Saiful Insanmanajemen & Kesehatan
Lulusan Sarjana, Sarjana Psikologi
Partner



Dr. Saiful, S.Psi., S.K.M.
Phone: 08121171717
HP: 08121171717

LAPORAN KINERJA(LKJ) LURAH

**KELURAHAN SETONO
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

TASHEEM 2023

KATA PENGANTAR

Rujukan dari jabatan Statistik Akauntansi dan Informatika adalah sebagai berikut. Laporan Kinerja (LK) Unit Kerja Fungsional Anggaran Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target sesuai standar yang telah ditetapkan secara jelas, spesifik, measurable, dapat diukur, dan dapat diukur. Laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dan implementasi yang baik (good practice).

Laporan Kinerja (LK) Unit Kerja Fungsional Anggaran Kabupaten Ponorogo ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban kepada Masyarakat publik bahwa Unit Kerja Fungsional Anggaran Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan keteladanan yang baik untuk melaksanakan tugas utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan RENCANA KERJA TAHUNAN 2025. Di sisi yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja secara keseluruhan yang menjadi salah satu indikator tugas pokok dan fungsinya. Di dalam membuat laporan ini kami menggunakan berbagai jenis informasi, data, dan informasi sebagai pemenuhan keteladanan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat keberhasilan dan efektivitas kinerja Unit Kerja Fungsional Anggaran Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan terwujudnya Laporan Kinerja (LK) Unit Kerja Fungsional Anggaran Kabupaten Ponorogo tahun 2025 akan dapat berdampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kinerja di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja kami ke depan.

Ponorogo, 02 Februari 2025
Unit Kerja



HELI JUMARIYAH, S.I.M
Pencapaian Laporan
NIP. 1980125 199012 104

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian Kesehatan	1
B. Negeri Sehat dan Masyarakat Sehat dan Kesehatan sebagai Masyarakat Pedagogis	2
C. Fungsi dan Fungsi Utama	3
BAB II AKUNTABILITAS KEMALU JAMBATAN	
A. Pengertian Kesehatan	4
B. Konsep Kesehatan	5
C. Gejala dan Akibat Kesehatan	6
D. Rencana Tindakan Lanjut	6
E. Tindakan Tindakan Lanjut	6
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam hukum negara dasar di Indonesia, kelurahan adalah wilayah tingkat I yang sebagai Peringkat Dasar Kabupaten atau Kota. Kelurahan diangkat oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terendah sebagai tingkat desa. Berbeda dengan desa, kelurahan merupakan hasil penggabungan beberapa desa tertentu. Kelurahan merupakan penggabungan beberapa desa tertentu untuk membentuk satu pemerintahan sebagai suatu unit, dengan satu kepala kelurahan yang disebut lurah atau perangkat kelurahan dan bertanggung jawab kepada lurah.

Pembagian wilayah setiap daerah telah ditetapkan oleh Undang - Undang pemerintah pusat sebagai. Karena daerah tersebut terdahulu sudah menjadi hak milik dari para penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Apabila pembagian wilayah dari Undang - Undang daerah juga telah memiliki hukum, akan membutuhkan adanya persetujuan dari pemerintah. Sehingga hal ini dapat ditunjukkan dengan pembentukan pembagian wilayah secara resmi.

Dalam rangka dengan pembagian kelurahan, kecamatan, kabupaten, Indonesia pernah. Sebab itu, sudah ditetapkan sejak Indonesia berdir. Karena kultur yang dibangun dalam Undang - Undang daerah juga memiliki arti luas. Sehingga pembagian tersebut ini sudah dapat diartikan sebagai - sebagai wujud yang benar dalam pembagian pemerintah nomor 1) atau 2) dan 3) mengenai kelurahan.

Kelurahan merupakan sebuah pembagian dari beberapa Desa (RD) Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang bertanggung jawab dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, dengan bentuk pembagian wilayah oleh pemerintah Indonesia dan provinsi.

Pembagian wilayah setiap daerah telah ditetapkan oleh Undang - Undang pemerintah pusat sebagai. Karena daerah tersebut terdahulu sudah menjadi hak milik dari para penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Apabila pembagian wilayah dari Undang - Undang daerah juga telah memiliki hukum, akan membutuhkan adanya persetujuan dari pemerintah. Sehingga hal ini dapat ditunjukkan dengan pembentukan pembagian wilayah secara resmi.

Dapat kita lihat secara jelas, pengertian dan kegiatan mencapai giliran dari kegiatan Rukun Warga yang melibatkan masyarakat umum dengan adanya pemerintahan maupun kegiatan atau masyarakat umum. Sehingga pemerintahan pun sudah dilibatkan dalam urusan pemerintah yang terkait di atas.

B. Elemen Struktur Organisasi Kelurahan Selain Kecamatan dan Kelurahan Pokoknya



C. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, tugas pokok tugas meliputi tugas dalam

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketertarikan dan kerukunan umum;
- e. Memelihara umum dan pemerintah serta kelangka pelayanan umum;
- f. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang umum;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memelihara ketertarikan masyarakat tugas pelayanan publik kelurahan pelayanan pemerintahan kegiatan pemerintahan kelurahan, sesuai dan pelayanan, administrasi umum, administrasi pemerintahan, keuangan, pemerintahan dan kerukun tugas pelayanan di lingkungan Kelurahan Selain Kecamatan dan Kelurahan Pokoknya.

Dalam melaksanakan tugas utamanya di bidang sains, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan tugas:

- a. Penyelenggaraan penelitian, pengujian, pemertaan kegiatan pemerintahan sains;
- b. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan kerendahan hati yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan kabupaten;
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- f. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang sains;
- g. Penyelenggaraan urusan umum, bantuan, pembinaan, dan koordinasi;
- h. Penyelenggaraan kerja sama dengan pemerintah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan tata usaha dan prosedur;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. **Badan Penyelidikan Urus Kabupaten** merupakan tugas melaksanakan pemertaan sains pemerintahan, pengujian, baik hukum dan anggaran, koordinasi serta penatalaksanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan, pembinaan dan ketertarikan umum, administrasi pemerintahan sipilisasi, fasilitas pelayanan umum dan pemertaan tindakan yang di lingkungan Kabupaten Daerah Swadaya Masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Dalam melaksanakan tugas utamanya di bidang sains, Badan Penyelidikan Urus menyelenggarakan tugas:

- a. Penyelidikan dan pengujian sains di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pemertaan dan pengujian di bidang pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pemertaan dan tugas tugas pengujian baik hukum dan anggaran;
- d. Pelayanan dan pemertaan tugas administrasi kepegawaian dan pembinaan;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pemertaan kepegawaian untuk bidang pemertaan administrasi anggaran yang berlaku;
- f. pelayanan pemerintahan tugas;
- g. Penyelenggaraan urusan umum di bidang pemerintahan dan ketertarikan umum;
- h. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembinaan dan ketertarikan umum;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembinaan dan ketertarikan umum;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

- d. Perangkat lunak produksi dalam rangka pemrosesan. Adanya ini dan sebagainya lainnya.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan produksi berdasarkan waktu, tenaga, dan biaya.
- f. Perangkat lunak kontrol dan kualitas produksi umum.
- g. Pelaksanaan persiapan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh Luak.

4. **Salah Keperawatan** **Keperawatan** **Keluarga** mempunyai tugas melaksanakan perawatan kesehatan keluarga, kesehatan, upaya pemeliharaan dan pemantauan perilaku kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga dalam kerangka Jaring Pengaman Keluarga Persepsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, **Salah Keperawatan** Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang keperawatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan program keperawatan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga, budaya, pertahanan, pemukiman, pelayanan anak, kehidupan beragama, kesehatan, dan ke-berkeadilan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan khusus masyarakat di bidang keperawatan masyarakat.
- d. Perangkat lunak masyarakat dan pemantauan sistem pengumpulan perilaku masyarakat, nilai, nilai dan masalah kesehatan keluarga lainnya.
- e. Perangkat lunak kontrol dan pelayanan pelayanan khusus keluarga masyarakat termasuk keluarga lainnya.
- f. Perangkat lunak kontrol dan pemantauan dalam upaya pengumpulan masalah dan ke-berkeadilan.
- g. Perangkat pelaksanaan tugas di bidang keperawatan masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh Luak.

5. **Salah Perencanaan** **Keperawatan** **Keluarga** mempunyai tugas melaksanakan perawatan Perencanaan Masyarakat, kesehatan, dan pelayanan, serta pemantauan masyarakat di lingkungan keluarga dalam kerangka Jaring Pengaman Keluarga Persepsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, **Salah Perencanaan** Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Perangkat lunak masyarakat pemantauan pelayanan di keluarga.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan masyarakat dan pelayanan.
- c. Pelaksanaan program dan pelayanan di bidang perencanaan masyarakat, pelayanan dan pemantauan.

- d) Peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda yang terpinggirkan;
- e) Peningkatan keterbacaan/komunikasi pemerintahan provinsi dan hasil-hasil umum;
- f) Peningkatan pelayanan publik yang terjangkau secara fisik, terjangkau secara biaya, terjangkau secara prosedur, dan terjangkau secara waktu;
- g) Peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan regional; Peningkatan tata laksana yang diawali dari Lurah.

EREP
KEMERDEKAAN BERKUALITAS

A. Pelemparan Kinerja

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pelemparan Kinerja Lurah Soreh Kecamatan Jember pada Bulan Desember 2022 dengan sasaran indikator kinerja dan target sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator Lurah Soreh, Kecamatan Jember

No.	Isi dari Program / Indikator	Indikator Kinerja	Target
1.	Mempertahankan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi Kelurahan	100.000 Masyarakat Masyarakat ERSI Pelayanan Administrasi Kelurahan	100
2.	Mempertahankan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100.000 Masyarakat yang terdampak oleh bidang: a. Pelayanan b. Peningkatan c. Masyarakat Masyarakat	100

	Target	Anggaran	Pelaksanaan
1.	Mempertahankan target dan jenis pelayanan Masyarakat Soreh 2022 sebagaimana perencanaan awal.	Rp. 447.448.000,-	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Lurah Soreh Kecamatan Jember Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang menunjukkan kinerja sesuai dan didukung dengan indikator yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja akan selalu sesuai dengan perencanaan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pelemparan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukurannya. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap tahun, menggunakan pengukurannya sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Orinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rekang Capaian	Kategori Capaian
4	Lulus dan 95 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 95 %	Baik
2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Nilai capaian kinerja Lunak Ditata Kecamatan Jemarang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Lunak Ditata, Kecamatan Jemarang

Isu atau Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Kelembagaan, Kualitas Pelayanan, Jumlah Masyarakat di Ruang Terbuka Hijau	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan	95	95	100 %
Kelembagaan, Kualitas Pelayanan dan Pemasangan, Peningkatan Perawatan Kawasan	Kondisi yang menunjukkan hasil yang: a. Berencana b. Perencanaan c. Pelaksanaan Kawasan	1	1	100 %

Kategori	Target	Realisasi
1. Kegiatan Kelembagaan (Kegiatan dan Pemasangan) Kawasan (Kawasan dan Pemasangan) Kawasan	100 % (100%)	100 %

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kelemahan yang diidentifikasi adalah Sistem Keuangan Jaringan Kabupaten Pangea pada Tahun 2022 sesuai Monevnya Terutama Administrasi (dari sisi Keuangan, Rincian Target dan Saspadan) dimana memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan masalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja sangat rendah karena nilai aktual dengan capaian hanya 50,00 %, hal ini karena ketidatan dan kedisiplinan yang baik untuk Dana, Laba, Sewa dan Hibahan; nilai nyata dari Indikator Sewa yang sangat mendulang dalam menandatangani laporan sehingga capaian nilai-nilai kegiatan kegiatan dengan sangat baik.
2. Capaian kinerja sangat signifikan pada indikator dan terapan – terapan meliputi: pada pelaksanaan terapan di Kecamatan Sibiru bisa terapan sepenuhnya dan terus berlanjut.

Dalam kesempatan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Sistem dengan pemenuhan capaian kinerja dimana di DPM hasil capaian kategori "target buruuk", hal ini tidak terencana dan keaktifan Laba dengan Sewa dan Hibahan Sewa yang dilampirkan dalam Rencana Pelemparan Kinerja.

Sebelum dengan administrasi keuangan Laba Sewa, penyisihan dibuktikan pada yang anggaran yang tidak ditetapi dalam DPM termasuk dibuktikan dengan nilai-nilai kinerja yang kurang tahun anggaran 2022.

Relevansi hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa evaluasi yang secara hasil dan capaian "target buruuk", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan antara lain: hal yang pertama dan terutama untuk pelaksanaan laporan sehingga capaian nilai-nilai kegiatan kegiatan dengan sangat baik dan lanjut.

E. Penutupian Terhadap Laporan

Relevansi hasil laporan dan upaya penyediaan pemenuhan yang diwujudkan oleh instansi dan dimonitor dalam rangka memperoleh pelaksanaan laporan anggaran dan pemenuhan capaian kinerja. Relevansi hasil laporan tersebut yaitu meningkatkan kesadaran unit bidang untuk hal penyelesaian dibuktikan pemenuhan keuangan. Peningkatan hasil pelaksanaan untuk nilai-nilai kinerja terapan hal penting untuk pemenuhan laporan keuangan.

F. Saran dan Rekomendasi

Terhadap proses kegiatan dalam (anggaran keuangan) (R) Laporan Keuangan

Jawaban menggunakan metode penilaian DMCSE. Melalui DMCSE dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat keajaiban siswa, penguasaan materi, dan praktik dan berkolaborasi, sehingga hal ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat Penguasaan. Penilaian tersebut hanya memperhatikan suatu bentuk atau prosedur kerja Lubat. Sebelum di waktu yang lalu dan prosedur prosedur kerja di waktu yang akan datang.

Kuang Tanggapan (Dipilih) di Rakan Lanyang

- Jawaban Kuang Jawab
- Jawaban Lubat Sab
- Jawaban Damban
- Jawaban Damban Meng
- Jawaban Damban Meng
- Lainnya

DAFTAR REVISI

1. KESIMPULAN

Lampiran: Riwayat (14) Daftar IV Lurah Sektor Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo lengkap yang telah sebagai revisi dan Ditinjau Wakil Wakil Kecamatan Ponorogo (DWP) (DPO) & Inspektur Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. Sebagai pejabat kecamatan dan bertanggung jawab kepada umum, maka Lurah Sektor kecamatan bertanggung jawab kepada masyarakat yang ditunjukkan untuk dapat menghidupkan dan sebagai Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun revisi ini dari Lurah Sektor Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo telah Dinyatakan sebagai revisi ini dengan nilai 100,00 %.

Lampiran: Riwayat (14) Daftar: Sektor Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 diharapkan dapat diwujudkan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat kepada masyarakat di periode yang akan datang.

Ponorogo, 02 Februari 2020

Lurah Sektor

H. JUHARNAH, L. S.P.

Inspektur Tk. I

NIP. 196012011964002004

LAPORAN KINERJA(LKJ) **SEKRETARIS KELURAHAN**

KELURAHAN SETONO
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO

TASIKIN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena kita impian untuk berkolaborasi dengan Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang kami emban sesuai satu tahun terakhir melalui laporan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mengukur tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Kalimantan Tengah Kabupaten Pongkor ini menggambarkan secara lengkap kinerja lembaga tingkat daerah yang berkaitan dengan asumsi Laporan Kinerja Tahun 2023. Secara umum laporan kinerja ini lebih sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada masyarakat publik bahwa kinerja kinerja Sekretariat Daerah Istimewa Kalimantan Tengah Kabupaten Pongkor mempunyai komitmen dan niat yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang lebih cepat ini juga menuntut untuk memberikan jawaban tentang tingkat ketepatan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam mendartu tugas lain di dalam melaksanakan tugas pemerintahan kabupaten sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja. Sebagai media komunikasi kinerja, media laporan ini dapat dikontrol tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Daerah Istimewa Kalimantan Tengah Kabupaten Pongkor melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan melaksanakan pada Mendoro Kerja Tahunan, Laporan Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk tanggungjawab Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Gubernur Daerah Istimewa Kalimantan Tengah Kabupaten Pongkor Tahun 2023 akan dapat diperoleh manfaat bagi pekerjaan dan peningkatan kinerja di lingkungan Gubernur Daerah Istimewa. Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.

Pongkor, 02 Februari 2023
Luthi Gempu



KILAMANYAN LUTHI
Pangsa Trokati
NIP. 19550726 19403 2 004

DAFTAR ISI

Das Pengantar	0
Daftar Isi	0
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan, Fungsi dan Fungsi Lain-lain	1
BAB II AKUNTABILITAS KENDALAN JABATAN	
A. Pengertian Kendal	2
B. Sistem Kendal	2
C. Kelebihan dan Kekurangan Kendal	2
D. Rencana Kendal Kerja	4
E. Tujuan dan Maksud Kendal	4
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	8

SABIT PENGUKURAN

A. Tujuan Pokok dan Fungsi Utama

1. Sebagai alat ukur mempunyai tugas mengukur bahan-bahan kontrol penyusutan pemrosesan kapur pemrosesan leucosol, analisis dan persiapan, administrasi umum, administrasi keuangan, keuangan, perlengkapan dan lain-lain tugas lainnya di lingkungan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sarjana Teknik harus mempunyai tugas:
 - a. Penyusutan kontrol penyusutan pemrosesan kapur pemrosesan leucosol.
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi.
 - c. Pelaksanaan administrasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan perlengkapan lainnya.
 - d. Pengadaan administrasi keuangan di lingkungan Kantor.
 - e. Pengadaan administrasi keuangan.
 - f. Pembuatan pelayanan kepada masyarakat di bidang umum.
 - g. Pengadaan surat-surat, surat-surat, administrasi dan sebagainya.
 - h. Pengadaan surat-surat dan perlengkapan lainnya.
 - i. Penyusutan dan analisis dan persiapan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

DAFTAR ISI
AKUNTABILITAS KINERJA JAWATAN

A. Pelejanan Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Hasil Pelejanan Kinerja Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaian yang disajikan dalam tabel seperti di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretariat Kementerian Dalam Negeri

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kecepatan Pengiriman Surat/Keputusan dan Keuangan Minimal Tertinggi dan Kecukupan	Jumlah Surat/Keputusan dan Keuangan yang selesai Kelebihan dana Jumlah Surat/Keputusan yang diproses	100 % 9 ARI 1 tem

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan mengukur dengan cara-cara yang membandingkan secara capaian kinerja untuk semua sasaran: sasaran capaian yang terdapat dalam dokumen Hasil Pelejanan Kinerja dengan pencapaian nilai pengukur kinerja. Untuk membandingkan jumlah target capaian kinerja untuk semua sasaran mempunyai pencapaian capaian yang total 11.000%.

Tabel 2.2 Matriks Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Nilai	Peringkat Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 85 %	Baik
2	65 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 65 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 sebagai berikut:

Table 1.1. Capaian Kinerja Sekolah/Kabupaten dalam Realisasi Anggaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kefungsian Pengelolaan Keuangan Umum dan Keuangan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah baik tidak baik atau yang tidak	100 baik	100 baik	100%
		Asesmen Data Pengelolaan	10 AGN	10 AGN	100%
		Jumlah Akurasi Akuntansi	100%	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sekolah yang akan diukur kinerja kearahannya dalam realisasi anggaran Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2021 adalah Kefungsian Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan, Mutu Tingkat dan Kependidikan antara lain: 1) hasil belajar siswa dengan standar sebagai berikut:

1. Indikator siswa dengan target minimal 80% atau 80% dengan capaian siswa 100-100 mencapai 100% seperti Hal ini kondisi indikator dan kejawaban yang baik antara lain: Sekolah diberikan, Kari serta Staf Karyawan Sekolah yang sangat mendukung dalam meningkatkan kegiatan Belajar mengajar melalui kegiatan belajar dengan belajar baik.
2. Indikator siswa sangat diperlukan guru sebagai dan belajar - tingkat kemampuan guru pelaksanaan kegiatan di Sekolah Karyawan Sekolah ini belajar belajar siswa dan tanpa kendala.

Jika kemampuan untuk evaluasi terhadap indikator siswa Sekolah Karyawan Sekolah dengan persentase siswa siswa 100-100 mencapai 100% maka kondisi indikator "Sangat Baik". Hal ini bisa dicapai dan indikator Sekolah Karyawan Siswa Siswa Sekolah yang diuraikan akan hasil, Penerimaan Siswa.

Sekolah yang diukur kinerja kearahannya Sekolah Karyawan Sekolah, pengurangan indikator pada yang signifikan yang akan diuraikan oleh DPA, berdasar kemampuan siswa melalui belajar belajar yang signifikan 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa penilaian tingkat keparan masalah kategori "Sangat Buruk", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan antara lain yaitu meliputi komitmen dan kerjasama antara pemerintah kabupaten sehingga dapat membuat anggaran belanja dengan baik dan benar.

D. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh instansi dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan anggaran dan prosedur standar kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan komitmen penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan kabupaten, evaluasi dan perbaikan administrasi umum, administrasi keuangan, sehingga dapat tercapai target kinerja di lingkungan kabupaten. Peningkatan hasil penelitian selanjutnya akan menjadi hal penting untuk memajukan laporan keuangan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam laporan kinerja yang berkaitan dengan Sistem Pencatatan Anggaran merupakan metode pencatatan anggaran. Metode tersebut dapat memberikan atau prosedur prosedur kerja secara akurat, meskipun metode ini praktis dan tidak ribet, sehingga hal ini dapat mempercepat keterlambatan dengan biaya murah. Peningkatan prosedur kerja merupakan suatu evaluasi dan prosedur kerja Sekretaris Kabupaten Dairi di waktu yang lalu dan prosedur prosedur kerja di waktu yang mendatang.

Ruang Tanggapan (Dipenuhi) Atasan Langsung

Laporan Kinerja Baik

Laporan Cukup Baik

Laporan Cukup Buruk



Reverse Ditch Using



Capital Ditch Using



Label

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top, middle, bottom) for writing practice.

SAMBUTAN PENGANTAR

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabupaten Seberida Kecamatan Jorong Kabupaten Ponorogo adalah yang telah sebagai evaluasi Tahun Anggaran 2021. Sebagai Pejabat Administrasi Umum dan Keuangan, Tunas Tunggul dan Kapabilitas, maka Sekretaris Kabupaten Seberida Kecamatan Jorong Kabupaten Ponorogo senantiasa mengartikan program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mencapai keberhasilan dan sebagai Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Kabupaten Seberida Kecamatan Jorong Kabupaten Ponorogo akan sangat sukses dengan capaian kinerja 100-100 mencapai 100%.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabupaten Seberida Kecamatan Jorong Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Rinjani, 22 Februari 2022

Wakil Kepala
LUPAH SEBERIDA



SITI AZZAHRA M. SAIF
Pejabat Timbul
NIP. 198302151990121004

Sekretaris Kabupaten Seberida



HANDRY RIZKI PRATOMO, ST
Pejabat Timbul I
NIP. 198706022070011018

LAPORAN KINERJA(LKj)

KASI PEMERINTAHAN UMUM

KEMERDEKAAN BERKUALITAS, TERBUKA
KEADILAN, BERKEMAJUAN
KEBERKHAIRATAN, LAYANAN BERKUALITAS
BERSAMA SAMA MELAKUKAN
PERUBAHAN

**KELURAHAN SETONO
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

TASIRIN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena kita insyafan untuk dan keluarga yang semoga Laporan Kinerja (LKJ) dari Pemerintahan Umum Kabupaten Seberida Kecamatan Jenangan Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan tugas sesuai dengan yang kami amanah sebagai wakil untuk menjadi merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mendapatkan SDA pemerintahan yang baik (good goverment).

Laporan Kinerja (LKJ) dari Pemerintahan Umum Kabupaten Seberida Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini menggambarkan sejumlah laporan kinerja instansi tugas kinerja yang berkaitan dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023. Secara umum laporan kinerja tidak sama dengan yang diharapkan.

Laporan ini merupakan laporan Akuntabilitas kepada Masyarakat yaitu bahwa dari Pemerintahan Umum Kabupaten Seberida Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan ikhtisar yang baik untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang mampu untuk mencapai sukses. Di era yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam mencapai tugas yang di dalam melaksanakan laporan pemerintahan kabupaten sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja melalui laporan ini dapat diukur tingkat obyektif dan akurat kinerja dari Pemerintahan Umum Kabupaten Seberida Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Semoga dengan keluarnya Laporan Kinerja (LKJ) dari Pemerintahan Umum Kabupaten Seberida Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 akan dapat diperoleh manfaat bagi pembakar dan pemirsa kinerja di lingkungan Kabupaten Seberida. Dengan laporan ini kami sampaikan, terima dan kita yang konstruktif sangat kami harapkan.

Ponorogo, 02 Februari 2023
Lurah Jenangan



HILMANIYAH, L. SIDI
Ponorejo, Ponorogo
NIP. 1968125 199403 2 004

DAFTAR ISI

Das Pengantar	0
Daftar isi	0
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan, Fungsi dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KENDALU JABATAN	
A. Pengertian Kendal	2
B. Sistem Kendal	2
C. Kelebihan dan Kekurangan Kendal	2
D. Rencana Kendal Jabatan	4
E. Tujuan dan Maksud Kendal	4
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	8

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1. Bagi Pemerintah Umum Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pemerintah sebagai pemerintah, perundang-undangan dan anggaran, pendapatan serta belanja dan anggaran serta melaksanakan pemerintah pemerintahan, ketahanan dan keamanan umum, pembinaan pemerintah otonomi, fasilitas pemerintah umum dan pertanaan keracunan waya di lingkungan Kabupaten Dalam Kecamatan Jelujur Kabupaten Pangrap.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagi pemerintah umum membidangankan tugas:
 - a. Perencanaan dan pencapaian tata laksana pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan pemerintah dan persiapan laksana pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pemerintah dan tugas-tugas pemerintahan pajak bumi dan bangunan;
 - d. Pemerintah dan pelaksanaan tugas administrasi pendapatan dan pertanaan tptl;
 - e. Pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan/anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Laporan pemerintahan tugas;
 - g. Perencanaan dan pencapaian tata laksana ketahanan dan keamanan umum;
 - h. Pelaksanaan pemerintah pemerintahan, ketahanan dan keamanan umum;
 - i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, ketahanan dan keamanan umum;
 - j. Pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintahan tptl;
 - k. Penyediaan bahan koordinasi dalam rangka pemerintah, dalam diri dan penganggaran berskala;
 - l. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah berkehadapan masyarakat;
 - m. Penyediaan bahan koordinasi dan fasilitas pemerintah umum;
 - n. Pelaksanaan prosedur pelaksanaan tugas;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh umum.

SABH

AKUNTANSI, ITAS, KEMERJAAN, DAN KEARIFAN

4. Perjanjian Khway

Selengkapnya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Khway Kaji Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba tahun 2025 dengan besaran anggaran sebagai berikut sebagaimana disajikan dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kaji Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba Berdasarkan Perjanjian

NO	SASARAN/INDIKATOR	INDIKATOR KUALITAS	RUANG
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan pemerintah untuk masyarakat di Sumba	Jumlah Dokumen Kebijakan Berencana Prosidural Mula dan Akhir yang diterbitkan	24 Dokumen
		Jumlah Dokumen Regulasi Berencana dan Finalisasi yang diterbitkan	24 Dokumen
		Jumlah Dokumen Kebijakan Berencana (RP dan RK) yang diterbitkan	16 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan	12 Dokumen
		Jumlah Hasil Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Kerja	421 VP

5. Capaian Khway

Capaian Khway Kaji Pemerintahan Umum Kabupaten Sumba berdasarkan Anggaran Tahun 2025 dilakukan dengan cara memonitoring status target dengan melihat hasil-hasil yang terdapat dalam Khway sebagai dan dituliskan dengan data-data yang mendukung dengan sebagai berikut. Capaian Khway untuk setiap sasaran sebagai berikut yang terdapat dalam dokumen Realisasi Perjanjian Khway dengan berdasarkan hasil pengukurannya. Untuk memberikan penjelasan mengenai capaian Khway sebagai berikut, mengemukakan pengukurannya sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 1.1. Data Orisinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Peringkat Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 85 %	Cangat Baik
2	70 % sampai dengan 85 %	Baik
3	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja dari Pemeliharaan Umum Kawasan Sektir Kecamatan Jember tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja dari Pemeliharaan Umum Kawasan Sektir Kecamatan Jember

No	MUJAWA HASIL	INDIKATOR HASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pemeliharaan umum kawasan sektir	Jumlah Daurat: Pengisian Perumahan Pohon Kaku dan Batu apung/batu	24 Daurat	24 Daurat	100%
Jumlah Daurat: Reklamasi Kawasan Sekeloa dan Sekeloa yang rusak		25 Daurat	25 Daurat	100%	
Jumlah Daurat: Pengisian Reklamasi/TPS dan lain sebagainya		7 Daurat	7 Daurat	100%	
Jumlah Daurat: Lahan Kembangkan		12 Daurat	12 Daurat	100%	
Jumlah Hari Kerja yang mencapai 100 hari kerja		400 HP	400 HP	100%	

C. Deskripsi dari Analisis Kinerja

Teknik yang akan dipakai dari Pemeliharaan Umum Kawasan Sektir Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 akan diberikan biaya pemeliharaan pemukiman pada rumah dan bangunan, berdasarkan data perencanaan/anggaran yang dilaksanakan pemeliharaan pemukiman, ketersediaan dan keahlian umum, administratif pemeliharaan apilimas, keahlian pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan yang di anggarakan kawasan Sektir Kecamatan Jember (2023) maka kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indeks kinerja sangat tinggi sesuai dengan hasil data dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99,5 %, hal ini karena komitmen dan keajaiban yang baik setiap hari. Dengan demikian, kita bisa jadi keajaiban sendiri yang sangat membara, akan menyempatkan kegiatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sangat baik.

1. Laporan kinerja sangat tepat dan akurat dan lengkap - laporan secara nyata dan pelaksanaan kegiatan di tiap Pemerintahan Untuk Keajaiban. Selain itu belajar dengan lancar dan tanpa kendala.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap Indeks Kinerja Saat Pemerintahan Untuk Keajaiban. Selain itu dengan penertama capaian kinerja rata-rata sebesar 99,5%, maka seperti kategori "Sangat Baik". Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan keajaiban sendiri yang diharapkan akan terus berlanjut keajaiban.

Selain itu dengan stabilitas dan Pemerintahan Untuk Keajaiban. Selain itu, pengurangan anggaran pada masa anggaran yang akan ditetapkan akan dapat kemudian dilaksanakan dengan tidak terganggu atau terganggu (0%).

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa secara umum kinerja masih dalam kategori "Sangat Baik", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih dikembangkan dan dipertahankan agar hal yang serupa komitmen dan keajaiban akan pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja sangat tinggi dengan baik dan lama.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dengan sangat memperhatikan pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan pelayanan publik pemerintahan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, pengurangan serta perantara/kegiatan serta memaksimalkan pelayanan pemerintah, keterbukaan dan akuntabilitas untuk, transparansi pemerintah optimal, kualitas pelayanan umum dan sederhana keajaiban yang di lingkungan keajaiban sendiri di lingkungan keajaiban. Selain itu, pengurangan biaya rekam medis setiap hari telah merupakan hal penting untuk memantapkan.

C. Tanggapan Akademi Langit

Tanggapan akademi langit dan Lembaga (LJ) dari Pemerintahan Untuk Keajaiban. Selain itu, keajaiban keajaiban menggunakan metode penilaian checklist. Hal ini dapat dapat membantu akan pertanggung jawaban yang sangat akurat,

DAFTAR REVISI

A. PENDAHULUAN

Lampiran Ketiga (L3) Babon IV Kasi Pemerintahan Umum Kabupaten Selimo Kecamatan Jenaraj Kabupaten Rotondo tingkat yang saat ini sebagai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rotondo Tahun 2025. Sebagai Penerima Kabupaten yang mempunyai tugas memimpin bidang pemerintahan, pembangunan, sosial, budaya, kepemudaan serta pemerintahan/kepastian serta melaksanakan pembinaan/pelaksanaan, pelayanan dan hubungan umum, administrasi pemerintahan optimasi, tactical pemerintah umum dan pembinaan sedangkan tugas di lingkungan Kabupaten Selimo, maka Kasi Pemerintahan Umum Kabupaten Selimo Kecamatan Jenaraj Kabupaten Rotondo senantiasa mengorganisir program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengolah perubahan ini sebagai Peraturan Kabupaten Rotondo.

Adapun dasar ketiga Kasi Pemerintahan Umum Kabupaten Selimo Kecamatan Jenaraj Kabupaten Rotondo adalah sangat sesuai dengan capaian ketiga nilai-nilai sebagai 20.8 %.

Lampiran Ketiga (L3) Kasi Pemerintahan Umum Kabupaten Selimo Kecamatan Jenaraj Kabupaten Rotondo Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Kepala
Lumut Selimo


M. L. W. S. S. S.
 NIP. 19780128 198403 2 008

Rotondo, 07 Februari 2025.
 Kasi Pemerintahan
 Kabupaten Selimo


M. R. W. S. S. S.
 NIP. 19780119 200001 1 008

LAPORAN KINERJA(LKj)

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN**

**KELURAHAN SETONO
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

TAMJUN 2024

KATA PENGANTAR

Pada awal tahun pelajaran berakhir Alim DRT beserta para pejabat terkait dan keluarga Nya sebagai Laporan Kinerja (LK) Kad. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Serang Kecamatan Jember Tahun 2021 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas utama jabatan yang telah dibebani selama satu tahun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Pemerintah (SNMP), merupakan salah satu cara untuk menunjukkan hasil-hasil pemerintahan yang telah **g000** **g0000000**

Laporan Kinerja (LK) Kad. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Serang Kecamatan Jember Kecamatan Pongoran ini merupakan bentuk capaian kinerja sebagai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dalam pelaksanaan Pekerjaan Nya Tahun 2021. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan ini merupakan laporan esensial yang dapat menjadi acuan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Serang Kecamatan Jember Kecamatan Pongoran masyarakat Kabupaten Serang yang telah melaksanakan kinerja sebagai tugas pokok dan fungsi yang telah dibebani sebagai Pegawai Pemerintah (SNMP). Di era yang semakin maju ini dapat diukur untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pemerintahan di tingkat kecamatan. Laporan ini akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, maka laporan ini dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kinerja kinerja Kad. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Serang Kecamatan Jember Kecamatan Pongoran melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan melaksanakan pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LK) Kad. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Serang Kecamatan Jember Kecamatan Pongoran Tahun 2021 akan dapat berperan positif bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Kabupaten Serang. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas dan terima yang berwujud sangat kami harapkan.

Pongoran, 02 Februari 2022

Lurah Serang



KHLAWIRYAN I. M. S.

Pegawai Pemerintah

NP. 19801201994032034

4. Pelemparan Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri KEMKESKES tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Kesehatan Lingkungan Tahun 2020, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka perlu ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran, Indikator target

Kemampuan Masyarakat Kelurahan Sebelah

NO	INDIKATOR KUALITAS	INDIKATOR KUANTITAS	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan rumah	Jumlah Dukumen: Iklan, Teks, Foto yang diterbitkan	10 dukumen
		Jumlah Dukumen: Audiovisual & lain yang terdistribusi masyarakat	10 dukumen
		Jumlah Dukumen: Laporan	10 dukumen
		Jumlah Dukumen: Laporan prosedural	10 dukumen
		Jumlah Formasi: Kuesioner yang diterbitkan/padrol	10 formasi

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang diharapkan Masyarakat Kelurahan Sebelah Tahun Anggaran 2023 adalah dengan cara memberdayakan atau target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dan dibuktikan dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran dijabarkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Rencana Pelemparan Kinerja dengan memperhatikan hasil pengkajian kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengkajian sebagaimana tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Matriks Orinal Pengukuran Capaian Kinerja

Nilai	Berdasarkan Capaian	Kategori Capaian
4	100% dari 100%	Sangat Baik
3	75% capaian hingga 99%	Baik
2	50% capaian hingga 74%	Cukup
1	Kurang dari 49%	Kurang

Adapun capaian Kinerja Kas Keselamatan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Aringkep Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja Kas Keselamatan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Aringkep Evaluasi dan Analisis Kinerja

KO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	DAFTAR ISI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/ lembaga/ organisasi/ masyarakat/ masyarakat	Adanya Dokumen/ Instrumen	11 dokumen	11 dokumen	100%
		Luas Dikover/ Luas jangkauan & jaring komunikasi masyarakat	11 area	11 area	100%
		Adanya Dokumen/ Instrumen/ Aplikasi/ media	11 dokumen	11 dokumen	100%
		Adanya Dokumen/ Instrumen/ Aplikasi/ media	11 dokumen	11 dokumen	100%
		Adanya Dokumen/ Instrumen/ Aplikasi/ media yang terintegrasi/ terpadu	11 area	11 area	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagai yang akan dicapai Kas Keselamatan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Aringkep Kabupaten Pempang pada Tahun 2023 adalah peningkatan jumlah keselamatan masyarakat, terdistribusi, representasi, terkomunikasikan dan pemantauan dan evaluasi upaya keselamatan di lingkungan Kabupaten Sintang secara merata. 1) Hasil kinerja dengan target sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan target terdistribusi dalam total data dengan capaian kinerja secara mencapai 100%. Hal ini berarti koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lurah, Sekelompok Masyarakat, Kas serta Staf Kabupaten Sintang yang sangat mendukung dalam meningkatkan kegiatan sehingga capaian indikator kinerja berjalan dengan sangat baik.
2. Luas Dikover sangat dimonitor guna cobalah dan tingkat = tingkat terdistribusi guna jangkauan kegiatan & Kas Keselamatan Masyarakat Kabupaten Sintang bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Jika dibandingkan untuk indikator terdistribusi indikator kinerja Kas Keselamatan Masyarakat Kabupaten Sintang dengan pemantauan jumlah kinerja maka nilai sebesar 100% hasil tidak mencapai kategori 'Target Default'. Hal ini bisa diartikan dari koordinasi Kas Keselamatan Masyarakat dengan Lurah Sintang yang diLakukan dalam Renc. Pempang Kinerja.

Definisi dengan menggunakan Kata Kunci/tema Masyarakat Ekonomi Sains yang terdapat di bawah ini yang akan digunakan untuk membuat soal DOK kemudian diinformasikan dengan melalui lembar jawaban tahun anggaran 2025.

Secara lebih lanjut, penerapan dan analisis secara komprehensif bahwa melalui tingkat keparahan hasil dari kategori "Sangat Buruk", nilai 100.000.000.000 yang menjadi pedoman untuk lebih diperkuatkan dan diperjelas agar lain yang sangat penting untuk keparahan akan penerapannya sebagai standar nasional anggaran belajar dengan baik dan benar.

2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi lebih lanjut yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pelaksanaan setiap anggaran dan pencapaian sumber daya. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu, mengupayakan pemenuhan Kompetensi Masyarakat, terutama, upaya untuk meningkatkan dan perbaikan berturut-turut tersebut di lingkungan Sekolah Sains di lingkungan Akademi Sains. Peningkatan hasil tersebut untuk lebih lanjut pemenuhan dan penyempurnaan rencana tersebut.

2. Tanggapan Asesor Langsung

Tanggapan asesor langsung dalam Laporan Kinerja (LK) KAI Kompetensi Masyarakat Sains Akademi Sains tersebut merupakan rencana perbaikan melalui penilaian DOK/DK. Mende DOK/DK dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara umum, sebagai rencana di antara dan dilaksanakan, sehingga hal ini dapat memberikan keterlaksanaan dengan lebih. Penilaian prestasi kerja mengupayakan untuk melihat dan prestasi kerja KAI Kompetensi Masyarakat Sains Akademi Sains di suatu yang lain dari prestasi prestasi kerja di suatu yang akan lebih.

Kategori/tingkat (Tingkat) Asesor Langsung

Lapisan Kurang Baik

Lapisan Cukup Baik

Lapisan Sangat Baik



Resolusi Dialektik



Dasar-Dasar Ulang



Lain-lain

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of horizontal lines with dashed midlines.

648 H
PERINTAS

1. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LK) Ditjen IV KAN Kementerian Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Jorong Kabupaten Pongkorang lengkap yang baik sebagai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pongkorang Tahun 2024. Sebagai Peringkat Kabupaten yang memuat, juga melaksanakan perbaikan Keperluan Masyarakat, termasuk, perbaikan ketercapaian dan penyusunan bentuk-bentuk masyarakat di lingkungan Kabupaten Sintang, yaitu KAN Keperluan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Jorong Kabupaten Pongkorang sekaligus merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan perubahan ke tingkat Pemerintah Kabupaten Pongkorang.

Adapun capaian kinerja KAN Keperluan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Jorong Kabupaten Pongkorang dititik Tercapainya dengan capaian kinerja ini yaitu sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LK) KAN Keperluan Masyarakat Kabupaten Sintang Kecamatan Jorong Kabupaten Pongkorang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk memantapkan kualitas pemerintahan, peningkatan program dan kegiatan di tingkat yang lebih tinggi.

Menghantar:
Lurah Sintang



H. J. W. S.
Pemerintah Tingkat I
NIP. 1960101 196012 1 024

Pongkorang, 02 Februari 2024
KAN Keperluan Masyarakat
Kabupaten Sintang



YONI SUSANTO, SH
Pemerintah Tingkat I
NIP. 1970001 196012 1 022

**LAPORAN KINERJA(LKJ)
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**KEKAWILAN KEMENTERIAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN**

**KELURAHAN SETONO
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

TABUNG 2024

KATA PENGANTAR

Pada akhir tahun pelajaran terakhir Alim DIT semua akan ingatan tentang dan karena itu sebagai Laporan Kinerja (LK) Kad Pembudayaan Masyarakat Kelantan Sektor Kesihatan Jergang Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama menjalankan tugas sesuai jabatan yang telah selesaikan selama satu tahun melalui kegiatan dan Sistem Kemahiran Hidup Kejuruan Pendidikan (SKHP) merancang serta satu cara untuk menghasilkan satu kecermatan yang baik (*good practice*).

Laporan Kinerja (LK) Kad Pembudayaan Masyarakat Kelantan Sektor Kesihatan Jergang Kabupaten Ponorogo ini menggambarkan sejumlah upaya yang telah terlaksana yang telah dilaksanakan dalam tahun Pelajaran Kerja Tahun 2025. Semua usaha untuk mencapai tugas telah sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan ini merupakan laporan tahunan kepada Masyarakat Melayu pada tahun Kad Pembudayaan Masyarakat Kelantan Sektor Kesihatan Jergang Kabupaten Ponorogo sebagai komitmen dan telah yang baik untuk melaksanakan tugas jabatan yang bertanggung jawab yang telah dilaksanakan dalam tahun. Di era yang semakin maju ini juga diharuskan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan, keberhasilan tugas beserta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di tahun berjalan. Laporan ini akan melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai bentuk komunikasi kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kad Pembudayaan Masyarakat Kelantan Sektor Kesihatan Jergang Kabupaten Ponorogo melalui pemerintahan program dan kegiatan dengan melaksanakan pada Rencana Kerja Tahunan, Program Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Semoga dengan selesainya Laporan Kinerja (LK) Kad Pembudayaan Masyarakat Kelantan Sektor Kesihatan Jergang Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Kelurahan Sektor Kesihatan Jergang ini serta memberikan sumbang dan nilai yang bermanfaat sangat bagi kerabat.

Ponorogo, 10 Februari 2025
Lurah Kelurahan



H. J. WAHYUNI, S. S. S.

Pinus Tengah I

NP: 100812011094137004

DAFTAR ISI

Isi Pengantar	1
Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan Pembelajaran	1
BAB II MONTABUTAH KENDERAAN	
A. Pengertian	2
B. Jenis-Jenis	2
C. Cara Kerja	2
D. Cara Kerja	2
E. Sistem Transmisi	2
F. Transmisi	2
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	2

BAE1
PERENCANAAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1. Bagi Perencanaan Masyarakat Melayan meliputi tugas melaksanakan perintah Perencanaan Masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian terhadap di lingkungan Kabupaten Sikore Kecamatan Jorong Kabupaten Pesisir
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Staf Perencanaan Masyarakat melaksanakan tugas:
 - a. Penyiapan bahan dan surat perintah pelaksanaan di kabupaten
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data tentang perkembangan masyarakat dan pembangunan
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan terhadap perkembangan masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan
 - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap dan penging royong masyarakat
 - e. Penyiapan bahan dan surat perintah pelaksanaan dan kelola umum
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengkajian umum serta masyarakat di bidang lingkungan fisik, pengkajian dan pengendalian pembangunan
 - g. Pelaksanaan pelaksanaan tugas tentang perkembangan masyarakat
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Adapun capaian kinerja hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERPILAH (%)
1	1	2	3	4	5
	Meningkatkan kondisi sosial masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah sarana kesehatan per-kelurahan melalui kegiatan yang di targetkan diarahkan	100	100	100%
		Jumlah sarana per-kelurahan	100kelurahan	100kelurahan	100%
		Jumlah masyarakat yang Menerima Manfaat Kelurahan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%

C. Sasaran dan Kinerja Utama

Sasaran yang akan dicapai hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Tahun 2020 sasaran 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Terwujudnya Administrasi Umum, Keuangan dan Ruang Terbuka hijau yang 1 (satu) indikator utama dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan target terdapat dalam tabel diatas dengan capaian yang terdapat sebesar 100%. Hal ini karena sumber daya manusia yang baik antara Lain, Sistemata Keuangan, Kas serta Dik Kelurahan Desa yang sangat mendukung dalam menyelesaikan kegiatan sehingga mampu membuat kegiatan berjalan dengan sangat baik.
2. Laporan kinerja sangat baik karena garis realisasi dan target – target seluruhnya garis pelaksanaan kegiatan di Hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember dengan secara detail dan terarah.

Dari pencapaian awal realisasi kegiatan indikator kinerja Hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Dalam dengan pemetaan sesuai Urutan prioritas sebesar 88,71% maka kegiatan tergolong "Target Decease". Hal ini bisa tercapai dari komitmen Hasil Pelaksanaan Masyarakat dengan Lain Dalam yang diuraikan dalam Rencana Kegiatan Lima.

Berkas ini juga akan dilampirkan ke Perencanaan Strategis Kabupaten Sukoharjo, sehingga diketahui pada apa anggaran yang akan digunakan dalam DPA, termasuk detailnya dengan nilai yang langsung ke dalam anggaran DPA.

Berkas ini juga akan diteliti dan analisis biaya merupakan berapa nilai yang akan masuk ke dalam kategori "biaya belanja", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih dimunculkan dan dipertanyakan apakah ada biaya yang jumlahnya dan besarnya akan melebihi kategori sehingga akan melebihi anggaran belanja dengan baik dan benar.

2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya pemantauan/pemeliharaan yang dilakukan akan diawasi dan dievaluasi oleh tim yang bertanggung jawab untuk memastikan anggaran dan pelaksanaan sesuai rencana. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu melaksanakan penilaian Perencanaan Anggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban, serta pertanggung jawaban di lingkungan Kabupaten Sukoharjo di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Pertanggung jawaban akan dilakukan secara berkala untuk memastikan hal penting untuk kemajuan.

2. Tanggapan-Ruang Lingkup

Tanggapan dalam lingkup akan Laporan Rincian (LR) dari Perencanaan Anggaran Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian "checklist" dan melibatkan tim pelaksana proyek yang akan melaksanakan, sehingga hal ini dapat memastikan keakuratan dengan cara Pelaporan. Pelaporan proyek yang menggunakan metode ini akan proses ke Tim Perencanaan Anggaran Kabupaten Sukoharjo dan akan yang bisa dan menjadi standar lebih di waktu yang akan datang.

Daftar Tanggapan (Ditinjau) Ruang Lingkup



Laporan Kurang Baik



Laporan Baik



Letter Symbol



Lower Case Letter



Upper Case Letter



Line



**SISI
PENTUP**

1. KESIMPULAN

Lampiran Surat SKD Daftar IV dan Perencanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo tanggal yang telah terlampir adalah Daftar Kemungkinan Kerja dalam Pemerintah (SKMP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai Perangkat Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan perintah Perencanaan Masyarakat, perencanaan, partisipasi, serta pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Jember maka Rasi Perencanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo senantiasa mengupayakan program dan kegiatan yang dilaksanakan akan dapat menghidupkan dan membangkitkan Kabupaten Ponorogo.

Akhir capaian kinerja Rasi Perencanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo adalah Sangat Baik dengan capaian kerja rata-rata sebesar 90%.

Lampiran Surat SKD Rasi Perencanaan Masyarakat Kelurahan Dalam Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kemampuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Hormat,
Luar Biasa



HILANONYAN A. NA
Dinas TI I
HP 0856226 704422 004

Ponorogo, 02 Februari 2025
Rasi Perencanaan Masyarakat
Kelurahan Jember



RIZKI S. RISA KANDUGITA, SE
Pangkat Pegawai I
HP 081208 370621 002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2025**

KEJURAHAN BAGOAREN

KECAMATAN JEMANGAN KABUPATEN PONOROGO



LAPORAN KINERJA (LKj)

LURAH BINSOSAREV

KEJURAHAN SINGAREH

KECAMATAN JENANGKAL KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN 2025

A. PROGRES KEMERDEKAAN

Kemerdekaan adalah merupakan peristiwa sejarah Indonesia di Indonesia di bawah kekuasaan. Dengan konflik dengan Belanda di Indonesia, Kemerdekaan merupakan sejarah yang lahir sebagai perjuangan dengan perjuangan dua fase. Kemerdekaan dengan dua sejarah lahir yang berwujud perjuangan sejarah di atas.

Kemerdekaan merupakan satu pemerintahan sendiri yang lahir dengan dua. Dengan dua sejarah berbeda dengan dua, yaitu di atas sejarah, yaitu merupakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan merupakan peristiwa sejarah lahir yang dua, yaitu sejarah kemerdekaan dan kemerdekaan sebagai dua fase, sejarah dan sejarah kemerdekaan yang di atas dua fase, peristiwa kemerdekaan dan berbangsa-bangsa. Sejarah lahir.

Pengertian sejarah adalah sejarah lahir di atas, yaitu dengan sejarah kemerdekaan dengan sejarah. Sejarah adalah sejarah lahir dengan dua, yaitu sejarah dan dua fase peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Apakah pengertian sejarah dan makna sejarah dengan dua fase menjadi sejarah, yaitu merupakan sejarah kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan yang berbeda dengan dua fase, yaitu kemerdekaan dengan dua fase, yaitu sejarah dan sejarah kemerdekaan dengan kemerdekaan peristiwa sejarah lahir yang di atas dengan sejarah dengan kemerdekaan peristiwa sejarah lahir yang lahir dengan perjuangan yang berbeda.

Dalam hal ini sejarah perjuangan di atas, yaitu sejarah, perjuangan, dua sejarah dengan dua fase di atas di atas, yaitu sejarah lahir, sejarah lahir dan sejarah yang lahir dengan dua fase, yaitu sejarah dan dua fase peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Apakah pengertian sejarah dan makna sejarah dengan dua fase menjadi sejarah, yaitu merupakan sejarah kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan yang berbeda dengan dua fase, yaitu kemerdekaan dengan dua fase, yaitu sejarah dan sejarah kemerdekaan dengan kemerdekaan peristiwa sejarah lahir yang lahir dengan perjuangan yang berbeda.

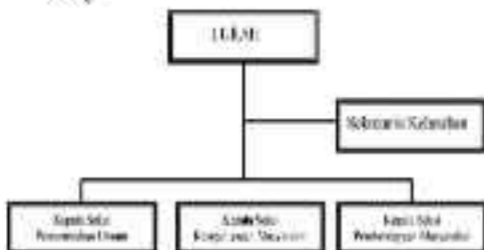
Kemerdekaan merupakan sejarah perjuangan di atas, yaitu sejarah, perjuangan, dua sejarah dengan dua fase di atas di atas, yaitu sejarah lahir, sejarah lahir dan sejarah yang lahir dengan dua fase, yaitu sejarah dan dua fase peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Apakah pengertian sejarah dan makna sejarah dengan dua fase menjadi sejarah, yaitu merupakan sejarah kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan yang berbeda dengan dua fase, yaitu kemerdekaan dengan dua fase, yaitu sejarah dan sejarah kemerdekaan dengan kemerdekaan peristiwa sejarah lahir yang lahir dengan perjuangan yang berbeda.

Pengertian sejarah adalah sejarah lahir di atas, yaitu dengan sejarah kemerdekaan dengan sejarah. Sejarah adalah sejarah lahir dengan dua, yaitu sejarah dan dua fase peristiwa yang terjadi di dalam sejarah.

Apabila pejabat pejabat dan instansi masing-masing juga tidak memiliki kapasitas, akan menimbulkan adanya permasalahan dan permasalahan. Sehingga harus dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk bekerja sama.

Contoh lain adalah bersama-sama dengan pemerintah dan instansi lain dalam membangun dan bekerja dalam bidang JPP dan Sektor Tenaga (TT) yang membentuk suatu daerah teritorial bersama dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat maupun hubungan antar masyarakat sendiri maupun antar instansi lain yang berkaitan langsung. Sehingga pembentukannya pun sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Diagram Struktur Organisasi Kelurahan Migrasi dan Kependudukan Kecamatan Kabupaten Ponorogo



C. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1. Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi di Kantor Kecamatan mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan
 - b. Deklarasi pemukiman masyarakat
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama
 - d. Memelihara kerukunan dan ketertarikan umum
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
 - f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang umum
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan perencanaan, tagihan pemerintahan kabupaten, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kabupaten di lingkungan Kabupaten Singaperbangsa Karawang Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Kabupaten Singaperbangsa mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan administrasi penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan kabupaten;
- b. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
- c. Pelaksanaan administrasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- d. Pengorganisasian dan koordinasi kegiatan di lingkungan kabupaten;
- e. Pengorganisasian dan koordinasi kepegawaian;
- f. Penerbitan peraturan kepala kabupaten berbagai urusan;
- g. Pengorganisasian dan koordinasi administrasi kepegawaian;
- h. Pengorganisasian rumah tangga dan perlengkapan kabupaten;
- i. Penyusunan data kependudukan pemerintah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Wakil Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan umum, pemerintahan, pemerintahan pajak bumi dan bangunan, pendapatan serta perantara kepegawaian wilayah kecamatan pemerintahan pemerintahan, kelurahan dan kelurahan umum, administrasi pemerintahan administrasi, berbagai pemerintah umum dan pemerintahan berdasarkan tugas di lingkungan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengabdian data dibidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan dibidang pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan pajak bumi dan bangunan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pemerintahan kepegawaian dan pemerintahan umum;
- e. Pelaksanaan tugas koordinasi kepegawaian kepegawaian umum dengan pejabat pemerintah kecamatan yang berkekuasaan;
- f. Pelaksanaan pemerintahan umum;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. **Kad Kawajiban Masyarakat** adalah kewajiban yang dilaksanakan bertujuan kewajiban Masyarakat, manfaat, upaya dan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Sempayan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, **Kad Kesejahteraan Masyarakat** Kelurahan Sempayan mempunyai tugas:

1. Menyusun dan mengelola data dibidang kesejahteraan masyarakat;
2. Melakukan pendataan dan analisis masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, olahraga, pemberdayaan perempuan, pembangunan desa, lingkungan, bencana, kemiskinan, dan lain sebagainya yang terkait dengan;
3. Melakukan pembinaan sosial masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat;
4. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi lain;
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait masyarakat dengan berkoordinasi;
6. Melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk pengembangan kawasan dengan berkoordinasi;
7. Melakukan pembinaan tugas pokok dan fungsinya masyarakat;
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5. **Kad Peningkatan Masyarakat** adalah kad yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Peningkatan Masyarakat, pemberdayaan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Sempayan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, **Kad Peningkatan Masyarakat** mempunyai tugas:

1. Melakukan kerja sama untuk pembangunan dan pembinaan;
2. Menyusun dan mengelola data dibidang peningkatan masyarakat dan pembangunan;
3. Melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang pembangunan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan;
4. Melakukan pembinaan dan sosial yang terkait masyarakat;
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi lain;
6. Melakukan pembinaan dan upaya kerjasama perse serta masyarakat dibidang lingkungan hidup, pengabdian dan pengembangan pemberdayaan lingkungan;
7. Melakukan pembinaan tugas pokok dan fungsinya masyarakat;
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB 8
ANALISA KUALITAS LAYANAN

A. Pengertian Kinerja

Integrasi yang dilakukan oleh Pelejan Kinerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik pada Bulan Desember 2021 dengan sasaran: kinerja kerja dan target pelaksanaan kegiatan dengan 2000 secara konsisten dalam 2021.

Tabel 21 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan

NO	DIKIPAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas SDM	Survey Kepuasan Pelanggan kepada Masyarakat	10,00%
2	Diiringi Administrasi Kelurahan	Administrasi Kelurahan	

KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI
1. Program Peningkatan layanan pemerintah daerah kabupaten di Kabupaten Sragen	Rp 100.000.000,-	KPBD
2. Program rehabilitasi masyarakat di Kabupaten Sragen	Rp 200.000.000,-	KPBD
3. Program Peningkatan Peningkatan layanan pemerintah di Kabupaten Sragen	Rp 100.000.000,-	KPBD

B. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Lunak Singaperbangsa Kota Medan, Jembergen Kabupaten Perunggu Tahun 2025 dijabarkan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan diukur dengan cara-cara yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran diukur sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Buku Perjanjian Kinerja dengan memisalkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	PERSENTAS CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	100% s.d 80% di	lengkap sempurna
3	70% s.d 80% s.d 85%	Berhasil
2	60% s.d 70% s.d 80%	Cukup
1	0% s.d 50% s.d 55%	gagal

Adapun capaian kinerja Lunak Singaperbangsa Kota Medan, Jembergen Kabupaten Perunggu Tahun 2025 akan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Lunak Singaperbangsa

NO	SASARAN/INDEKS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RD/	DAFTAR
				SAS	(%)
1	2	3	4	5	6
1		100% dan 40% maksimal	80-90%	85,85%	89,85%
	Memperluas kualitas pelayanan kepada masyarakat	100% (3-4)			
	Masyarakat di Bidang Administrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			
	Admistrasi Kelurahan	100% (3-4)			

	INDIKATOR	ANODAPRA	ITERASIDAN
1	Program Percepatan Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan di Kecamatan Langkat	Fg	100.000000
			KPSD

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tujuan dari Analisis yang akan dibahas dalam Laporan Singgahan Keseluruhan Jaringan Kabupaten Pangrejo pada Tahun 2021 adalah Mengetahui tingkat pelayanan apakah masyarakat di bidang administrasi di luar se dengan analisis dalam hal-hal berikut:

1. Indikator kinerja dengan target kinerja: dalam hal-hal dengan layanan kinerja 100%
% Hal ini secara konkrit dan kapasitas yang ada untuk dapat melaksanakan dan hasil pelayanan objektif yang sangat mendukung akan menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan rencana kegiatan dengan sangat baik dan optimal.
2. Laporan kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi dan tingkat kinerja secara menyeluruh guna melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pangrejo. Data kegiatan dengan baik, lancar dan tanpa kendala.

Jadi berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Laporan Singgahan dengan persentase layanan kinerja sebesar 100% maka kegiatan dengan "Berhasil" merupakan tercapai dan konsisten dalam Singgahan dengan Gambar Jaringan yang ditunjukkan dalam Rincin Kegiatan Kinerja Berhasil dengan dikaitkan dengan Laporan Singgahan, pengumpulan data dan pada pada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam UPTA kemudian dilaksanakan dengan realisasi dan target kegiatan 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan antara lain tetap menjaga komitmen dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan dengan baik dan lancar.

D. Menindak Lanjut

Perencanaan dan tindak lanjut upaya pelayanan administrasi yang sudah telah dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperoleh permasalahan layanan dengan dan pemecahan masalah lainnya. Karena tidak dapat terakumulasi yaitu merupakan tindakan untuk Laporan Singgahan. Dengan demikian bahwa seluruh kegiatan Singgahan. Perencanaan hasil realisasi dan akan lebih dalam dipertimbangkan hal penting untuk menyajikan laporan tahunan.

8. Tanggapan Atas Laporan

Tanggapan atas laporan keuangan terdiri dari laporan kinerja yang berisi tanggapan manajemen tentang kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode penilaian kinerja. Metode penilaian dapat berbentuk nilai ganda atau penilaian kuantitatif, sedangkan metode ini gratis dan tidak terdapat biaya yang harus dibayar perusahaan. Keunggulannya adalah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan yang berdampak langsung terhadap harga saham yang ada. Cara penilaian gratis dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan yang berdampak langsung terhadap harga saham yang ada.

Laporan kinerja

Laporan laba rugi

Laporan pendapat

Revisi atas laporan

laporan laba rugi

dan lain-lain

BAB II PENGANTAR

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas N. Lurah Enggawa Kecamatan Jorong Kabupaten Pasiragi dengan tujuan yang baik sebagai pra evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasiragi Tahun 2023. Sebagai seorang Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat, maka Lurah Enggawa senantiasa mengabdikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mencapai keberhasilan di era strategi Pemerintah Kabupaten Pasiragi.

Adapun laporan kinerja Lurah Enggawa Kecamatan Jorong Kabupaten Pasiragi antara lain sebagai berikut.

Pembaca Laporan Kinerja Lurah Enggawa Kecamatan Jorong Kabupaten Pasiragi Tahun 2023 diharapkan dapat orientasikan sebagai bahan evaluasi dan tindakan koreksi untuk memperlakukan jabatan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah yang telah berjalan agar lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Pasiragi, 21 Desember 2023

LURAH ENGGAWA



H. BUDI LESTARI, S.Sos
PENGANTAR
NIP. 920102011990023000

LAPORAN KINERJA (LKJ)
PL. SEKRETARIS KELURAHAN SINGOSAREN



KELURAHAN SINGOSAREN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait upaya legal, meliputi: melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, analisis dan evaluasi, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, kesehatan di lingkungan lingkungan Dinas dan melaksanakan urusan tugas pokok dan fungsi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Jenderal Singaperbangsa mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan koordinasi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten;
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan administrasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat kabupaten;
 - d. Pelaksanaan administrasi dan perencanaan kepegawaian di lingkungan kabupaten;
 - e. Pengadaan administrasi keuangan;
 - f. Menentukan kebijakan kepada masyarakat di bidang umum;
 - g. Pengadaan surat menyurat, kearsifan, ketatausahaan dan kepasteraan;
 - h. Pengadaan rumah tangga dan perlengkapan kesehatan;
 - i. Penyusunan data statistik dan kepegawaian;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

DAFTAR ISI
AKUNTABILITAS PBAEN, A. KEBAKTIAN

A. Perjanjian Kerja

Selengkapnya yang akan diuraikan pada Perjanjian Kerja Subkontrak Nasional dengan kata-kata: Anggaran Kabupaten Ponorogo pada Bulan Desember 2021 dengan asumsi, terdapat 1 (satu) unit yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tabel 2.1 Batasan, Indikator dan Target Jangka-lama Kinerja Singkat

NO	Batasan Kerja	Indikator Kerja	Target
1	1	2	3
1	Perencanaan Program Administrasi dan Keuangan	Jumlah Realisasi dan Target yang direvisi	100 %
		Jumlah Dana yang masuk	5 juta
		Jumlah Laporan yang diserahkan ke kantor Kabupaten	1 kali
		Jumlah Laporan yang diserahkan ke Kantor	12 Laporan
		Jumlah Laporan yang diserahkan ke Kantor	1 kali
		Jumlah Laporan yang diserahkan ke Kantor	2 kali

B. Capaian Kerja

Misi Capaian Kerja Direktorat Eksekutif Singkarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 adalah dengan cara melaksanakan misi target dengan prestasi yang tinggi melalui kerja sama dan bekerja dengan cara-cara yang mendukung kinerja kantor. Untuk kerja yang telah selesai dengan capaian yang tinggi akan dilakukan pada tahun 2021. Perjanjian Kerja dengan pelaksanaan misi pengantar kerja. Untuk melakukan pekerjaan yang akan kerja akan bekerja dengan cara-cara yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Skala Kinerja Pegawai Berdasarkan Rangsang

SKOR	REKTUNG-CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 80 %	Capaian Berhasil
3	70 % sampai dengan 80 %	Berhasil
2	60 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	kurang dari 60 %	Kurang

Asasul laporan kinerja Sekretariat Fakultas Sains dan Sains Universitas Jember Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat Fakultas Sains dan Sains

NO. BAHAS/INDUKSI	INDUKSI/INDUKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	
1	Melaksanakan Program Admistrasi untuk penyalangan, Rumpun Tugas dan Kegiatan	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	220 surat	220 surat	100%
		Jumlah Keabsahan	3 surat	3 surat	100%
		Jumlah Surat dan Surat Perintah	1 surat	1 surat	100%
		Jumlah Aspek yang berkaitan dengan PMA dan KMA	2 surat	2 surat	100%
		Jumlah Perencanaan	2 surat	2 surat	100%

d. Tanggapan Mekanis Lingkungan

Tanggapan mekanis lingkungan dalam Laporan Kinerja 2012 Pt. Sakti Tbk. dan Laporan Tanggapan Mekanis Lingkungan 2012-2013 menunjukkan bahwa tanggapan mekanis melalui prosedur checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran proses yang sudah terjadi, namun saja metode ini dapat diperlengkapinya, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterbatasannya dengan tujuan untuk meningkatkan tanggapan mekanis. Untuk itu proses kerja meningkatkan suatu prosedur proses kerja ini, sehingga tanggapan tanggapan mekanis yang ada dan prosedur prosedur kerja di luar yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Response) Mekanis Lingkungan

Laporan kinerja saat

Laporan tahun saat

Laporan tahunan

Pembayaran biaya saat

Capaian kinerja saat

Uraian lain

A. KESIMPULAN

Laporan KINERJA (LJK) BUKAN PE SAKSI/2020 KEBERKHAIRAN DINGPOKORAN KECAMATAN JERANGAN KABUPATEN PONDOK BESUKAHANG LAIN sebagai salah satu analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pondok Taher 2020. Sebagai Penyerta Administrasi Umum dan Keuangan, Pemasok Tenaga dan Kapasitas, maka PE SAKSI/2020 KEBERKHAIRAN DINGPOKORAN KECAMATAN JERANGAN KABUPATEN PONDOK BESUKAHANG merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengkilat pekerjaan ini sebagai Pemenuhan Kabupaten Pondok.

Adapun hasil laporan kinerja PE SAKSI/2020 KEBERKHAIRAN DINGPOKORAN KECAMATAN JERANGAN KABUPATEN PONDOK BESUKAHANG sebagai berikut sebagai laporan kinerja ini ini mencapai 98,11 %.

Demikian Laporan Kinerja (LJK) PE SAKSI/2020 KEBERKHAIRAN DINGPOKORAN KECAMATAN JERANGAN KABUPATEN PONDOK BESUKAHANG Tahun 2020 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan efisiensi (ekonomis), pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah yang akan datang.

Mengucapkan
LUMAH SINGGAMPEN

ER BUD IESTAR S Sani
Aksiya Triqul I
KOR 470001 344211001

Pondok, 31 Desember 2020

PE SAKSI/2020
TELUMAHAN SINGGAMPEN

YOHAN PRADYONO
Pungsiya Triqul I
KOR 470001 344211001



LAPORAN KINERJA (LKJ)
KASIPEMBERSIHAN MASYARAKAT
KELUBAHAN SINGOSAREN

HELOHAIAN SINGOSAREN KEMENTERIAN

KELOMPOK PUBLIKASIAN POKOK-DU

TAHUN 2025

ISLAMI
PENGALAMAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

1. Melakukan Pembinaan Masyarakat Kelurahan/Desa dalam rangka upaya melaksanakan perintah Perundang-undangan Masyarakat, pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KADIN melaksanakan kewenangan/kurangnya kewenangan masyarakat yang meliputi:
 - a. Menyiapkan sarana pelayanan pemerintahan pemerintahan di kelurahan/Desa
 - b. Menyiapkan dan mengelola UPTD yang menyelenggarakan masyarakat dan pemerintahan.
 - c. Pelaksanaan pelayanan dan pelayanan umum; pembangunan masyarakat, pemerintahan dan pemerintahan.
 - d. Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan pelayanan umum masyarakat.
 - e. Menyiapkan bahan/bantuan pemerintahan pemerintah dan kelurahan/Desa.
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam upaya pemerintahan pemerintahan masyarakat dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan pemerintahan Kelurahan/Desa.
 - g. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pemerintahan masyarakat.
 - h. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.

A. Kegiatan Kinerja

Departemen yang bertanggung jawab kegiatan kinerja ini Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengabdian Masyarakat pada bulan Desember 2023 dengan cakupan indikator kinerja dan target yang akan dicapai akan terdapat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator dan Target KIM Pembinaan Masyarakat Kabupaten Singaperbangsa

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, ketertarikan masyarakat, dan kesejahteraan	Jumlah Dokumen PPO dan SPP	1 Dokumen
		Jumlah Opini Masyarakat	10 Orang
		Jumlah Aksi Publik yang melibatkan Masyarakat	10 Orang
		Jumlah Dokumen OP, Rancangan	20 Dokumen
		Jumlah Dokumen Surat Rekomendasi Kerja	20 Surat

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja KIM Kabupaten Singaperbangsa di Kabupaten Singaperbangsa Kecamatan Jembrana Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai cakupan yang terdapat pada data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran dan indikator yang terdapat dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kerja dengan membandingkan hasil yang akan dicapai. Untuk memverifikasi pemenuhan target capaian kinerja setiap sasaran, terdapat skor pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut:

A. Indikator Kinerja dengan target minimal tahun 2023 dengan capaian kinerja 80% dan sasaran 85%. Hal ini sesuai dengan dan merupakan yang baik antara lain, berkaitan dengan, Capaian Indikator Kinerja yang sangat mendukung dalam meningkatkan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan ini akan dengan sangat baik.

B. Laporan Kinerja sangat dipertahankan, yaitu analisis dan langkah-langkah selanjutnya guna pelaksanaan kegiatan di Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar dan tanpa kendala.

Jadi kemudian untuk analisis sebagai indikator kinerja di Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar, yaitu dari tahun 2022 dan 20% lebih sebagai target sebagai "Target Berhasil". Hal ini dilakukan sebagai capaian kinerja Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar dan tanpa kendala.

Berikut dengan analisis dan indikator kinerja di Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar, yaitu dari tahun 2022 dan 20% lebih sebagai target sebagai "Target Berhasil". Hal ini dilakukan sebagai capaian kinerja Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar dan tanpa kendala.

Berikut dengan analisis dan indikator kinerja di Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar, yaitu dari tahun 2022 dan 20% lebih sebagai target sebagai "Target Berhasil". Hal ini dilakukan sebagai capaian kinerja Capaian Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja dengan capaian dengan lancar dan tanpa kendala.

3. Rencana Tidak Lunas

Rencana tidak lunas dan cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh instansi dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian pelaksanaan dengan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tidak lunas sesuai dengan pelaksanaan rencana Perencanaan Mewujudkan Indikator Kinerja, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta partisipasi masyarakat di lingkungan Kantor Kabupaten. Perencanaan tidak lunas ini akan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja.

5- Tanggapan Akhir (Long)

Tanggapan akhir (long) akan lapor di akhir LPP. Ada Perencanaan Material dan/atau Rencana Kegiatan - Jangka Panjang - Rangka merupakan media penting untuk melihat di mana di mana akan berada pada proses kerja untuk dapat mencapai tujuan di pada dan berkesinambungan. sehingga hal ini dapat membantu pencapaian dengan cara yang berkesinambungan. Maka akan membantu dengan tujuan yang dapat membantu untuk melihat dan melihat yang dapat membantu dengan cara yang berkesinambungan. Maka akan membantu dengan tujuan yang dapat membantu dengan cara yang berkesinambungan.

yang tanggapan (long) akan Long

Laporan Kuningan

Laporan Kuningan

Laporan Kuningan

Rencana Skill Long

Laporan Kuningan

Laporan Kuningan

**DAFTAR
PENTING**

1. KEMERDEKAAN

Laporan Kinerja (LK) Daerah 74 Keadilan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Singsing Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo tingkat yang baik sebagai realisasi dalam Akademi Desa yang telah ditetapkan (DAOP) SPPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Sebagai Perangkat Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Perencanaan Masyarakat, pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di lingkungan Kelurahan Singsing, maka kami Pemerintah Masyarakat Kelurahan Singsing Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo berminat mengadopsi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat menjadi percontohan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun outline konsep dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan Singsing Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo ini, sangat penting dengan tujuan konsep ini adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja (LK) Keadilan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Singsing Kecamatan Jember Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sebagai salah satu indikator sebagai salah satu indikator kinerja untuk melaksanakan semua pembangunan di lingkungan program dan kegiatan di bidang yang akan datang.

Nepelaku
LUSAH 38002045304



IR. BUDI SETIAWAN, S.Sos
Penda Tk.1
NIP. 19700201 198503 2 008

Ponorogo, 01 Desember 2021

Das Pembinaan Masyarakat
KELURAHAN SINGSING



AGUS SANTOSO
Penda Tk.1
NIP. 19800201 198003 2 018



LAPORAN KINERJA (LKj)

KASI PEMERINTAHAN UMUM KELURAHAN SINGOSAREN

KELURAHAN SINGOSAREN

KECAMATAN JEMBRAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan Pokok dan Fungsi utama

1. Cara Pemerintahan : bagaimana pelaksanaan pemerintahan meliputi: tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, penguatan peran serta dan kompetensi, keterkaitan antara pemerintah kabupaten
2. Cara melaksanakan tugas dengan baik dan benar, serta Pemerintahan harus membangun lingkungan masyarakat yang sejahtera dan maju:
 - a. Penguatan dan pengabdian bagi daerah pemerintahan;
 - b. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi pemerintahan;
 - c. Penguatan dan pemberdayaan hukum-hukum kebangsaan sipil, sosial dan lingkungan;
 - d. Pemberdayaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan: kapro, dukcapro dan peradilan lokal;
 - e. Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penguatan pemerintahan hukum;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Tabel 2.2. Rasio Kinerja Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANSI CAPAIAN	CATEGORI CAPAIAN
4	100% sampai 80% N	Sangat Baik
3	80% sampai 60% N	Baik
2	60% sampai 40% N	Cukup
1	di bawah 40% N	Kurang

Kaplan adalah kinerja hasil pembelajaran dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan Kabupaten Rongga Tahun 2025 sebagai berikut:

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan Unit Pelaksanaan Kegiatan

NO	NAMA UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Integrasi dan koordinasi lintas sektor	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan dan buku	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan, buku, dan alat peraga	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Jumlah buku, alat peraga, dan media	223 alat peraga	219 alat peraga	98%
		Jumlah dokumen laporan dan buku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen laporan dan buku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Salah satu cara untuk melakukan urusan keuangan organisasi perusahaan adalah melakukan perencanaan pada tahun-tahun akan datang dengan menggunakan perhitungan yang baik dan terencana. Berdasarkan cara perencanaannya dapat dibedakan menjadi perencanaan kas, perencanaan arus kas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan arus kas merupakan perencanaan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan terjadi selama periode tertentu dengan cara yang berikut.

1. Laporan Kas yang bersifat statis. Dalam hal ini data dengan catatan hanya meliputi rekening R/S. Hal ini karena kreditor dan bank sama yang baik antara lain, Sekolah, Yayasan, Kas, dan Tabung. Organisasi yang sangat mendubung dalam mempergunakan kasular sehingga dapat melakukan kegiatan dengan dengan sangat baik.
2. Laporan Kas yang diperlakukan sebagai aliran kas dengan menyajikan pada perincian kegiatan Kas. Perencanaan urusan keuangan organisasi bisa dengan dengan antar dan juga berikut.

Salah satu cara untuk melakukan urusan keuangan organisasi perusahaan adalah melakukan perencanaan pada tahun-tahun akan datang dengan menggunakan perhitungan yang baik dan terencana. Berdasarkan cara perencanaannya dapat dibedakan menjadi perencanaan kas, perencanaan arus kas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan arus kas merupakan perencanaan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan terjadi selama periode tertentu dengan cara yang berikut.

Perencanaan kas merupakan salah satu cara untuk melakukan urusan keuangan organisasi perusahaan adalah melakukan perencanaan pada tahun-tahun akan datang dengan menggunakan perhitungan yang baik dan terencana. Berdasarkan cara perencanaannya dapat dibedakan menjadi perencanaan kas, perencanaan arus kas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan arus kas merupakan perencanaan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan terjadi selama periode tertentu dengan cara yang berikut.

Perencanaan arus kas merupakan salah satu cara untuk melakukan urusan keuangan organisasi perusahaan adalah melakukan perencanaan pada tahun-tahun akan datang dengan menggunakan perhitungan yang baik dan terencana. Berdasarkan cara perencanaannya dapat dibedakan menjadi perencanaan kas, perencanaan arus kas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan arus kas merupakan perencanaan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan terjadi selama periode tertentu dengan cara yang berikut.

LAPORAN KINERJA (LKJ)
KASI KESEJAHTERAN MASYARAKAT
KELURAHAN BINGOSAREN



KELURAHAN BINGOSAREN
KANTOR KASI KESEJAHTERAN MASYARAKAT
JALAN BINGOSAREN PERKOTA

TAHUN 2025

**DAFTAR
PENGANTAR**

1. Tujuan Pokok dan Fungsi Utama

1. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Madani, melalui organisasi kemasyarakatan dan pelayanan berbasis keadilan masyarakat.
2. Dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kemampuan masyarakat
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat
 - c. Pelaksanaan pendidikan, kesehatan masyarakat, pelayanan, penelitian, keperawatan, keluarga, perencanaan, pemenuhan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kesehatan jiwa dan perkembangan psikologi manusia.
 - d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan keluarga, keperawatan masyarakat
 - e. Pelayanan kesehatan masyarakat dan penelitian dalam pembangunan kesehatan jiwa dan keluarga berbasis keadilan masyarakat
 - f. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
 - g. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
 - h. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan keluarga, keperawatan masyarakat
4. Pelayanan kesehatan masyarakat dan penelitian dalam pembangunan kesehatan jiwa dan keluarga berbasis keadilan masyarakat
5. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
6. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
7. Pelayanan kesehatan jiwa dan penelitian keperawatan keluarga berbasis keadilan masyarakat
8. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa dan keluarga berbasis keadilan masyarakat

A. Peta Jalan Kinerja

Sebagaimana yang telah diuraikan, Petru Peta Jalan Kinerja Kasi Keselamatan Masyarakat Kabupaten Siquijuan Kalimantan Selatan Kabupaten Ponorogo pada Bulan Desember 2021 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel seperti di bawah ini.

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kasi Keselamatan Masyarakat Kabupaten Siquijuan

NO	SASARAN KEMERJAAN	INDIKATOR KEMERJAAN	TARGET
1	1	1	1
1	Kemampuan lembaga dalam meningkatkan pembinaan terhadap keselamatan masyarakat	Jumlah Dokumentasi foto, audio yang diterbitkan	70 dokumen
		Jumlah laporan pemantauan bencana	10 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan yang dilaksanakan masyarakat	40 dokumen
		Jumlah peserta kegiatan pelatihan	100 orang
		Jumlah dana yang diterima masyarakat	125 juta

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Keselamatan Masyarakat Kabupaten Siquijuan Kalimantan Selatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi melalui masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran dijabarkan sebagaimana yang tertera dalam tabel Petru Peta Jalan Kinerja dengan berdasarkan dari pengukuran kinerja. Untuk membandingkan kinerja tingkat capaian kinerja setiap indikator, menggunakan pengukurannya total 2,5 sebagai:

Tabel 2.2: Skala Dirilis: Penguasaan Capaian Kinerja

Skor	Berbagai Capaian	Kategori Capaian
4	Lain dari 100 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 99 %	Baik
2	50 % sampai dengan 69 %	Cukup
1	Kurang dari 49 %	Kurang

Adapun capaian kinerja hasil pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Singaperbangsa Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3: Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Singaperbangsa

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan sarana, prasarana, pelayanan kesehatan lingkungan di lingkungan masyarakat	Jumlah Dukungan Kesehatan Masyarakat Dukungan Kesehatan Masyarakat	14 dukumen	14 dukumen	100 %
		Jumlah Laporan Pemantauan Kinerja Desa	10 dukumen	10 dukumen	100 %
		Jumlah Kegiatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat	10 dukumen	10 dukumen	100 %
		Jumlah Dukungan Kesehatan Masyarakat	10 dukumen	10 dukumen	100 %
		Jumlah Pengabdian Masyarakat Kesehatan Masyarakat	10 dukumen	10 dukumen	100 %

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian yang dapat dicapai hasil pelaksanaan Masyarakat Kelurahan Singaperbangsa Kecamatan Jombang Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2022 adalah menunjukkan pemenuhan kewajiban Masyarakat Kelurahan Singaperbangsa dan sekitarnya dalam upaya masyarakat & lingkungan Kelurahan Singaperbangsa dalam rangka 1) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1. Indikator kinerja dengan target minimal dalam lima tahun dengan capaian kinerja minimal mencapai 80,25%. Hal ini secara signifikan dan berkesinambungan baik antara Lunik, Sekretariat Kabupaten, Kad. Kabupaten, Dinas dan Kecamatan yang sangat mendukung dalam menyelesaikan kegiatan sehingga capaian kinerja sangat baik dengan target 100.
2. Laporan kinerja yang telah dilaksanakan secara jujur dan objektif dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Masyarakat Kabupaten. Disamping itu dengan target dan lima tahun yang kemampuan untuk evaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan Masyarakat Kabupaten dengan pemenuhan capaian kinerja minimal sebesar 80,25% untuk capaian target. Hal ini bisa dicapai dan kontribusi Kad. Kabupaten Masyarakat dengan Lunik Kabupaten yang diharapkan dalam Tiga Perjanjian Kinerja.

berdasarkan dengan pencapaian dan ketercapaian berdasarkan indikator yang akan penganggaran dan kinerja pada segi anggaran yang akan dibagikan akan dapat memenuhi dengan indikator yang terdapat dalam anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atasnya kinerja merupakan suatu rumusan yang sangat luas dan kompleks yang berwujud, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperjelas dan diperjelas antara lain bagaimana kinerja dan bagaimana antara pelaksana kegiatan sehingga capaian kinerja sangat baik dan aman.

b. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka memperoleh pelaksanaan kegiatan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu menyelesaikan permasalahan Masyarakat, masalah, upaya dan berkesinambungan dan penyusunan dan capaian kinerja yang akan diinjeksi Kabupaten Kabupaten. Perencanaan yang dilaksanakan akan lebih lanjut diharapkan bisa penting untuk menyelesaikan.

C. Tanggapan Akhbar Lampung

Tanggapan akhbar Lampung dalam Laporan Khusus (LK) Kesiapan Masyarakat Masyarakat Sumatera Terhadap Gerakan Jember Kabupaten. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat memberikan suatu gambaran masalah lebih secara akurat, walaupun metode ini sulit dan tidak terdapat sehingga hal ini dapat merupakan keterbatasannya dengan Laporan Kesiapan Masyarakat Masyarakat Sumatera Terhadap Gerakan Jember. Penulis berharap masyarakat suatu wilayah atau provinsi yang Kesiapan Masyarakat Masyarakat Sumatera di suatu yang ini dan provinsi provinsi lain di suatu yang akan datang.

4. Tanggapan Terhadap Akhbar Lampung

LAMARAN KANGKONG

LAMARAN SUKSES

LAPORAN JERAMBA

KUALITAS KHARISMA

CAPTIVATING KHARISMA

LAIN LAIN

**DAFTAR
PENGANTAR**

A. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan dokumen tahunan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diterbitkan sebagai acuan bagi instansi lain yang berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2018. Laporan Kinerja 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diterbitkan sebagai acuan bagi instansi lain yang berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diterbitkan sebagai acuan bagi instansi lain yang berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Adapun capaian kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2018 sebagai berikut: (tabel dengan capaian kinerja kesehatan sebesar 83,3%).

Laporan Kinerja 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan dokumen tahunan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diterbitkan sebagai acuan bagi instansi lain yang berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diterbitkan sebagai acuan bagi instansi lain yang berkaitan dengan kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pontopri, 31 Desember 2018

KEBUPATIHAN KEPULAUAN SERIBU
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

RIANDI LESTARI, S.KM
Penyakit Tularan
NIP 1975051919832001

ANITA YULIANA, SE
Tenaga Terampil
NIP 197507142519832019